

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Modal dasar pembangunan adalah keseluruhan sumber kekuatan yang dimiliki oleh daerah, provinsi, maupun nasional baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam kerangka perencanaan yang dinamis dan terukur untuk menopang sinergitas dan akselerasi pembangunan di berbagai tingkat atau antar susunan pemerintahan

Bagian ini memuat gambaran umum kondisi daerah untuk dijadikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan dengan sasaran utama dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana, dan sejauhmana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal, dan atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri atas aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas wilayah administrasi

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km² dimana luas daratan 1.357,03 km², sedangkan luas laut 9.146,66 km², dengan panjang garis pantai yaitu 670 km. Secara administratif pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 Kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di Kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukotanya Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukotanya Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur ibukotanya Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate ibukotanya Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena ibukotanya Kalaotoa. Adapun 6 kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar,

masing-masing Kecamatan Benteng ibukotanya Benteng, Kecamatan Bontoharu ibukotanya Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu ibukotanya Pariangan, Kecamatan Bontomanai ibukotanya Polebunging, Kecamatan Buki ibukotanya Buki dan Kecamatan Bontomatene ibukotanya Batangmata. Berikut adalah rincian luas wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Pasimarannu	176,35
2	Pasilambena	102,99
3	Pasimasunggu	114,5
4	Taka Bonerate	221,07
5	Pasimasunggu Timur	47,93
6	Bontosikuyu	199,11
7	Bontoharu	129,75
8	Benteng	7,12
9	Bontomanai	115,56
10	Bontomatene	159,92
11	Buki	82,73

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS, 2015)

Batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Selatan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur

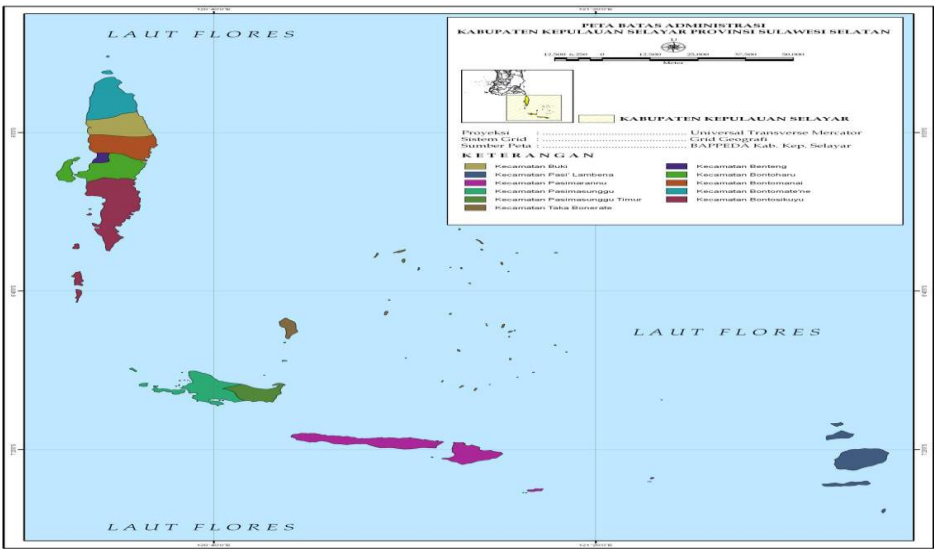
Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Selayar, sehingga Selayar sangat potensil dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi pengembangan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya

alam, terutama disektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate.

Wilayah KabupatenKepulauan Selayar terdiri atas 130 Pulau baik pulau besar maupunpulau kecil. Gugusan Kepulauan tersebut sebagian dihuni penduduk, sebagian lagi adalah pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau berpenghuni tersebut antara lain Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi Gusung, Bahuluang, Tambolongang, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate, Pasi Tallu, Kakabia, Jinato, Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Ki'di, Kalaotoa, Latondu, Pulo Madu dan lain-lain. Jumlah keseluruhan pulau berpenghuni 26 buah. Gambaran wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar secara administratif, dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1:

Peta Kabupaten Kepulauan Selayar



2.1.1.2. Kondisi Topografi

Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5⁰42’~7⁰35’ Lintang Selatan dan 120⁰15’~122’ 30’ Bujur Timur. Kabupate Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dan satu-satunya Kabupaten yang terpisah dari Pulau Sulawesi.

Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Selayar bervariasi, sebagian tanah datar dan ada yang agak miring. Fisiografi Pulau Selayar terbagi dalam beberapa morfologi bentuk lahan. Satuan-

satuan morfologi bentuk lahan Pulau Selayar dapat dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi, yaitu:

- 1) Satuan morfologi daratan alluvial pantai.
- 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang.
- 3) Satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal.

Satuan morfologi tersebut di atas dikontrol oleh batuan dan struktur dan formasi geologi yang ada di Pulau Selayar. Satuan morfologi daratan alluvial pantai menempati daratan sempit di pantai barat Pulau Selayar dan terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan satuan morfologi perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal umumnya menempati bagian barat dengan ketinggian 356-657 meter di atas permukaan laut. Bentang alam yang tinggi di sini di antaranya puncak Gunung Bontoharu (435 m), Gunung Bontokali (353 m), serta Gunung Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, lafa, konglomerat, tufa dengan batuan dengan selingan batuan sedimen laut. Persentase kelas kelerengan Pulau Selayar umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15%), dan semakin ke Selatan kelerengan tersebut semakin besar. Kecamatan Bontosikuyu mempunyai kelas sangat terjal (>40%) mencapai 43,97% terhadap luas wilayah kecamatan, sedangkan di Kecamatan Bontoharu lereng sangat terjal mencapai 33,12%, akan tetapi kebalikannya di Kecamatan Bontomatene dimana lereng sangat terjal hanya mencapai 4,21% dari luas wilayah kecamatan.

Adapun jenis tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat bervariasi berdasarkan hasil analisis iklim, geologi (bahan induk), topografi (kemiringan lereng) serta analisis vegetasi yang ada. Demikian pula penyebarannya sangat bervariasi. Berdasarkan penamaan jenis tanah sistem FAO dikenal jenis tanah Alluvial Matime yang terdapat pada pesisir pantai sampai jenis tanah latosol yang berada di daerah bergunung. Sedangkan berdasarkan penamaan tanah berdasarkan sistem USDA maka dikenal jenis tanah Emtisol sampai Ultisol. Jenis tanah adalah turunan atau rincian dari jenis tanah berdasarkan sifat-sifat

lapisan perinci atau horizon tanah. Macam tanah yang terdapat di Pulau Selayar adalah sebagai berikut:

- a) Tanah Litosol. Tanah ini terbentuk pada batuan kapur pada ketinggian lebih dari 100 meter, bentuk wilayahnya berbukit sampai bergunung dengan lereng-lereng sangat terjal sampai vertikal. Penampang tanah sangat tipis dan terdapat di sela-sela batu gamping berwarna coklat tua, lempung berdebu, gumpal sampai pejal, agak keras.
- b) Tanah Regosol Kelabu. Tanah jenis ini terdapat di sepanjang pantai barat Pulau Selayar, dari utara sampai ke Kota Benteng, pada ketinggian hingga 2 meter di atas permukaan laut. Bahan induknya endapan pasir dari tufa dan batuan alkali. Penampang tanah dalam, lapisan atas berwarna coklat tua sampai coklat, pasir granuler berbutir tunggal lepas lapisan bawah kelabu muda, pasir, berbutir tunggal lepas.
- c) Kompleks Rensine dan Regosol. Tanah ini terdapat pada batuan tua dan batu gamping koral. Bentuk wilayah berbukit dengan lereng landai sampai curam dan tidak teratur. Rensine mempunyai lapisan tanah tipis, berwarna coklat tua kekelabuan sampai coklat tua lempung berliat remah dan gembur. Lapisan tanah sedalam lebih kurang 25 cm, terletak di atas kapur lunak. Regosol berwarna coklat sangat kekelabuan, berkerikil, gumpal, gembur. Lapisan bawah coklat tua kekelabuan sampai coklat pucat liat berdebu, pejal gembur terdapat banyak batu besar dan kerikil di permukaan dan di dalam penampang tanah.
- d) Mediteran Coklat Tua. Kelompok tanah ini terdapat memanjang dari utara-selatan, dari Bontomatene sampai Barang-barang, dengan ketinggian antara 15-50 meter di permukaan. Bentuk wilayahnya berombak sampai bergelombang. Bahan induk serpih bercampur tufa. Penampang tanah cukup dalam dengan lapisan atas berwarna coklat, lempung berdebu sampai liat, gumpal sampai kubus, keras sampai sangat keras. Lapisan tanah

bawah coklat tua kekuningan sampai coklat kekuningan, lempung berdebu, gumpal sampai pejal, sangat keras.

- e) Kompleks Mediteran Merah dan Litosol. Jenis tanah ini terdapat di bagian utara Pulau Selayar, bentuk wilayahnya bergelombang dan miring ke arah pantai. Bentuk induknya batu gamping setempat terdapat batu koral. Tanah mediteran berpenampang sedang, lapisan atas debu, remah sampai agak gembur. Tanah litosol mempunyai lapisan tanah sangat tipis dengan singkapan-singkapan batu kapur.

2.1.1.3. Kondisi Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain di pengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Berdasarkan pencatatan stasiun meteorologi Benteng pada tahun 2014 secara rata-rata jumlah hari hujan di daerah ini terjadi penurunan dari tahun lalu yaitu sekitar 6,4 hari per bulan dengan jumlah curah hujan 106,8 mm dibanding dengan kondisi klimatologi pada tahun sebelumnya yakni pada tahun 2013, jumlah hari hujan rata-rata 11 dengan jumlah curah hujan 216. Hal ini menandakan terjadinya musim kemarau yang cukup panjang akibat perubahan iklim yang terjadi secara global. Sementara itu, berdasarkan stasiun meteorologi Bontomatene secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 3,6 hari dengan jumlah curah hujan 20,08 mm pada tahun 2014. Berikut disajikan jumlah hari hujan/curah hujan di stasiun meteorologi pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Curah Hujan Rata-rata pada Stasiun Meteorologi Benteng
Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2012-2014

Bulan	2012		2013		2014	
	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
Januari	11	173	22	477	14	273
Februari	12	193	12	136	7	100
Maret	16	177	4	43	8	211
April	15	158	15	313	6	99
Mei	16	342	15	211	11	73
Juni	7	172	11	480	12	228
Juli	11	60	14	312	5	27
Agustus	2	13	1	15	2	9
September	1	11	-	-	-	-
Oktober	3	19	4	22	-	-
November	12	293	11	171	2	29
Desember	16	305	20	420	10	233
Rata-rata per bulan	11	168	11	216	6,4	106,08

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2015)

Berdasarkan data pada Stasiun Meteorologi Benteng (Tabel 2.1), hujan turun tersebar dengan bulan-bulan relatif basah (≥ 100 mm) antara Bulan Januari- Juni dan Bulan November-Desember dan bulan-bulan relatif kering (≤ 60 mm) antara Bulan Juli-Oktober. Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk tipe curah hujan C dimana termasuk kategori sedang, dengan nilai $Q = 50\%$ dimana Q adalah perbandingan rata-rata jumlah bulan kering (≤ 60 mm) dibagi dengan rata-rata jumlah bulan basah (≥ 100 mm) dikalikan 100 %. Sedangkan rata-rata jumlah curah hujan tahunan 146,25 mm/tahun dengan rata-rata jumlah hari hujan 10 hari/tahun.

Sedangkan berdasarkan data pada Stasiun Meteorologi Bontomatene (tabel 2.2), hujan turun tersebar dengan bulan-bulan relatif basah (≥ 100 mm) antara Bulan April-Juli dan Bulan November-Desember dan bulan-bulan relatif kering (≤ 60 mm) antara Bulan Februari-Maret dan Bulan Juli-Oktober. Menurut tipe hujan dari Schmidt dan Ferguson (1951), berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk tipe curah hujan A dimana termasuk kategori agak kering, dengan nilai $Q = 0\%$ dimana Q adalah perbandingan rata-rata jumlah bulan kering (≤ 60 mm) dibagi dengan rata-rata jumlah bulan basah (≥ 100 mm) dikalikan 100 %. Jumlah rata-rata hari hujan tahun 2014 sebagaimana yang tercatat pada stasiun

meteorology adalah 3,6 hari/bulan dengan rata-rata jumlah curah hujan 20,08mm/bulan.

Tabel 2.5
Curah Hujan Rata-rata pada Stasiun Meteorologi Bontomatene
Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2012-2014

Bulan	2012		2013		2014	
	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
Januari	3	17	7	25	4	5
Februari	6	9	2	4	4	6
Maret	7	16	4	43	4	12
April	7	14	5	11	5	46
Mei	7	15	9	60	10	48
Juni	1	34	8	25	8	47
Juli	-	-	7	17	2	3
Agustus	-	-	1	1	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	1	1	-	-
November	4	17	5	6	1	1
Desember	4	11	11	25	6	73
Rata-rata per bulan	3,25	11,08	5	18,16	3,6	20,08

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2015)

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau kecil yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar. Geologi Pulau Selayar masih berhubungan dengan geologi Sulawesi Selatan bagian Selatan. Sedang geologi pulau-pulau kecil di kabupaten ini, yang terletak di Laut Flores, kemungkinan berhubungan dengan geologi Pulau Buton.

Batuan tertua yang menyusun Pulau Selayar adalah batuan gunung api Formasi Camba yang berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir. Bagian bawah dari Formasi Camba tersusun oleh breksi, lava, konglomerat dan tufa. Di atasnya dijumpai batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan gunungapi. Batuan-batuan Formasi Camba dijumpai di bagian tengah pulau dengan arah penyebaran utara-selatan. Di atas Formasi Camba dijumpai Formasi Walanae yang menjemari dengan Batugamping Selayar. Formasi Walanae terdiri dari batupasir yang berselingan dengan batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan batu gamping. Formasi ini berumur dari Miosen Tengah hingga Pliosen. Penyebaran batuan Formasi Walanae memanjang di bagian barat

Pulau Selayar dari utara ke selatan. Batu gamping Selayar penyebarannya terutama di bagian utara dan barat, dan terdiri dari batu gamping pejal, batu gamping koral, dan kalkarenit dengan sisipan napal dan batupasir gampingan. Umur dari batu gamping Selayar adalah Miosen Akhir sampai Pliosen Awal. Batuan termuda yang tersingkap di Pulau Selayar adalah endapan aluvial dan terumbu karang. Endapan aluvial yang merupakan sedimen pantai dan terdiri dari hasil rombakan batuan yang tersingkap di daratan, dijumpai di sepanjang pantai barat bagian tengah dan utara pulau. Endapan aluvial terdiri dari kerikil, pasir, lempung, lumpur dan rombakan terumbu karang. Pada umumnya pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar disusun oleh terumbu karang. Beberapa pulau menunjukkan kondisi geologi yang sangat berbeda dengan daratan Pulau Selayar. Beberapa pulau disusun oleh batuan beku yang berasal dari kerak kontinen seperti halnya Pulau Buton. Pulau-pulau ini adalah Pulau Jampea yang disusun oleh batuan beku granit, Pulau Kayuadi bagian utara disusun oleh batuan beku yang bersifat menengah. Keberadaan pulau-pulau ini sampai sekarang masih menjadi obyek penelitian yang menarik bagi pakar geologi. Batuan-batuan yang menyusun Pulau Selayar pada umumnya terlihat lemah sampai sedang dengan kemiringan batuan ke arah barat dan jurus perlapisannya relatif utara-selatan.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar, yang pada umumnya debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai dan sistem sungainya. Akibat sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan (straight) rendah, serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga besaran debit air sungai-sungai di Selayar sulit diukur. Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka pada wilayah bagian tengah (yang merupakan sebaran endapan formasi Walanae) merupakan suatu formasi lapisan

batuan pembawa air yang bersifat tertekan (aresian aquifes) dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari 1-3 liter/detik). Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan alluvial dan endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembah-lembah yang ditempati oleh endapan batuan formasi Camba. Tingkat kedalaman air tanah sangat bervariasi tergantung pada keadaan alam dan jenis lapisan batuan. Pada endapan alluvial dan endapan pantai, tingkat kedalaman muka air tanahnya berkisar antara 5 – 6 meter, dan sangat dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas ini dapat dijumpai pada daerah yang ditutupi oleh endapan batu gamping Selayar dari formasi Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang akibat pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air yang ada sangat terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Indikasi keberadaan mata air tersebut terdapat di beberapa wilayah antara lain: Batangmata Sapo, Lembang Lembang, Bonto dan sebelah timur Tiletile, dengan besaran debit air relatif kecil sampai sedang (1 – 4 liter/detik).

Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan perairan laut. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk sungai-sungai bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya, Tamasongia dengan debit air yang bervariasi. Keterbatasan sumber air akibat cakupan luas DAS yang relatif sempit, struktur batuan permukaan dan catchment area sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali potensi air. Oleh karena itu arahan penggunaan lahan pada kawasan potensial resapan air dibatasi untuk kawasan budidaya dan penggalian sumber air tanah khususnya kawasan Utara.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032, khususnya pada lampiran 15 telah diatur

tentang Peraturan Umum Zonasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup tiga zona utama sebagai berikut:

2.1.1.6.1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung dibagi ke dalam beberapa kriteria yaitu Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, serta Kawasan Lindung Geologi.

2.1.1.6.1.1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Bawahannya

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, dengan ketentuan umum adalah:

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :

- Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - Pengolahan tanah terbatas;
 - Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
 - Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam
- Dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomor 50 Tahun 2006;
- Kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;

- Kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

2. Kawasan Resapan Air

Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air, dengan ketentuan umum dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya. Permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :

- Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%);
- Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
- Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumurresapan sesuai ketentuan yang berlaku

2.1.1.6.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat

1. Sempadan Pantai

Kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);

- Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;
- Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Lebar sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

2. Sempadan Sungai

Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, dengan ketentuan umum kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut :

- Bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- Tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- Tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- Dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;

- Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai; dan dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.

3. Sempadan Mata Air

Kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;
- Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan Dilarang mendirikan bangunan tanpa kecuali

2.1.1.6.1.3. Kawasan Suaka Alam Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

1. Taman Nasional Laut (TNL) Takabonerate

Kawasan suaka alam laut karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya
- Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
- Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan;
- Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya perikanan skala besar atau skala usaha dan eksploitasi

sumberaya kelautan yang mengakibatkan menurunnya potensi alam laut dan perairan lainnya;

- Dilarang dilakukan penambangan terumbu karang sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen); dan Masih diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan penelitian.

2.1.1.6.1.4. Kawasan Rawan Bencana Alam

1. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

Kawasan yang potensial dilanda gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsor, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Dapat dilakukan pembangunan bangunan umum dan infrastruktur yang dibutuhkan dengan ketentuan teknis yang ramah gelombang pasang; dan kawasan pesisir rawan gelombang pasang dilengkapi bangunan/tanaman penahan gelombang tsunami, jalan dan bangunan penyelamat (*escape road & escape building*)

2.1.1.6.1.5. Kawasan Lindung Geologi

1. Kawasan Rawan Abrasi

Kawasan yang potensial terjadi bencana gempa atau longsor/abrasi yang disebabkan oleh gerakan tanah, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Pada kawasan cagar alam geologi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya permukiman;
- Kegiatan permukiman yang sudah terlanjur terbangun pada kawasan rawan bencana geologi harus mengikuti peraturan bangunan (*building code*) yang sesuai dengan potensi bencana geologi yang mungkin timbul dan dibangun jalur evakuasi;
- Pada kawasan bencana alam geologi budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi;
- Pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah tidak diperkenankan adanya bangunan terkecuali

bangunan yang terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah dan pengendali air;

- Dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah masih diperkenankan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan secara terbatas; dan pada kawasan lindung geologi masih diperkenankan dilakukan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan.

2.1.1.6.2. Kawasan Budi Daya

1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
- Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

2. Kawasan Pertanian

Kawasan dimana dilakukan seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen

untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Pada kawasan pertanian dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan
- Sawah beririgasi teknis tidak boleh dialihfungsikan
- Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
- Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- Peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- Pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan. Kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

3. Kawasan Perkebunan

Kawasaan dimana dilakukan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan

bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
- Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan
- yang diberikan;
- Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
- Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung; dan dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum (sesuai Peraturan Menteri).

4. Kawasan Peternakan

Kawasan dimana dilakukan segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi
- secara terbatas dan sesuai kebutuhan;
- Perlu dibangun infrastruktur penunjang peternakan secara memadai; dan
- Kawasan peternakan dikembangkan pada kawasan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap permukiman.

5. Kawasan Perikanan

Kawasan dimana dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi
- secara terbatas dan sesuai kebutuhan
- Kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan
- dengan kawasan yang bersifat polutif;
- Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan
- pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai
- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- Kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam
- kawasan lindung.

6. Kawasan Pertambangan

Kawasan dimana dilakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan tambang galian C yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Kawasan pertambangan tidak dapat dikembangkan pada kawasan taman nasional, hutan lindung, kawasan dengan kemiringan diatas 40% dan cagar alam/budaya;
- Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- Pada kawasan pertambangan dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan;
- Kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
- Kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
- Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
- Pelarangan pembuangan zat pencemaran lingkungan dari hasil aktivitas pertambangan.
- Pengelolaan Limbah B3 yang mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pengenaan Insentif dan disinsentif bagi industri – industri yang mengelola lingkungan dengan baik atau sebaliknya.

7. Kawasan Industri

Kawasan dimana dilakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek
- ekologis;
- Lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- Pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

8. Kawasan Pariwisata

Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;

- Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan system prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan.
- Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
- Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

9. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

10. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan khusus yang bertumbuh sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- Alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak

- dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- Dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan;
 - Pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
 - Kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
 - Pada kawasan pertahanan dan keamanan pengembangan kegiatan budidaya dilakukan secara selektif untuk menjaga fungsi utamanya; dan
 - Peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan diantaranya adalah sebagai basis militer.

2.1.1.6.3. Zona Sistem Prasarana Kabupaten

Zona pada sistem jaringan perkotaan yang terdiri dari areal pada jaringan transportasi dan prasarana penunjangnya, dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Sesuai dengan fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
- Sesuai dengan karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakatnya;
- Mengacu pada standar teknik perencanaan yang berlaku; dan Pemerintah Kabupaten tidak diperkenankan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem nasional dan provinsi, kecuali atas usulan pemerintah kabupaten dan disepakati bersama.

1. Zona Sistem Jaringan Transportasi Darat

Areal sekitar sistem jaringan transportasi darat (jalan, jembatan, terminal, halte), dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;

- Di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
- Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas milik jalan ditambah 1;
- Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi jalan aling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
- Jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
- Jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
- Jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
- Jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu
- Lokasi terminal tipe B dan C diarahkan lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Zona Sistem Jaringan Transportasi Laut

Areal sekitar sistem jaringan transportasi laut (pelabuhan), dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Pelabuhan laut harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut; dan
- Pelabuhan laut harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.

3. Zona Sistem Jaringan Transportasi Udara

Areal sekitar sistem jaringan transportasi udara (Bandar Udara), dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Bandar Udara harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari bandar udara.
- Bandar udara harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.
- Harus memenuhi standar operasi penerbangan diantaranya yaitu :Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Tas Kawasan Kebisingan (BKK), Daerah Lingkungan Kerja (DLK), Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP).

4. Zona Sistem jaringan Energi

Areal sekitar sistem jaringan energi (kabel listrik) dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Zona Sistem Jaringan Telekomunikasi

Areal sekitar sistem jaringan telekomunikasi (BTS) dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara; dan
- Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (*provider*).

6. Zona Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Areal sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air (sungai, bendung dan irigasi), dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- Diatur pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat

7. Sistem Prasarana Lingkungan

Areal sekitar sistem prasarana lingkungan (Tempat Pengolahan Sampah terpadu), dengan ketentuan umum kegiatan sebagai berikut:

- TPST tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- Lokasi TPST harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- Pengelolaan sampah dalam TPST dilakukan dengan system *sanitary landfill* sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- Dalam lingkungan TPST disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka implementasi Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008 – 2009, dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 19/2008 tentang Pengembangan Daerah Tertinggal Strategis, Deputy Menko Perekonomian bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah melakukan kajian bertajuk "Kajian Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi Daerah Tertinggal: Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar", Pada tahun 2009. Kajian ini didasari pertimbangan sebagai berikut: (i) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki posisi yang strategis, tepat di tengah bentang barat-timur NKRI. (ii) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sumberdaya alam yang dapat dijadikan lokomotif pembangunan daerah, yakni perminyakan, perikanan dan pariwisata. Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar akan ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif melalui serangkaian rencana-rencana pembangunan yang visioner.

Melalui kajian ini telah disusun Cetak Biru Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar 2010 – 2025. Dalam Cetak Biru ini, Pulau Selayar diarahkan menjadi Bandar Niaga Timur yang didukung oleh pasokan produksi bahan-bahan dari pulau-pulau lain di sekitarnya. Bandar Niaga Timur ini akan melayani pasokan barang ke dan dari KTI, yang lalu-lintas transportasinya melalui Selat Selayar. Selain itu, Bandar Niaga Timur ini akan melayani pemenuhan kebutuhan basecamp supply industri perminyakan di KTI. Terkait dengan pengembangan tersebut, sumberdaya perikanan yang berlimpah juga akan dikembangkan menjadi suatu industri perikanan terpadu. Demikian pula dengan sektor pariwisata, yang memiliki ikon Taman Nasional Laut Takabonerate, yang akan diangkat menjadi pusat destinasi wisata bahari berbasis konservasi alam. Khusus untuk kawasan utara Pulau Selayar, berdasarkan kondisi topografinya, maka alokasi lahan pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut: (1) Industri perminyakan dan logistik, perkantoran, dan zona industri UMKM seluas 2.800 hektar, (2) Ruang terbuka hijau sekitar 500 hektar, dan (3) kawasan permukiman dan fasilitas pendukung seluas 700 hektar.

2.1.1.8. Wilayah rawan Bencana

Sebagai Kabupaten Kepulauan yang secara geografis terletak di ujung selatan jazirah Sulawesi dan memanjang dari utara ke Selatan dan terdiri dari gugusan pulau-pulau (130 Pulau), Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi terhadap bencana alam berupa tsunami, kecelakaan laut, angin kencang, abrasi pantai dan banjir. Hampir semua Desa dan Kelurahan sepanjang pantai barat dan pantai timur serta 26 Pulau berpenghuni pada 5 (Lima) Kecamatan yang berada di Kepulauan, rawan terhadap bencana alam laut.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.

A. Pertumbuhan PDRB

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan (disebut juga PDRB Riil) pengertiannya sama dengan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Nilai barang dan jasa atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/ kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu (misalnya harga pada tahun 2010). Penghitungan atas dasar konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral, juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

Berikut disajikan PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan 2010:

Tabel. 2.10
 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2011-2014
 Atas Dasar Harga Konstan 2010
 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	850 343,4	43,21	906 778,0	42,72	989 261,2	42,68	1 115 059,0	44,06
2	Pertambangan dan Penggalian	13 587, 2	0,69	15 975,4	0,75	17 623,9	0,76	19 894,2	0,79
3	Industri Pengolahan	67 832,4	3,45	71 124,4	3,35	76 406,8	3,30	80 529,7	3,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2 634,3	0,14	2 935,1	0,14	3 183,6	0,14	3 512,2	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2 737,9	0,14	3 058,5	0,14	3 128,5	0,13	3 535,4	0,14
6	Konstruksi	312 472,5	15,88	349 433,6	16,46	396 697,4	17,12	430 618,9	17,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor	171 435,7	8,71	188 800,4	8,89	203 424,3	8,78	221 138,4	8,74
8	Transportasi dan Pergudangan	44 725,0	2,27	48 198,2	2,27	52 394,1	2,26	58 319,7	2,30
9	Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	4 818,0	0,24	5 107,4	0,24	5 422,8	0,23	5 691,2	0,22
10	Informasi dan Komunikasi	57 987,1	2,95	64 480,0	3,04	71 893,3	3,10	76 779,1	3,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	20 709,7	1,05	24 495,4	1,15	28 099,5	1,21	28 798,4	1,14
12	Real Estate	33 657,6	1,71	36 496,1	1,72	39 683,6	1,71	43 064,3	1,70
13	Jasa Perusahaan	289,5	0,01	330,6	0,02	378,6	0,02	426,1	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	210 574,3	10,70	217 814,5	10,26	229 423,0	9,90	233 983,3	9,25
15	Jasa Pendidikan	126 461,4	6,43	136 995,3	6,45	146 810,2	6,33	151 635,4	5,99
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37 926,4	1,93	40 454,5	1,91	43 046,1	1,86	45 991,2	1,82
17	Jasa Lainnya	9 636,5	0,49	10 334,7	0,49	10 913,6	0,47	11 671,3	0,46
	PDRB / GRDP	1 967 829,0	100,00	2 122 811,8	100,00	2 317 790,7	100,00	2 530 650,8	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar (BPS 2015)

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel. 2.11
 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2011-2014
 Atas Dasar Harga Berlaku 2010
 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	910 584,7	42,96	1 061 392,7	43,06	1 245 736,2	43,26	1 555 411,9	44,91
2	Pertambangan dan Penggalian	14 806,3	0,70	19 078,9	0,77	23 791,9	0,83	33 332,3	0,96
3	Industri Pengolahan	9 853,6	3,30	77 392,3	3,14	87 485,4	3,04	96 843,1	2,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2 610,3	0,12	2 806,9	0,11	2 829,9	0,10	3 068,3	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2 869,0	0,14	3 244,4	0,13	3 452,5	0,12	4 046,7	0,12
6	Konstruksi	349 617,9	16,49	433 433,7	17,58	544 596,1	18,91	677 643,3	19,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor	184 488,6	8,70	212 122,0	8,61	234 962,3	8,16	263 205,5	7,60
8	Transportasi dan Pergudangan	47 972,4	2,26	55 734,0	2,26	65 023,6	8,26	81 873,3	2,36
9	Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	5 010,8	0,24	5 613,2	0,23	6 137,6	0,21	7 146,5	0,21
10	Informasi dan Komunikasi	58 347,3	2,75	66 959,3	2,72	75 650,7	2,63	81 067,0	2,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	22 065,6	1,04	28 920,4	1,17	35 502,1	1,23	42 398,3	1,22
12	Real Estate	34 145,1	1,66	40 041,8	1,62	45 791,7	1,59	52 903,6	1,53
13	Jasa Perusahaan	312,6	0,01	386,1	0,02	477,4	0,02	583,9	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	230 702,7	10,88	248 903,7	10,10	269 702,1	9,37	296 958,8	8,57
15	Jasa Pendidikan	134 623,7	6,35	152 108,2	6,17	28 530,3	6,06	193 238,5	5,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40 851,7	1,93	45 520,5	1,85	51 148,1	1,78	58 937,3	1,70
17	Jasa Lainnya	9 945,6	0,47	11 277,7	0,46	12 828,7	0,45	14 859,9	0,43
	PDRB / GRDP	2 119 807,3	100,00	2 464 936,0	100,00	2 879 790,3	100,00	3 463 518,4	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar (BPS 2015)

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel T.III C.4 di atas diketahui bahwa struktur ekonomi di kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2014 sektor ini memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebesar44,91 persen. Struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB suatu daerah. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah tersebut.

Tabel. 2.12
 Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2011-2014
 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan
 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,96	43,21	43,06	42,72	43,26	42,68	44,91	44,06
2	Pertambangan dan Penggalian	0,70	0,69	0,77	0,75	0,83	0,76	0,96	0,79
3	Industri Pengolahan	3,30	3,45	3,14	3,35	3,04	3,30	2,80	3,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,14	0,11	0,14	0,10	0,14	0,09	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,13	0,14	0,12	0,13	0,12	0,14
6	Konstruksi	16,49	15,88	17,58	16,46	18,91	17,12	19,57	17,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor	8,70	8,71	8,61	8,89	8,16	8,78	7,60	8,74
8	Transportasi dan Pergudangan	2,26	2,27	2,26	2,27	8,26	2,26	2,36	2,30
9	Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	0,24	0,24	0,23	0,24	0,21	0,23	0,21	0,22
10	Informasi dan Komunikasi	2,75	2,95	2,72	3,04	2,63	3,10	2,34	3,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,04	1,05	1,17	1,15	1,23	1,21	1,22	1,14
12	Real Estate	1,66	1,71	1,62	1,72	1,59	1,71	1,53	1,70
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	10,88	10,70	10,10	10,26	9,37	9,90	8,57	9,25
15	Jasa Pendidikan	6,35	6,43	6,17	6,45	6,06	6,33	5,58	5,99
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,93	1,93	1,85	1,91	1,78	1,86	1,70	1,82
17	Jasa Lainnya	0,47	0,49	0,46	0,49	0,45	0,47	0,43	0,46
	PDRB / GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar (BPS 2015)
 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Sementara itu, potensi ekonomi pada suatu wilayah dapat diukur dari kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDRB. Variabel yang digunakan dalam PDRB terdiri dari 17 sektor lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri dan pengolahan, (4) pengadaan listrik dan gas, (5) pengadaan air pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan (9) penyediaan akomodasi dan makan

minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan (17) jasa lainnya.

Besar kecilnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki dan efektivitas pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2014, nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencapai 2.119.807,3 juta rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, nilainya sebesar 1.967.829 juta rupiah.

Struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB suatu daerah. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah. Kabupaten Kepulauan Selayar, struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan menyumbang 42,96 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 9,18 persen, dan merupakan pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir serta pada tahun 2013 menempati rangking kedua dari seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu PDRB Perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar Rp.26.902.367,-. Berikut ini digambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2011-2014.

Tabel 2.14
Perkembangan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 – 2014**

Periode	PDRB (Jutaan)		Pertumbuhan Ekonomi (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010	
2011	2119 807,3	1 967 829,0	8,88
2012	2 464 936,0	2 122 811,8	7,88
2013	2 879 790,3	2 317 790,7	9,18
2014	3 463 518,4	2 530 650,8	9,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selaya (BPS 2015)
*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan. Sedangkan PDRB menurut perhitungan atas dasar harga konstan merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga satu tahun dasar tertentu. Nilai barang dan jasa atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume/ kuantum produksi saja. Pengaruh perubahan harga telah dihilangkan dengan cara menilai dengan harga suatu tahun dasar tertentu (misalnya harga pada tahun 2010). Penghitungan atas dasar konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral, juga untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010. Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam menyediakan berbagai sumberdaya ekonomi dalam jangka panjang yang terus meningkat dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh pertambahan nilai yang diperoleh dari produksi barang dan jasa. Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dari tahun ke tahun maka secara kasar dapat dinilai prestasi dan kesuksesan suatu daerah jika mempunyai kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produksi barang dan jasa yang sifatnya jangka panjang.

Jika dibandingkan dengan angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 300.124.224,7 Juta Rupiah pada Tahun 2014, dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2014 sebesar 234.083.971,1 Juta Rupiah, maka kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Ini dapat dikatakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan

Selayar sampai saat ini masih seiring dengan perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Kontribusi PDRB Selayar terhadap PDRB Sulawesi Selatan
Tahun 2011-2014

Periode	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)		Kontribusi (%)
	Kep. Selayar (Rp.)	Sulawesi Selatan (Rp.)	
1	2	3	4
2011	2.119.807,3	192.289.084,8	1,07
2012	2.464.936,0	228.285.473,1	1,08
2013	2.879.790,3	258.682.959,2	1,11
2014	2.463.518,4	300.124.224,7	1,15
	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)		
2011	1.967.829,0	185.708.474,1	1,06
2012	2.122.811,8	202.184.587,7	1,05
2013	2.317.790,7	217.618.448,9	1,06
2014	2.530.650,8	234.083.971,1	1,08

(Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015)

Kinerja kegiatan ekonomi tersebut di atas, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita yang semakin meningkat, maka dapat mempengaruhi perbaikan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penurunan jumlah penduduk miskin serta perbaikan masa depan perekonomian.

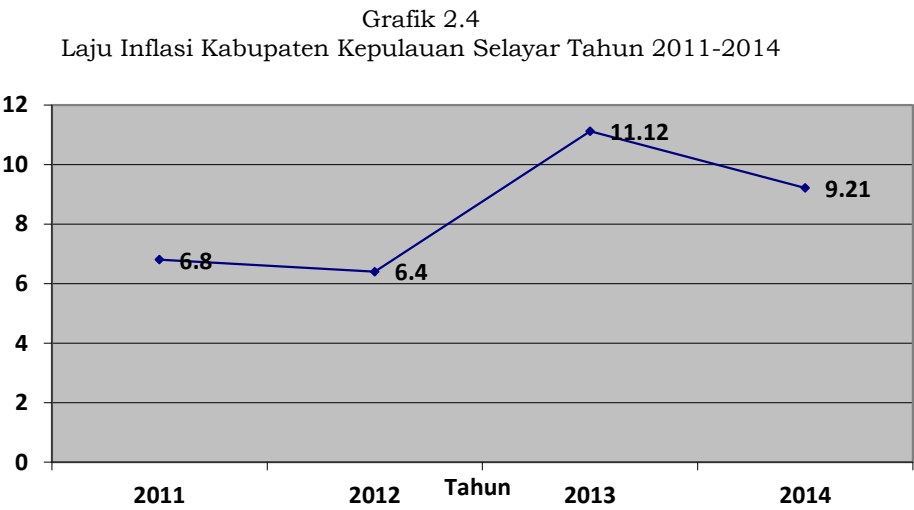
Tabel. 2.16
Perkembangan PDRB Kecamatan Tahun 2011-2014
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	KECAMATAN	Tahun							
		2011		2012		2013		2014	
		Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku
1	PASIMARANNU	154,751,796,270.00	143,656,960,050.00	178,330,014.00	153,578,453,609.25	206,918,433,748.29	166,537,688,999.22	247,071,343,028.16	180,524,894,016.32
2	PASILAMBENA	118,453,902,722.67	109,961,421,976.05	138,234,951,920.45	119,048,440,623.75	162,166,465,307.16	130,519,199,648.88	195,822,332,959.70	143,079,344,898.17
3	PASIMASUNGGU	132,587,900,115.33	123,082,090,993.95	154,462,963,455.85	133,023,828,708.75	180,796,141,598.03	145,513,239,474.54	217,640,152,994.10	159,020,730,900.70
4	PASIMASUNGGU TIMUR	125,830,405,011.54	166,809,070,405.00	145,121,961,694.01	124,979,558,352.75	168,165,085,255.01	135,347,171,160.18	200,557,149,637.95	146,538,881,194.65
5	TAKABONERATE	214,485,989,630.22	199,108,546,629.30	249,713,475,065.46	215,092,002,001.50	292,506,290,438.18	235,422,822,147.24	352,743,842,528.88	257,735,454,087.76
6	BONTOSIKUYU	247,723,236,540.20	229,962,869,271.15	287,077,482,112.84	247,232,166,025.50	333,975,995,134.26	268,799,591,236.68	400,118,911,678.77	292,350,473,508.79
7	BONTOHARU	216,411,789,761.58	200,896,277,687.70	251,415,437,250.88	216,519,883,992.00	293,343,833,600.71	236,096,916,282.78	352,232,697,546.57	257,361,981,419.39
8	BENTENG	376,046,864,936.10	349,086,412,921.50	443,539,261,623.64	382,044,852.50	525,298,017,018.14	422,784,554,306.52	640,572,272,304.39	468,039,879,292.53
9	BONTOMANAI	210,978,282,248.10	195,852,322,201.50	243,934,719,738.22	210,077,463,010.50	283,270,679,348.66	227,989,567,895.88	338,673,904,331.61	247,455,127,479.47
10	BONTOMATENE	216,841,655,862.33	201,295,324,798.95	250,801,939,253.81	246,843,887,659.81	291,261,293,845.23	234,420,790,324.14	348,143,537,688.09	254,374,200,074.43
11	BUKI	105,695,476,852.41	98,117,703,714.15	122,303,788,074.60	105,328,470,015.00	142,088,065,708.13	114,359,159,156.34	169,942,255,434.33	124,169,834,004.91

(Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015)

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi. Dilain pihak inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat merangsang perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa. Adapun gambaran laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Selayar Dalam Angka (BPS 2014)

C. PDRB Perkapita

Nilai PDRB Perkapita (total nilai PDRB dibagi jumlah penduduk) sebagai angka yang menunjukkan Pendapatan Perkapita adalah salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah. PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahun mengalami peningkatan, sementara laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2014 sebesar 9,18%. Seperti halnya telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar menempati rangking Kedua tertinggi pada 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan setelah Luwu Timur. Berikut secara detail diuraikan pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun hingga tahun 2014:

Tabel 2.17
PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2011-2014**

Periode	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
1	2	3
PDRB Perkapita (Rp)		
2011	17 080 894	15 856 290
2012	19 624 818	16 900 964
2013	22 636 302	18 218 760
2014	26 902 367	19 656 456
Pertumbuhan Ekonomi (%)		
2011	8,88	
2012	7,88	
2013	9,18	
2014	9,18	

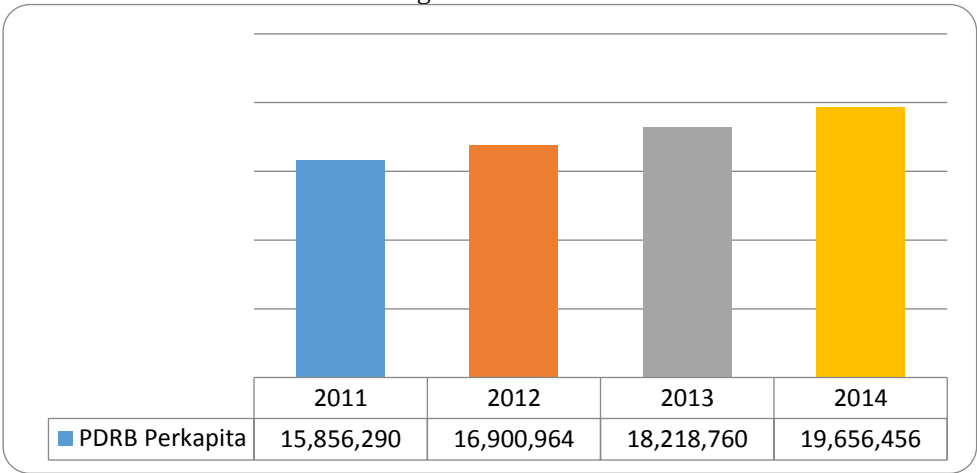
(Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015)

Mengingat bahwa PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Oleh sebab itu, angka tersebut perlu mendapat perhatian karena apabila diperhatikan lebih mendalam, maka PDRB Perkapita belum secara akurat dalam menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka tersebut merupakan angka rata-rata. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai PDRB perkapita (total nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pada tahun yang berkenaan).

Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Ini dapat dilihat dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Kinerja ekonomi daerah, dalam hal ini pendapatan perkapita, memiliki kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini cukup optimis dengan asumsi bahwa seluruh *stake holder* berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

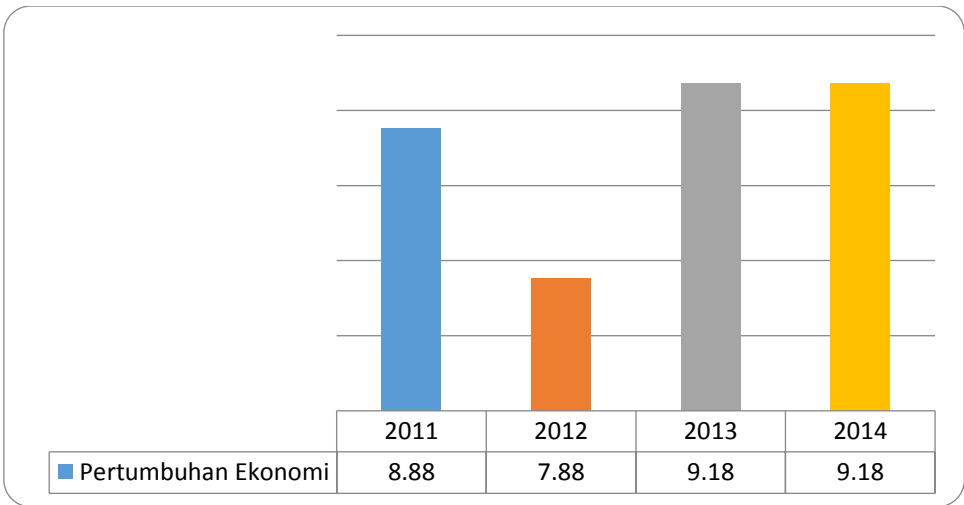
Grafik 2.5
PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 – 2014**
Harga Konstan 2010



(Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015)

Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi kabupaten kepulauan selayar selama beberapa tahun terakhir, dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 2.6
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 – 2014



Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka 2015

Tingkat pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat. Dimana PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah bruto per penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan nyata pendapatan perkapita.

Angka Perkapita Bruto (atas dasar harga konstan tahun 2010) penduduk Kepulauan Selayar Pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 15.856.290,00, tahun 2012 sebesar Rp.16.900.964,00, pada tahun 2013

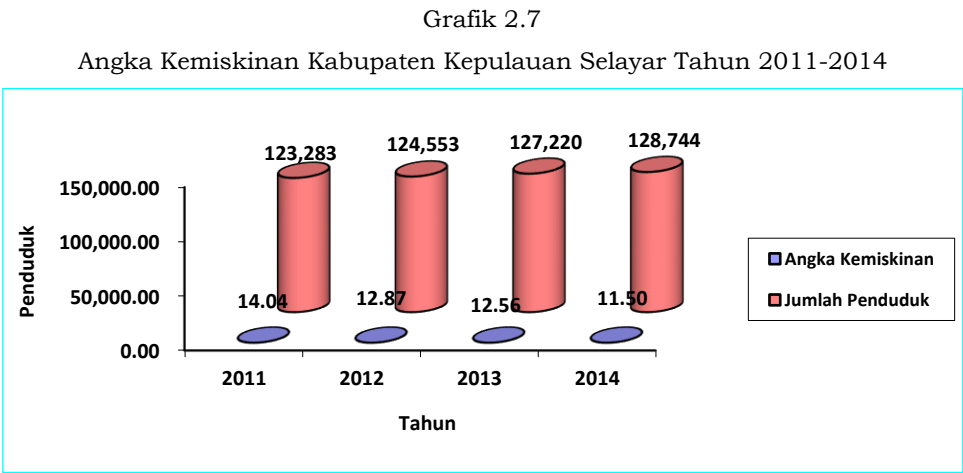
sebesar Rp.18.218.760,00. Sementara pada tahun 2014 PDRB perkapita sebesar Rp.19.656.456,00.

D. Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan

Angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin dapat memberikan gambaran umum kondisi pendapatan penduduk. Sehingga adanya perubahan terhadap angka kemiskinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan penduduk. Seiring dengan membaiknya perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar, maka angka kemiskinan juga memperlihatkan kecenderungan penurunan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2014, jumlah fakir miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar, mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 6.055 KK pada tahun 2013 menjadi 5.686 Kepala Keluarga pada tahun 2014.

Sedangkan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2014 diprediksikan menurun sampai pada angka 11,50%. Prediksi ini didasarkan pada trend penurunan pertahunnya serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya kuantitas dan kualitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir. Secara detail trend Angka Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar dan jumlah penduduk miskin 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini:



Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka In Figure 2014

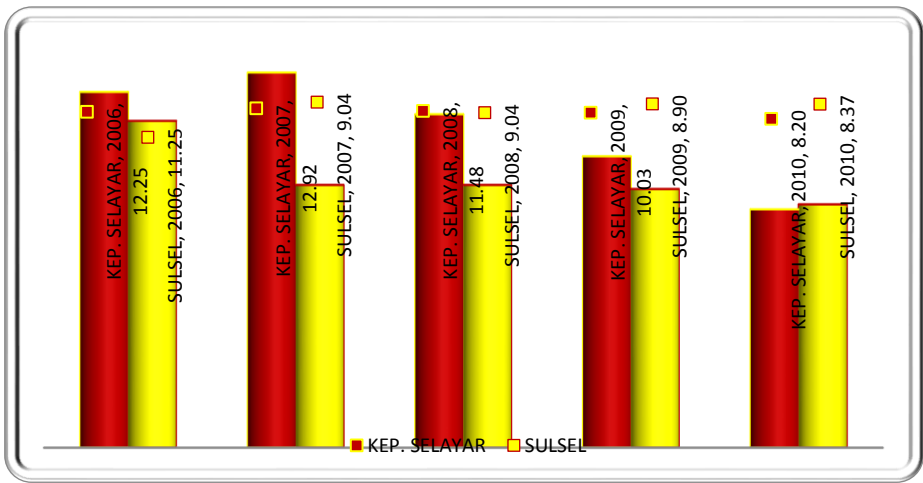
Tabel 2.18.
Jumlah Kepala Keluarga Miskin yang menerima raskin Tahun 2010 – 2014
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pasimarannu	828	828	1107	1059	1059
2	Pasilambena	686	686	976	934	934
3	Pasimasunggu	672	672	831	795	795
4	Taka Bonerate	831	831	1138	1089	1089
5	Pasimasunggu Timur	431	431	916	877	877
6	Bontosikuyu	994	994	982	940	940
7	Bontoharu	882	882	1033	989	989
8	Benteng	593	593	589	564	564
9	Bontomanai	664	664	654	626	626
10	Bontomatene	905	905	994	951	951
11	Buki	403	403	409	391	391
	Jumlah	7.889	7.889	9629	9215	9215

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

Selain Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran juga adalah sala satu indikator penting tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah. Angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 5 (lima) Tahun terakhir, bahkan pada tahun 2010 lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana digambarkan dalam grafik 2.5 di bawah ini:

Grafik 2.8
Angka Pengangguran Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2006-2010



Sumber :BPS 2011

E. Indeks Pembangunan Manusia

Hasil yang diperoleh, pada tahun 2010 indeks pembangunan manusiaKabupaten Kepulauan Selayar sebesar 62,15 dan pada tahun 2011, angkarsebut meningkat menjadi 62,53. Kinerja pembangunan manusia tersebuta tahun 2012, menjadi 62,87 hingga pada tahun 2013, indeksnya telahencapai 63,16, dan pada tahun 2014 indeksnya mencapai 63,66. Selama periode tahun 2010 hingga 2014, angka indeks pembangunan manusia telah mengalami peningkatan rata-rata per tahun

sebesar 0,45 (reduksi *short fall*). Fakta ini memberikan petunjuk bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat. Namun demikian selama periode tahun 2010 hingga 2014 angka IPM Kabupaten Kepulauan Selayar berada di bawah angka provinsi Sulawesi Selatan.

Table 2.19
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Indeks Pembangunan Manusia	62,15	62,53	62,87	63,16	63,66

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Selayar

Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM di suatu wilayah, tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi shortfall per tahun. Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal karena reduksi shortfall merupakan gambaran laju pergerakan IPM untuk mencapai nilai idealnya yaitu 100 (seratus). Dengan kata lain, reduksi shortfall menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal.

Perbandingan dengan beberapa kabupaten yang terletak berdekatan dengan kabupaten kepulauan selayar, seperti Kabupaten Bulukumba dan Bantaeng masih lebih rendah namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten Jeneponto, maka pola kebijakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum lebih mendorong meningkatnya pembangunan manusia.

Fakta tersebut diatas merupakan cerminan angka indeks pada 3 (tiga) komponen yang menjadi indikator pengukuran kinerja pembangunan manusia. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan masing-masing komponen tersebut, yaitu pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang ekonomi atau daya beli.

Kinerja pembangunan manusia seutuhnya tercermin dari seberapa besar Indeks Pembangunan Manusiadi sebuah daerah. Penetapan angka IPM ini dilakukan terhadap indikator pendidikan, indikator kesehatan dan kehidupan yang layak. Selama lima tahun terakhir, Angka-angka ini menunjukkan trend meningkat. menunjukkan bahwa kenaikan IPM

Kepulauan Selayar bergerak perlahan, namun optimisme untuk peningkatan secara signifikan sangat besar oleh karena konsentrasi pembiayaan oleh Pemda ke sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Pemberdayaan Ekonomi yang besar.

F. Angka Kriminalitas yang tertangani

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator penting keamanan suatu Daerah, bahkan dapat memberikan gambaran kesejahteraan secara sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten tersebut. Semakin rendah tingkat krimaniltas menunjukkan semakin kondusifnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Table 2.20
 Angka Kriminalitas yang tertangani
 Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kasus Narkoba	7	3	10	8	15
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	1	-	3	2	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	2	5	2	3	5
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	61	79	83	94	96
5.	Jumlah kasus Pencurian	35	73	64	74	58
6.	Jumlah kasus Penipuan	29	19	30	27	46
7.	Jumlah kasus Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	302	371	468	392	428
9.	Jumlah Penduduk	123.283	124.553	127.220	128.744	134.329
10.	Angka Kriminalitas yang tertangani	24,49	29,79	36,77	30,45	31,86

Sumber : DataPolres, Kepulauan Selayar

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu sapek yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas bagi pembangunan, dan juga sebagai salah satu pilar utama agar penduduk dapat memper – dayakan dirinya berpartisipasi dalam pembangunan. Pendidikan disini tidak di artikan hanya pendidikan formal saja, akan tetapi dalam arti luas, termasuk pendidikan berpolitik. Pendidikan politik tidak mesti diisolasikan dari yang lainnya, akan tetapi menjadi salah satu unsur pendidikan yang penting agar penduduk dapat secara partisipatif menentukan serta menikmati hasil pembangunan.Namun di sadari, indikator dasar tentang pendidikan politik sampai saat ini belum tersedia.

- **Angka Melek Huruf**

Perhitungan angka indeks ini terdiri dari dua unsur yaitu angka melek huruf dan rata – rata lama bersekolah.kedua unsur tersebut akan di jelaskan kemudian.keadaan tahun 2014, kondisi pendidikan kabupaten kepulauan selayar memperlihatkan tidak banyak berbeda dengan kondisi dua tahun yang lalu.Fakta tersebut di gambarkan oleh indeks pendidikan pada tahun 2010 sebesar 54,35 dan meningkat menjadi 54,89 pada tahu 2011, dan sedikit meningkat hingga tahun 2014 mencapai 56,96.Hal yang menggembirakan adalah bahwa kabupaten kepulauan selayar untuk indeks pendidikan mendapat peringkat 17 dari 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan.Akan Tetapi bila dilihat dengan indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan maka indeks pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar sedikit lebih rendah, dimana indeks pendidikan provinsi Sulawesi Selatan adalah 60,79.

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Bidang dan Indikator	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 Tahun yang bisa membaca dan menulis	5.541	5.722	5.958	6.164	6.430
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	6.098	6.296	6.484	6.634	6.842
3	Angka melek huruf	90,87	90,88	91,89	92,92	93,98

Sumber : DiknasKab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.22
Angka Melek Huruf Tahun 2015 menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Kecamatan Benteng	17.257	17.490	98,67
2	Kecamatan Bontoharu	9.092	9.327	97,48
3	Kecamatan Bontomanai	8.674	8.879	97,69
4	Kecamatan Bontomatene	8.311	9.138	90,95
5	Kecamatan Buki	4.361	4.464	97,69
6	Kecamatan Bontosikuyu	10.479	10.532	99,50
7	Kecamatan Pasimasunggu	5.446	5.798	93,93
8	Kecamatan Pastim	5.208	5.241	99,37
9	Kecamatan Pasimarannu	6.360	6.476	98,21
10	Kecamatan Takabonerate	8.809	9.411	93,60
11	Kecamatan Pasilambena	4.446	5.237	84,90
	Jumlah	88.443	91.993	96,14

- **Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Angka ini sangat berguna untuk memonitor tingkat pencapaian setiap Penduduk dalam kegiatan bersekolah. Interpretasinya, semakin tinggi angka tersebut maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk.

Di kabupaten Kepulauan Selayar, Keadaan rata-rata lama bersekolah penduduk tahun 2014 lebih baik daripada keadaan tahun 2010. Keadaan Tersebut digambarkan oleh rata-rata lama bersekolah, dimana pada Tahun 2010 rata-rata lama bersekolah penduduk 10 Tahun dan Meningkat menjadi 12 Tahun pada 2014. Dengan kata lain pada Tahun 2014, bahwa rata-rata penduduk yang berumur 15 Tahun keatas bersekolah sampai kelas satu SMP (Belum tamat). Angka ini telah melampaui standar apabila dibandingkan dengan angka Provinsi yang sebesar 8,21% Tahun pada 2014.

- **Angka partisipasi kasar**

Tabel 2.23
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Bidang dan Indikator	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	16890	17559	17835	17017	16363
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16213	17153	17153	17153	17153
1.3.	APK SD/MI	104,18	102,37	103,98	99,21	95,39
2	SMP/MTs					
2.1	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	5939	6128	6486	5648	6137
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5445	6137	6790	6242	6348
2.3	APK SMP/MTs	109,07	99,85	95,52	90,48	96,68
3	SMA/MA/SMK					
3.1	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	4147	4282	4399	4899	5668
3.2	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	2594	3146	4687	5657	5842
3.3	APK SMA/MA/SMK	159,87	136,11	93,86	86,60	97,02

Sumber : DiknasKab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Kasar menurut kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	jumlah penduduk usia 13-15 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/SMK	jumlah penduduk usia 16-18th	APK
1	Kec. Benteng	1.366	1229	105,32	1.441	1.155	124,76	2.398	1.080	222,04
2	Kec. Bontoharu	1.383	1244	105,25	590	636	92,77	362	630	57,46
3	Kec. Bontomanai	1.347	1212	105,32	438	612	71,57	167	555	30,09
4	Kec. Bontomatene	2099	1889	105,27	768	627	122,49	540	564	95,74
5	Kecamatan Buki	1014	913	105,30	64	307	20,85	73	281	25,98
6	Kec. Bontosikuyu	1853	1667	105,28	662	722	91,69	256	657	38,96
7	Kec. Pasimasunggu	1649	1484	105,30	433	393	110,18	177	360	49,17
8	Kec. Pastim	2544	2289	105,30	256	361	70,91	327	360	90,83
9	Kec. Pasimarannu	1444	1299	105,32	503	445	113,03	338	405	83,46
10	Kec. Takabonerate	599	539	105,27	485	637	76,14	216	582	37,11
11	Kec. Pasilambena	1359	1223	105,27	420	354	118,64	20	363	5,51
	Jumlah	16657	14988		6.060	6.249	96,98	4.874	5.837	83,50

Sumber : DiknasKab. Kepulauan Selayar

- Angka pendidikan yang ditamatkan

Tabel 2.25
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)
Tahun 2010 – 2014
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Bidang dan Indikator	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI	20	21	22	23	23
2	SMP/MTs	23	24	26	27	27
3	SMA/MA/SMK	30	31	32	34	34

Sumber : DiknasKab. Kepulauan Selayar

- Angka Partisipasi Murni

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Bidang dan Indikator	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	14535	15463	16578	16972	17083
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16213	17153	17153	17153	17153
1.3.	APM SD/MI	89,65	90,15	96,65	98,94	99,59

NO	Bidang dan Indikator	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	4290	4981	5892	4471	6137
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5445	6137	6790	6242	6348
2.3	APM SMP/MTs	78,79	81,16	86,77	71,63	96,68
3	SMA/MA/SMK					
3.1	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	3113	3892	3923	4051	5668
3.2	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	2594	3146	4687	5657	5842
3.3	APM SMA/MA/SMK	120,01	123,71	83,70	71,61	97,02

Sumber : DiknasKab. Kepulauan Selayar

Tabel.2.27
Angka Partisipasi Murni Tahun 2015 menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar

N O	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	jumlah siswa 16-18 th bersekolah di SMA/MA/SMK	jumlah penduduk usia 16-18th	APM
1	Kecamatan Benteng	2.289	2.416	94,74	967	1.155	83,72	1.077	1.080	99,72
2	Kec. Bontoharu	1.484	1.566	94,76	590	636	92,77	145	630	23,02
3	Kec. Bontomanai	1.299	1.371	94,75	413	612	67,48	83	555	14,95
4	Kec. Bontomate	1.223	1.291	94,73	623	627	99,36	230	569	40,42
5	Kecamatan Buki	539	569	94,73	62	307	20,20	31	281	11,03
6	Kec. Bontosikuyu	1.667	1.760	94,72	595	722	82,41	125	657	19,03
7	Kec. Pasimasunggu	1.212	1.279	94,76	398	393	101,27	60	360	16,67
8	Kec. Pastim	913	963	94,81	249	361	68,98	95	360	26,39
9	Kec. Pasimaranu	1.229	1.297	94,76	385	445	86,52	110	405	27,16
10	Kec. Takabonerate	1.889	1.994	94,73	478	637	75,04	75	582	12,89
11	Kec. Pasilambena	1.244	1.314	94,67	298	354	84,18	9	363	2,48
	Jumlah	14.988	15.820	94,7408	5.058	6.249	80,94	2.040	5.842	34,92

B. Kesehatan

Tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesehatan berupa derajat kesehatan masyarakat yang optimal ditandai dengan adanya; kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk; terselenggaranya upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, merata dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu derajat kesehatan yang optimal mengandung makna bahwa masyarakat mampu menikmati kesehatan secara bermakna sehingga dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya baik secara individu, keluarga dan masyarakat.

Upaya-upaya dibidang kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta. Pemerintah dan swasta dalam memberikan upaya-upaya pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan fasilitas kesehatan. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam usaha mencapai tujuan tersebut diatas, telah melakukan beberapa program antara lain memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada penduduk selayar sejak tanggal 1 Agustus 2006 (Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 146 Tahun 2006) berupa pembebasan biaya pelayanan kesehatan kelas tiga (kelas III) yang dilakukan pada unit-unit pelayanan seperti Puskesmas, Pustu, Polindes, dan Rumah sakit, peningkatan dan pengadaan serta rehabilitasi sarana kesehatan. Indikator yang menjadi pengukuran dalam hal ini adalah indeks harapan hidup seseorang sejak dilahirkan. Angka tersebut diharapkan dapat mencerminkan tingkat/derajat kesehatan penduduk, karena apabila seseorang mempunyai derajat kesehatan yang baik maka ia mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan orang yang derajat kesehatannya buruk.

Tabel 2.28.
 Perkembangan AKHB, Angka Usia Harapan Hidup, dan Persentase Gizi buruk
 Tahun 2010 – 2014
 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Bidang dan Indikator	Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	(1-23,18)	(1-21,48)	(1-20,77)	(1-15,78)	(1-25,00)
2.	Angka Usia Harapan Hidup	67,40	67,43	67,47	67,49	67,50
3.	Persentase balita gizi buruk	0,05	0,22	1,27	0,06	0,08

Sumber : Dinkes Kab. Kep. Selayar

- **Angka Kelangsungan Hidup Bayi**

Angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) di Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2009-2013 menunjukkan fluktuasi, dimana tahun 2009 AKB sebanyak 19,76 per 1.000 KH dan tahun 2010 naik menjadi 23,18 per 1.000 KH, tahun 2011 turun menjadi 21, 48 per 1.000 KH, Tahun 2012 turun lagi menjadi 20,77 per 1.000 KH, dan tahun 2013 turun lagi menjadi 15,78 per 1.000 KH. Jumlah seluruh kelahiran pada tahun 2013 sebanyak 1.984 orang dengan rincian yakni : (1) jumlah bayi lahir mati sebanyak 19 orang, (2) Kematian Neonatal 10 Orang, (3) Kematian Bayi 2 Orang dan (4) jumlah kelahiran hidup sebanyak 1.965 orang. Jumlah total kematian bayi selama tahun 2013 sebanyak 31 orang dengan rincian yakni: lahir mati 19 orang, kematian bayi 2 orang, dan kematian neonatal 10 orang. Adapun penyebab kematian bayi disebabkan karena : (1) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Karena berat bayi kurang dari 2.500 gram, (2) Asfiksia, (3) Infeksi atau pendarahan tali pusat, (4) dan kelainan lainnya.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga angka kesakitan dan kematian terutama kematian bayi dapat diturunkan sampai pada titik nol atau zero, maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengupayakan pembangunan sarana kesehatan seperti : Pustu, Polindes, dan poskesdes di setiap desa, bahkan ada desa yang memiliki 2 sampai 3 buah sarana kesehatan tersebut berdasarkan pertimbangan geografis dan wilayah pemerintahan terutama wilayah kepulauan dan daratan terpencil sesuai kriteria dan standard pelayanan. Disamping itu, dalam upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu bersalin maka pemerintah

Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengangkat pegawai kontrak tidak tetap daerah (PTT Daerah) dengan memprioritaskan perawat wanita dan ditambah dengan penempatan Bidan PTT pengangkatan pusat (langsung dari kementerian kesehatan RI) yang ditempatkan di Pustu, Polindes, dan Poskesdes Kepulauan dan daratan yang terpencil.

- **Angka Usia Harapan Hidup**

Angka harapan hidup telah mengalami peningkatan dari 67,40 tahun pada 2010 menjadi 67,50 tahun pada 2014. Angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan angka provinsi Sulawesi selatan yang sebesar 69,60 tahun pada keadaan 2014. Angka harapan hidup kabupaten kepulauan selayar meningkat rata-rata pertahun 0,24 Tahun.

- **Persentase Balita Gizi Buruk**

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten kepulauan selayar dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2010 Persentase balita gizi buruk sebesar 0,05%. Tahun 2011 meningkat menjadi 0,22 %, dan terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2012 yakni menjadi 1,27%. Kemudian pada tahun 2013 dan 2014 Persentase balita gizi buruk kembali menurun menjadi 0,06% di tahun 2013 dan 0,08% pada tahun 2014.

C. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang cukup mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup aspek ekonomi dan social. Aspek ekonomi pekerjaan terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, aspek social terkait dengan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan/eksistensi atas kemampuan dari individu baik pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu setiap upaya pembangunan selalu diarahkan tidak hanya pada perluasan lapangan kerja akan tetapi kemudahan dalam berusaha di semua sektor ekonomi sehingga penduduk tidak hanya terlibat tetapi juga dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan itu sendiri.

Perkembangan sektor ketenagakerjaan secara tidak langsung dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain keterlibatan penduduk dalam kegiatan

ekonomi dapat diukur dari besarnya penduduk yang memasuki pasar kerja.

- **Rasio Penduduk yang Bekerja**

Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2014, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2014 sebesar 54.958 orang. Jumlah yang bekerja sebanyak 53.778 orang dan pengangguran 1.180 orang. Jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 35.370 orang dengan rincian 8.405 orang sekolah, 22.001 orang mengurus rumah tangga dan lainnya sebanyak 5.324 orang. Sementara kondisi angkatan kerja tahun sebelumnya (tahun 2013) sebesar 52.947 orang terdiri dari jumlah yang bekerja sebanyak 50.501 orang dan pengangguran 2.446 orang. Jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 33.702 orang dengan rincian 6.789 orang sekolah, 22.832 orang mengurus rumah tangga dan lainnya sebanyak 4.081 orang.

Tabel 2.29
Distribusi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kegiatan Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Angkatan Kerja	56.886	54.791	53.814	52.947	54.958
a. Bekerja	52.223	52.226	52.064	50.501	53.778
b. Mencari pekerjaan	4.663	2.565	1.750	2.446	1.180
Bukan angkatan Kerja (jiwa)	27.116	29.339	31.991	33.702	35.730
a. Sekolah	6.129	4.052	8.641	6.789	8.405
b. Mengurus Rumah Tangga	16.671	20.749	18.817	22.832	22.001
c. Lainnya	4.313	4.578	4.533	4.081	5.324
Jumlah jiwa	84.002	84.170	85.805	86.649	90.688

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2015)

Tabel 2.30
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2014

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah
1.	Angkatan Kerja	54 958
	- Bekerja	53 778
	- Pengangguran	1 180
2	Bukan Angkatan Kerja	35 370
	- Sekolah	8 405
	- Mengurus RT	22 001
	- Lainnya	5 324
Jumlah		90 328

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2015)

Tabel 2.31
Rasio Penduduk yang bekerja Tahun 2010 – 2014
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Capaian Pembangunan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Penduduk yang bekerja	52.223	52.226	52.064	50.501	53.778
2.	Jumlah angkatan Kerja	56.886	54.791	53.814	52.947	54.958
3	Rasio penduduk yang bekerja	0,91	0,95	0,96	0,95	0,97

Sumber : Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2015)

8. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Data di bawah ini menunjukkan bahwa kinerja terhadap seni budaya dan olah raga di Kabupaten Kepulauan Selayar masih perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.32
Perkembangan Seni budaya dan Olah Raga Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah group kesenian / kebudayaan per 10.000 penduduk	5	5	5	6	6
2.	Jumlahgedung seni budaya/10.000 Penduduk	-	-	-	-	-
3	Jumlah klub olahraga	-	-	-	6	207
4	Jumlah gedung olahraga	2	2	3	3	3

Sumber : Disbudpar & Bagian Olah Raga SETDA Kepulauan Selayar

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib, dan fokus layanan urusan pilihan.

Secara umum data-data capaian kinerja menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kinerja secara signifikan di setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan Daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan,

kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,perangkat daerah, kepegawaian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

1. Pendidikan

Indikator keberhasilan pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana data yang akan disajikan berikutdalam kurun waktu lima Tahun terakhir sudah menunjukkan pencapaian yang signifikan, meskipun masih banyak capaian-capaian yang masih sangat perlu mendapat perhatian, antara lain mengenai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), masih tingginya Angka Putus Sekolah serta masih rendahnya persentase Guru yang memenuhi kualifikasi sarjana.

- Pendidikan dasar
- Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tabel 2.33
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	14443	14535	15463	16578	16972
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16213	16213	17153	17153	17153
1.3	APS SD/MI	890,83	896,50	901,47	966,48	989,45
2	SMP/MTs					
2.1	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	4306	4290	4981	5892	4471
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5039	5445	6137	6790	6242
2.3	APS SMP/MTs	855	788	812	868	716

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

Tabel 2.34
Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2015 menurut kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kec. Benteng	2.289	2.416	94,74	1.441	1.155	124,76
2	Kec. Bontoharu	1.484	1.566	94,76	590	636	92,77
3	Kec. Bontomanai	1.299	1.371	94,75	438	612	71,57

4	Kec. Bontomatene	1.223	1.291	94,73	768	627	122,49
5	Kecamatan Buki	539	569	94,73	64	307	20,85
6	Kec. Bontosikuyu	1.667	1.760	94,72	662	722	91,69
7	Kec. Pasimasunggu	1.212	1.279	94,76	433	393	110,18
8	Kec. Pastim	913	963	94,81	256	361	70,91
9	Kec. Pasimarannu	1.229	1.297	94,36	503	445	113,03
10	Kec. Takabonerate	1.889	1.994	94,73	485	637	76,14
11	Kec. Pasilambena	1.244	1.314	94,67	420	354	118,64
	Jumlah Total	14.988	15.820	94,74	6.060	6.249	96,98

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

- Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Tabel 2.35
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia Sekolah Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	153	153	153	153	154
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16213	17153	17153	17153	17153
1.3	Rasio	94,37	89,20	89,20	89,20	89,78
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	48	48	48	50	53
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	5445	6137	6790	6242	6348
2.3	Rasio	88	78	71	80	83

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

Tabel 2.36
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2015 menurut kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kec. Benteng	10	2.416	0,00	49	1.155	0,04
2	Kec. Bontoharu	17	1.566	0,01	26	636	0,04
3	Kec. Bontomanai	21	1.371	0,02	21	612	0,03
4	Kec. Bontomatene	17	1.291	0,01	34	627	0,05
5	Kecamatan Buki	14	569	0,02	6	307	0,02
6	Kec. Bontosikuyu	22	1.760	0,01	32	722	0,04
7	Kec. Pasimasunggu	9	1.279	0,01	21	393	0,05
8	Kec. Pastim	10	963	0,01	9	361	0,02
9	Kec. Pasimarannu	10	1.297	0,01	21	445	0,05
10	Kec. Takabonerate	13	1.994	0,01	22	637	0,03
11	Kec. Pasilambena	10	1.314	0,01	15	354	0,04
	Jumlah	153	15.820	0,01	256	6.249	0,04

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

- Rasio Guru/Murid

Tabel 2.37
Jumlah guru dan murid per jenjang pendidikan dasar Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1767	1886	1893	1858	1879
1.2	Jumlah Murid	16890	17559	17835	17017	16363
1.3	Rasio	104,62	107,41	106,14	109,18	114,83
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	575	754	773	799	827
2.2	Jumlah Murid	5939	6128	6486	5648	6137
2.3	Rasio	96,82	123,04	119,18	141,47	134,76

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

Tabel 2.38
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015 menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kec. Benteng	207	2.944	7,03	113	1.441	0,08
2	Kec. Bontoharu	206	1.649	0,12	59	590	0,10
3	Kec. Bontomanai	215	1.444	0,15	67	438	0,15
4	Kec. Bontomatene	237	1.359	0,17	81	768	0,11
5	Kecamatan Buki	118	599	0,20	12	64	0,19
6	Kec. Bontosikuyu	228	1.853	0,12	44	662	0,07
7	Kec. Pasimasunggu	130	1.347	0,10	31	433	0,07
8	Kec. Pastim	112	1.014	0,11	21	256	0,08
9	Kec. Pasimarannu	111	1.366	0,08	18	503	0,04
10	Kec. Takabonerate	132	2.099	0,06	31	485	0,06
11	Kec. Pasilambena	83	1.383	0,06	24	420	0,06
	Jumlah	1.179	17.057	0,10	501	6.060	0,08

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

- Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata

Tabel 2.39
Jumlah guru dan murid per kelas rata-rata Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru per kelas	918	918	918	918	924
1.2	Jumlah Murid	16890	17559	17835	17017	16363
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru per kelas	384	384	384	400	424
2.2	Jumlah Murid	5939	6128	6486	5648	6137
2.3	Rasio	57,03	54,97	53,53	58,15	59,91

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

- Pendidikan Menengah
- Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 2.40
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/MA/SMK					
	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	3113	3892	3923	4051	5668
1.1	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	2594	3146	4687	5657	5842
1.2	APS Pendidikan Menengah	1200	1237	837	716	970

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Tabel 2.41
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/MA/SMK					
1.1	Jumlah gedung sekolah	17	18	18	18	20
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	2594	3146	4687	5657	5842
1.3	Rasio	65,54	57,22	38,40	31,82	34,23

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

- Rasio guru terhadap murid

Tabel 2.42
Jumlah guru dan murid per jenjang pendidikan dasar Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/MA/SMK					
1.1	Jumlah Guru	370	427	464	299	302
1.2	Jumlah Murid	5939	6128	6486	5648	6137
1.3	Rasio	62,30	69,68	71,54	52,94	49,21

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

2.1.3.1.1.1. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Tabel 2.43
Jumlah guru dan murid per kelas rata-rata Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/MA/SMK					
1.1	Jumlah Guru Perkelas	170	180	180	180	200
1.2	Jumlah Murid	16890	17559	17835	17017	16363
1.3	Rasio	10,07	10,25	10,09	10,58	12,22

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

- Fasilitas Pendidikan

Tabel 2.44
Perkembangan Fasilitas Pendidikan Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.1	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	56	61	65	73	78
1.2	Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	64	64	64	68	71

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel 2.45
Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010 – 2014

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	PendidikanAnakUsiaDini (PAUD)	34,72	35,5	37,39	53,07	42,15
1.1	Siswa Jenjang TK/RA Penitipan Anak	4284	4261	4527	4714	4980
1.2	Jumlah anak Usia 4-6 Tahun	6495	6532	6758	6998	7150

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

- **Angka Putus Sekolah**

Tabel 2.46
Perkembangan Angka Putus Sekolah per jenjang Pendidikan Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,72	0,68	0,38	0,86	0,5
	Jumlah Siswa yang putus sekolah	122	120	68	146	82
	Jumlah Siswa SD/MI semuanya	16890	17559	17835	17017	16363
1.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,12	0,38	0,76	1,38	0,73
	Jumlah Siswa yang putus sekolah	7	23	49	78	45
	Jumlah SMP/MTs semuanya	5939	6128	6486	5648	6137
1.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,96	0,86	0,77	0,33	0,32
	Jumlah Siswa yang putus sekolah	40	37	34	16	18
	Jumlah SMA/MA/SMK semuanya	4147	4282	4399	4899	5668

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

- **Angka Kelulusan**

Tabel 2.47
Perkembangan Angka Kelulusan Tahun 2011-2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98	100	99	98	100
1.1	Jumlah Peserta Ujian	2118	2254	2385	2398	2576
1.2	Jumlah Siswa yang Lulus	2083	2254	2367	2350	2576
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah Peserta Ujian	1585	1634	1927	1905	1833
2.2	Jumlah Siswa yang Lulus	1584	1634	1927	1903	1833
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99	100	100	100	99
3.1	Jumlah Peserta Ujian	1087	1237	1271	1240	1363
3.2	Jumlah Siswa yang Lulus	1080	1237	1271	1232	1363

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

- **Angka melanjutkan pendidikan**

Tabel 2.48
Perkembangan Angka melanjutkan pendidikan Tahun 2011-2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	92,61	93,52	94,13	86,85	96
1.1	Jumlah Siswa baru Kelas 1 pada jenjang SMP/MTs	1929	2108	2228	2041	2478
1.2	Jumlah Siswa Lulusan SD/MI tahun Sebelumnya	2083	2254	2367	2350	2576
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93,3	94,86	94,91	102,79	100
2.1	Jumlah Siswa baru Kelas 1 pada jenjang SMA/MA/SMK	1478	1550	1829	1956	1833
2.2	Jumlah Siswa Lulusan SMP/MTs tahun Sebelumnya	1584	1634	1927	1903	1833

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

- **Kualifikasi Guru**

Tabel 2.49
Perkembangan Kualifikasi guru Tahun 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kualifikasi guru	2011	2012	2013	2014	2015
1	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	37,76	42,74	54,84	73,25	73,51

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

Tabel 2.50
Perkembangan Kualifikasi guru per jenjang pendidikan Tahun 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kualifikasi guru	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	17	21	42	67	68
1.1	Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D IV	296	396	798	1250	1286
1.2	Jumlah Guru SD/MI	1767	1886	1893	1858	1879
2	SMP/MTs	61	52	57	78	45
2.1	Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D IV	349	389	441	622	372
2.2	Jumlah Guru SMP/MTs	575	754	773	799	827
3	SMA/MA/SMK	40	37	38	99	44
3.1	Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D IV	149	159	175	297	132
3.2	Jumlah Guru SMA/MA/SMK	370	427	464	299	302

Sumber : Diknas Kepulauan Selayar

2. Kesehatan

Demikian halnya dengan kinerja di Bidang Kesehatan, terjadi peningkatan kinerja dari tahun ke tahun selama tahun 2011-2015, walaupun jika dibandingkan dengan standar yang ada (Nasional maupun Provinsi), masih ada beberapa capaian yang rendah.

Dapat diketahui bahwa pencapaian penyelenggaraan Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan indikator pokok, dapat dikatakan cukup baik. Pada tahun 2015 Angka Kematian Bayi hanya 1,05 per 1.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Ibu Melahirkan juga cukup rendah yakni hanya 108,7 per 100.000 Kelahiran Hidup, demikian halnya penderita TB hanya 156 per 100.000 penduduk. Diketahui hanya ada 2 indikator yang belum mencapai target (Nasional), yakni Cakupan Desa UCI dan Umur Harapan Hidup. Namun demikian keduanya sudah sangat mendekati target nasional, yakni bahwa cakupan Desa UCI sudah mencapai 74,8% (target 80%), kemudian Umur Harapan Hidup sudah mencapai 69,9 (target 70,7).

Tabel 2.51
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kesehatan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011– 2015

No.	Bidang dan Indikator Kesehatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio posyandu per satuan balita	25,03	25,31	29,69	28,76	29,78
2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	64,08	63,43	65,25	62,12	66,99
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,60	0,59	0,61	0,61	0,65
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4
6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85,54	88,89	92,03	86,66	87,28
8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	71,60	72,72	76,14	78,41	78,41
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	68	58	69	58	53
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0	0	100	0	100
12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	92,58	94,10	69,21	73,05	100
13	Cakupan kunjungan bayi	87,90	83,71	90,86	89,81	95,53
14	Cakupan Puskesmas	118	127	127	127	127
15	Pemanfaatan pembantu puskesmas (%)	75,30	68,18	72,72	72,72	80,68

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Rasio Pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita**

Tabel 2.52
Perkembangan Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah posyandu	275	274	275	287	287
2.	Jumlah balita	10.984	10.826	9.263	9.979	9.638
3.	Rasio	25,03	25,31	29,69	28,76	29,78

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Rasio Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan**

Tabel 2.53
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kec. Benteng	21	2.496	118,86
2	Kec. Bontoharu	25	778	31,12
3	Kec. Bontomanai	37	958	25,89
4	Kec. Bontomatene	34	858	25,24
5	Kecamatan Buki	23	477	20,74
6	Kec. Bontosikuyu	47	915	19,47
7	Kec. Pasimasunggu	20	783	39,15

8	Kec. Pastim	20	414	20,70
9	Kec. Pasimarannu	17	776	45,65
10	Kec. Takabonerate	26	637	24,50
11	Kec. Pasilambena	17	546	32,12
	Jumlah	287	9.638	29,78

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Puskesmas, Poliklinik, dan puskesmas Pembantu (Pustu)**

Tabel 2.54
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Puskesmas	13	14	14	14	14
2.	Jumlah Poliklinik	0	0	0	0	2
3.	Jumlah Pustu	61	60	64	64	71
4.	Jumlah Penduduk	123.283	124.553	127.200	128.744	134.329
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,105	0,112	0,110	0,108	0,108
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	-	-	-	-	0,015
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,49	0,48	0,50	0,49	0,53
8	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu persatuan penduduk	0,6	0.59	0,61	0,61	0,65

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

Tabel 2.55
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan PustuMenurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
1	Kec. Benteng	24.036	1	0,004	2	0,0083	0	-
2	Kec. Bontoharu	14.339	1	0,007	-	-	8	0,056
3	Kec. Bontomanai	14.048	2	0,014	-	-	10	0,071
4	Kec. Bontomatene	13.954	2	0,014	-	-	8	0,057
5	Kecamatan Buki	6.559	1	0,015	-	-	5	0,076
6	Kec. Bontosikuyu	15.449	2	0,013	-	-	11	0,071
7	Kec. Pasimasunggu	8.664	1	0,012	-	-	5	0,058
8	Kec. Pastim	7.421	1	0,013	-	-	5	0,067
9	Kec. Pasimarannu	9.929	1	0,010	-	-	7	0,071
10	Kec. Takabonerate	12.557	1	0,008	-	-	8	0,064
11	Kec. Pasilambena	7.373	1	0,014	-	-	4	0,054
	Jumlah	134.329	14	0,010	-	-	71	0,053

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Rasio Rumah sakit per satuan penduduk**

Tabel 2.56
Jumlah dan Rasio Rumah sakit per jumlah penduduk 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	123.283	124.553	127.200	128.744	134.329
3	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Rasio dokter per satuan penduduk**

Tabel 2.57
Jumlah dan Rasio Jumlah Dokter per jumlah pendudukTahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Dokter	33	32	29	26	29
2	Jumlah Penduduk	123.283	124.553	127.200	128.744	134.329
3	Rasio	0,27	0,26	0,23	0,20	0,22

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

Tabel 2.58
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kec. Benteng	24.036	2	0,01
2	Kec. Bontoharu	14.339	21	0,15
3	Kec. Bontomanai	14.048	2	0,01
4	Kec. Bontomatene	13.954	2	0,01
5	Kecamatan Buki	6.559	1	0,02
6	Kec. Bontosikuyu	15.449	1	0,01
7	Kec. Pasimasunggu	8.664	0	-
8	Kec. Pastim	7.421	0	-
9	Kec. Pasimarannu	9.929	0	-
10	Kec. Takabonerate	12.557	0	-
11	Kec. Pasilambena	7.373	0	-
	Jumlah	134.329	29	0,22

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk**

Tabel 2.59
Perkembangan Jumlah Tenaga Medis Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Tenaga Medis	210	190	195	188	194
2	Jumlah Penduduk	123.283	124.553	127.200	128.744	134.329
3	Rasio	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

Tabel 2.60
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kec. Benteng	24.036	17	0,07
2	Kec. Bontoharu	14.339	65	0,45
3	Kec. Bontomanai	14.048	19	0,14

4	Kec. Bontomatene	13.954	24	0,17
5	Kecamatan Buki	6.559	8	0,12
6	Kec. Bontosikuyu	15.449	13	0,08
7	Kec. Pasimasunggu	8.664	8	0,09
8	Kec. Pastim	7.421	12	0,16
9	Kec. Pasimarannu	9.929	7	0,07
10	Kec. Takabonerate	12.557	12	0,10
11	Kec. Pasilambena	7.373	8	0,11
	Jumlah	134.329	193	1,4

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani**

Tabel 2.61
Perkembangan Komplikasi kebidanan yang ditangani 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilker pada kurunwaktu tertentu	129	342	300	258	318
2	Jumlah ibu dengan komplikasi disuatu wilker padakurun waktu yang sama	129	342	300	258	318
3	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**

Tabel 2.62
Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Persalinan yang ditolong oleh nakes di Satu wilker pada kurun waktu tertentu	1863	1936	1906	1813	1921
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di wilker dalam kurun waktu yang sama	2178	2178	2072	2092	2201
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85,54	88,89	91,99	86,66	87,28

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Tabel 2.63
Perkembangan Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	58	64	67	69	69
2	Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan	81	88	88	88	88
3	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	71,60	72,72	76,14	78,41	78,41

Sumber : Dinkes Kab. Kep. Selayar

- **Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan**

Tabel 2.64
Perkembangan Balita Gizi Buruk Tahun 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kes. Di wilker pada kurun waktu tertentu	3	11	7	8	5
2	Jumlah Seluruh balita Gizi Buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	3	11	7	8	5
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**

Tabel 2.65
Perkembangan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC/BTA Tahun 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilker selama 1 tahun	175	148	180	151	138
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	256	256	261	261	261
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	68	58	69	58	53

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**

Tabel 2.66
Perkembangan Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilker selama 1 tahun	0	0	1	0	3
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	0	0	1	0	3
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0	0	100	0	100

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**

Tabel 2.67
Perkembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1	32.360	32.893	24.191	126.879	108.398
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin di kabupaten	34.953	34.953	34.953	51.658	51.658
3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	92,58	94,10	69,21	73,05	100

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Cakupan kunjungan bayi**

Tabel 2.68
Perkembangan Kunjungan Bayi Tahun 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. Sesuai standar di satu wilker pada kurun waktu tertentu	1823	1737	1790	1790	2009
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	2074	2075	1970	1993	2103
3	Cakupan kunjungan bayi	87,90	83,71	90,86	89,81	95,53

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Cakupan Puskesmas**

Tabel 2.69
Perkembangan Cakupan Puskesmas Tahun 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Puskesmas	13	14	14	14	14
2	Jumlah seluruh kecamatan	11	11	11	11	11
3	Cakupan puskesmas	118	127	127	127	127

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

- **Pemanfaatan pembantu puskesmas (%)**

Tabel 2.70
Perkembangan Cakupa Puskesmas Pembantu Tahun 2011 – 2015
Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah puskesmas pembantu	61	60	64	64	71
2	Jumlah seluruh Desa/Kelurahan	81	88	88	88	88
3	Cakupan pembantu puskesmas	75,30	68,18	72,72	72,72	80,68

Sumber : Dinkes Kepulauan Selayar

3. Pekerjaan Umum

Selanjutnya untuk mendukung kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya antara lain membangun prasarana angkutan darat yaitu jalan yang berfungsi bagi kelancaran aksesibilitas atau mobilisasi penduduk serta mendukung kelancaran distribusi barang dari dan ke daerah. Berdasarkan data yang ada, kelas jalan di kabupaten Kepulauan Selayar termasuk dalam kelas jalan III B, dan sesuai dengan status administrasi jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga 2013 keseluruhan panjang jalan mencapai 1.141,76 Km, terdiri dari jalan provinsi sepanjang 106,70 Km yang sejak tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 631/KPTS/M/2009 telah berubah status menjadi Jalan Nasional, mencakup Pamata – Benteng dalam kondisi baik, kemudian ruas Benteng-Appatanah yang sementara ini dalam tahap penyelesaian pekerjaan, kemudian jalan kabupaten sepanjang 689,49 Km, serta jalan desa sepanjang 345,57 Km.

Kemudian berdasarkan jenis permukaan jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2013, jalan yang diaspal sepanjang 433,72 kilometer, jalan kerikil sepanjang 69,00 Km serta jalan tanah sepanjang 186,77 Km. Sedangkan berdasarkan kondisi jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam kondisi baik sepanjang 255,57 Km, dalam kondisi sedang sepanjang 155,75 Km, dalam kondisi rusak sepanjang 128,77 Km serta dalam kondisi rusak berat sepanjang 149,40 Km.

Mengenai persentase rasio jaringan irigasi, prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi sampai akhir tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 7,42 persen, yang terdata sebanyak 27 daerah irigasi (DI) dan sebagai irigasi desa kategori irigasi semi teknis dengan luas daerah potensial sebanyak 4.280 Ha dan luas daerah fungsional sebanyak 2.415 Ha. Pengembangan pengelolaan sumber daya air (SDA) untuk irigasi dan air bersih kedepan sangat perlu untuk dikembangkan, disebabkan semakin menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air akibat penebangan liar, penambangan galian golongan C dan juga pola pertanian yang berpindah-pindah oleh masyarakat yang mengakibatkan gundulnya hulu sungai dan tergerusnya daerah aliran sungai (DAS). Aktivitas pertanian masyarakat di pulau Jampea sering mengalami gagal panen hingga belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat, walaupun pada pulau tersebut telah ada beberapa daerah irigasi dengan kategori irigasi desa (semi teknis) yang kondisi fisiknya belum memadai untuk mengairi areal persawahan yang ada. Demikian pula kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari gugusan kepulauan yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani-nelayan yang masih memakai pola pertanian berpindah-pindah yang menyebabkan tingginya kerawanan akan bencana terutama longsornya pinggir sungai akibat banjir, abrasi pantai dan pendangkalan sedimen pada muara intrusi air laut ke darat yang dapat mengancam permukiman penduduk pesisir pantai, berkurangnya sumber air tanah/tawar maupun kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.

Tabel 2.71
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0	0	0,37	0,40	0,46
2	Rasio Jaringan Irigasi	0	0	0	0	41,35
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	43,80	49,64	54,65	57,20	60,06
4	Luas tempat pemakaman umum (m2) per satuan penduduk	150,16%	148,46%	145,27%	145,39%	145,39%
5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	5,76%	5,62%	5,43%	5,29%	5,29%
6	Rasio rumah layak huni	60,34%	62,50%	65,50%	70,55%	74,77%
7	Rasio pemukiman layak huni	55%	61%	63%	72%	75%
8	Panjang jalan dilalui Roda 4	532,69	540,49	550,01	553,49	548,81
9	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	0	0	0	0	402,69
10	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM /Jam)	369,57	381,77	400,81	276,64	317,44
11	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	14.417,74	14.417,74	14.417,74	14.417,74	14.417,74
12	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	59,80	61,43	65,40	68,60	72,03
13	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	1.460	1.957	4.833	11.964	16.364
14	Persentase luas irigasi Kabupaten dalam kondisibaik	47,20	47,57	47,87	51,91	54,73

Tabel 2.72
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kondisi Baik			255,57	276,64	317,44
2.	Kondisi Sedang Rusak			155,75	61,74	95,20
3.	Kondisi Rusak			128,77	159,88	140,85
4.	Kondisi Rusak Berat			149,40	191,23	136,00
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)			689,49	689,49	689,49

Sumber : Data PU, Kepulauan Selayar

Tabel 2.73
 Panjang Jaringan Jalan (km) Berdasarkan Kondisi
 Menurut Kecamatan tahun 2015
 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Kondisi Baik	Kondisi Sedang Rusak	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat	Jalan secara keseluruhan
1	Kecamatan Benteng	30,77	-	-	-	30,77
2	Kecamatan Bontoharu	30,30	11,20	11,30	38,30	91,10
3	Kecamatan Bontomanai	54,92	28,30	40,80	30,50	154,52
4	Kecamatan Bontomatene	68,80	5,40	18,00	5,80	98,00
5	Kecamatan Buki	38,00	6,90	7,60	8,30	60,80
6	Kecamatan Bontosikuyu	40,20	14,70	36,90	26,70	118,50
7	Kecamatan Pasimasunggu	11,00	0,60	24,40	-	36,00
8	Kecamatan Pastim	22,10	9,50	0,20	4,20	36,00
9	Kecamatan Pasimarannu	8,40	13,30	0,40	21,20	43,30
10	Kecamatan Takabonerate	10,80	1,50	0,20	-	12,50
11	Kecamatan Pasilambena	2,15	3,80	1,05	1,00	8,00
	Jumlah	317,44	95,20	140,85	136,00	689,49

Sumber : Data PU, Kepulauan Selayar

Rasio Jaringan Irigasi

Tabel 2.74
 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 s.d 2015
 Kabupaten Kepulauan selayar

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jaringan primer	-	-	-	-	47.953,0
2.	Jaringan Sekunder	-	-	-	-	3.315,50
3.	Jaringan Tersier	-	-	-	-	-
4.	Luas lahan budidaya	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778
5.	Rasio	-	-	-	-	41,35

Sumber : Data PU, Kepulauan Selayar

Tabel 2.75
Rasio Jaringan Irigasimenurut Kecamatan tahun 2015
KabupatenKepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas lahan budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan Benteng	-	-	-	-	-	-
2	Kecamatan Bontoharu	2.180	-	-	2.180	350,00	6,23
3	Kecamatan Bontomanai	133	-	-	133	70,00	1,90
4	Kecamatan Bontomatene	-	-	-	-	-	-
5	Kecamatan Buki	-	-	-	-	-	-
6	Kecamatan Bontosikuyu	298	-	-	298	250,00	1,9
7	Kecamatan Pasimasunggu	27.285	2.778	-	30.062	2.026,50	4,83
8	Kecamatan Pastim	18,058	538	-	18.596	1.081,50	7,19
9	Kecamatan Pasimarannu	-	-	-	-	-	-
10	Kecamatan Takabonerate	-	-	-	-	-	-
11	Kecamatan Pasilambena	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	47.953,50	3.315,50	-	51..269,00	3.778,00	41,35

Sumber : Data PU, Kepulauan Selayar

Tabel 2.76
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Tahun 2011 s.d 2012
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Pasokan Irigasi	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pasok Irigasi per Area	-	-	-	-	3,59
2.	Pasok Irigasi Relatif	-	-	-	-	1,29
3.	Pasok Air Relatif	-	-	-	-	0,65
4.	Indek Luas Areal	-	-	-	-	50,43
5.	Rancangan Luas Areal	3778	3778	3778	3778	3778

Sumber : Data PU, Kepulauan Selayar

Tabel 2. 77
Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi
Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber : Data PU, Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan Terairi (Ha)	Kebutuhan Air Tanaman (Ha)	Pasok Air Irigasi (lt/ dtk)	Pasok Air Irigasi Total (lt/ dtk)	Total Pasok Air (lt/ dtk)	PIA (lt/ dtk/ha)	PIR (lt/ dtk/ha)	PAR (lt/ dtk/ha)	IA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/4	10=7/5	11=8/5	12=4/3
1.	Kec. Benteng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kec. Bontoharu	350,0	135	1.256,50	848,65	1.579,20	609,12	3,59	1,26	0,48	39
3.	Kec. Bontomanai	70,00	10	251,30	35,9	315,84	45,12	3,59	1,26	0,18	14
4	Kec. Bontomatene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kecamatan Buki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Bontosikuyu	250,0	15	897,50	53,85	1196,00	71,76	3,59	1,33	0,08	6
7	Kec. Pasimasunggu	2.026,50	2001,50	7.275,14	7.185,385	9694,78	9575,18	3,59	1,33	1,32	99
8	Kec. Pastim	1.0881,50	1022,05	3.882,59	3669,1595	4879,73	4611,47	3,59	1,26	1,19	95
9	Kec. Pasimarannu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kec. Takabonerate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kec. Pasilambena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.778,00	1.022,05	13.563,02	11.428,94	17.665,54	14.912,64	3,59	1,29	0,65	50,43

4. Perumahan

Tabel 2.78
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rumah tangga pengguna air bersih	35,8	37,04	38,28	44,37	54,07
2	Rumah tangga pengguna listrik	47,28	51,51	58,72	62,76	63,34
3	Rumah tangga bersanitasi	43,80	49,64	54,65	57,20	60,06
4	Lingkungan pemukiman kumuh	1:65	1:60	1:59	1:59	-
5	Rumah layak huni	60,34%	62,50%	65,50%	70,55%	74,77%

Tabel 2. 79
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Sumber Air Bersih	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Leding (Perpipaan)	11,65	12,86	14,88	17,52	35,67
2.	Sumur Lindung	11,15	12,25	15,29	18,62	21,54
3.	Sumur Tidak Terlindung	25,21	28,24	30,86	33,56	36,56
4.	Mata Air Terlindung	16,52	17,36	18,39	20,43	30,97
5.	Mata Air Tidak Terlindung	0	0	0	0	0
6.	Sungai	0	0	0	0	0
7.	Danau/Waduk	0	0	0	0	0
8.	Air Hujan	0,6	0,61	1,96	1,93	1,93
9.	Air Kemasan	0	0	0	0	0
10.	Lainnya	0	0	0	0	0
11.	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	14.852	15.732	16.843	19.523	23.859
12.	Jumlah Rumah Tangga	41.483	42.476	44.005	44.005	44.126
13.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12)	35,8	37,04	38,28	44,37	54,07

Sumber : Data Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2. 80

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	RT dengan daya 450 watt	4.551	5.112	5.046	5.761	5.699
2.	RT dengan daya 900 watt	6.432	7.518	9.075	10.260	10.727
3.	RT dengan daya 1.300 watt	1.253	1.478	1.722	1.773	1.888
4.	RT dengan daya 2.200 watt	235	494	601	316	680
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	149	154	194	556	237
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	14.631	16.768	16.638	18.666	19.231
7.	Jumlah Rumah Tangga	29.186	29.186	29.186	29.186	29.186
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)	47,28	51,51	58,72	62,76	63,34

Sumber : Data Dinas Energi Dan umber Daya Mineral Kab. Kepulauan Selayar

5. Penataan Ruang

Tabel 2.81
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	12,97%	12,97%	12,97%	12,97%	12,97%
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	99,45%	100%	100%	72%	60,87%

6. Perencanaan Pembangunan

Tabel 2.82
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	75%	75%	80%	80%	

Sumber : Data Bappeda Kab. Kepulauan Selayar

7. Perhubungan

Tabel 2.83
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	29.648	22.597	6.084	26.968	76.266
2	Rasio ijin trayek	0,083	0,093	0,093	0,095	0,096
3	Jumlah uji kir angkutan umum	109	121	130	142	150
4	Jumlah pelabuhan laut/Udara/Terminal Bis	1/2/1/1	7/2/1/1	7/2/1/1	7/2/1/1	7/2/1/1
5	Angkutan darat	8.297	10.037	11.432	13.374	15.070
6	Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	270	181	210	222	152
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
9	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang (pemasangan rambu-rambu)	117	147	212	336	551

Sumber : Data Dishubkominfo Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.84
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penumpang Bis				6.235	54.378
2.	Jumlah penumpang Kereta api					
3.	Jumlah penumpang Kapal laut	26.477	16.537		4.523	2.769
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara	3.171	6.060	6.084	16.210	19.119
5.	Total Jumlah Penumpang	29.648	22.597	6.084	26.968	76.266

Sumber : Data Dishubkominfo Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2. 85
Rasio Ijin TrayekTahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Izin Trayek perkotaan					
2.	Izin Trayek perdesaan	107	108	110	110	113
3.	Jumlah Izin Trayek	102	115	116	120	124
4.	Jumlah penduduk	123.125	124.206	124.853	126.085	128.744
5.	Rasio Izin Trayek	0,828	0,0925	0,0929	0,0931	0,0963

Sumber : Data Dishubkominfo Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2. 86
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Angkutan Umum	2011			2012			2013			2014			2015		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1.	Mobil penumpang umum	160	47	29,37	163	43	26,38	173	55	31,43	175	59	33,71	81	29	35,80
2.	Mobil bus	20	8	40	17	3	17,65	18	2	11,11	15	4	26,67	10	-	-
3.	Mobil barang	329	215	65,35	337	127	37,69	353	141	39,94	374	157	41,98	276	128	46,38
4.	Kereta gandengan															
5.	Kereta tempelan															
6.	Kendaraan Khusus (Ambulance, Tangki, Pemadam, dll)	25	7	28	20	9	45	17	12	70,59	17	8	47,06	10	6	60
	Jumlah															

Sumber : Data Dishubkominfo Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2. 87
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah pelabuhan laut	1	7	7	7	7
2.	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1
3.	Jumlah terminal bis	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Pelabuhan Ferry	2	2	2	2	2
	Jumlah	5	11	11	11	11

Sumber : Data Dishubkominfo Kab. Kepulauan Selayar

8. Lingkungan Hidup

Tabel 2.88
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase penanganan sampah	98,40	99,61	98,77	99,95	97,50
2	Persentase penduduk berakses air minum	22,88	11,73	13,32	16,37	60,09
3	Persentase luas permukiman yang tertata					
4	Pencemaran status mutu air	70,00	72,85	73,53	75,50	78,00
5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	0,84	196	2,94	2,36	25,43
6	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	80	43	3,4	3,7	3,9
7	Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	0,29	0,89	0,87	0,85	1,03
8	Penegakan hukum lingkungan	100	33	100	100	100

Tabel 2. 89
 Persentase Penanganan sampah
 Tahun 2011 s.d 2015
 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah sampah yang ditangani	61,13	59,4975	58,735	62,335	58,59
2.	Jumlah volume produksi sampah	62,12	59,7275	59,465	62,360	60,09
3.	Persentase	98,40	99,61	98,77	99,95	97,50

Sumber : Data Badan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2. 90
 Jumlah Volume Sampah dan Produksi SampahMenurut Kecamatan Tahun 2015
 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kecamatan Benteng	60,09	58,59	97,50
2	Kecamatan Bontoharu	-	-	-
3	Kecamatan Bontomanai	-	-	-
4	Kecamatan Bontomatene	-	-	-
5	Kecamatan Buki	-	-	-
6	Kecamatan Bontosikuyu	-	-	-
7	Kecamatan Pasimasunggu	-	-	-
8	Kecamatan Pastim	-	-	-
9	Kecamatan Pasimarannu	-	-	-
10	Kecamatan Takabonerate	-	-	-
11	Kecamatan Pasilambena	-	-	-
	Jumlah	60,09	58,59	97,50

Sumber : Data Badan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2. 91
 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan
 Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk
 Tahun 2011 s.d 2015
 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	31.089	14.471	17.999	21.881	80.720
2.	Jumlah penduduk	135.858	123.283	135.052	133.622	134.329
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	22,88	11,73	13,32	16,37	60,09

Sumber : Data Badan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2. 92
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum
dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Kecamatan Benteng	24.036	22.730	94,56648361
2	Kecamatan Bontoharu	14.339	3.320	23,15363693
3	Kecamatan Bontomanai	14.048	6.869	48,89664009
4	Kecamatan Bontomatene	13.954	10.735	76,93134585
5	Kecamatan Buki	6.559	4.288	65,37581948
6	Kecamatan Bontosikuyu	15.449	13.837	89,56566768
7	Kecamatan Pasimasunggu	8.664	4.046	46,6989843
8	Kecamatan Pastim	7.421	4.497	60,59630212
9	Kecamatan Pasimarannu	9.929	2.897	29,17715782
10	Kecamatan Takabonerate	12.557	5.668	45,13816995
11	Kecamatan Pasilambena	7.373	1.833	24,86077925
	Jumlah	134.329	8.720	60,09126845

Sumber : Data Badan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar

9. Kependudukan dan pencatatan sipil

Tabel 2.93
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,98	0,80	0,83	0,84	0,87
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,36	0,76	0,89	0,69	0,83
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,50	0,50	0,50	0,52	0,50
4	Kepemilikan KTP (%)	98	80	83	84	87
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	30	32,7	33,8	36,4	39,3
6	Rasio Pasangan berakta nikah	0,50	0,50	0,50	0,52	0,50
6	Ketersediaan database kependudukann skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Disdukcapil Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.94
Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP	86.173	73.246	77.135	77.665	80.041
2	Jumlah penduduk usia >17 tahun atau yang sudah menikah	87.739	91.101	93.057	92.865	92.358
3	Rasio	0,98	0,80	0,83	0,84	0,87

Sumber : Disdukcapil Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.95
Rasio Bayi ber akte kelahiran Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah bayi ber akte kelahiran	587	1.240	1.165	800	874
2	Jumlah keseluruhan bayi lahir	1.645	1.636	1.304	1.156	1.059
3	Rasio	0,36	0,76	0,89	0,69	0,83

Sumber : Disdukcapil Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.96
Perkembangan kepemilikan KTP Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk yang memiliki KTP	86,173	73.246	77.135	77.665	80.041
2	Jumlah penduduk wajib KTP/sudah menikah/pernah menikah	87.739	91.101	93.057	92.865	92.358
3	Persentase	98	80	83	84	87

Sumber : Disdukcapil Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.97
Perkembangan kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	38.585	42.669	45.006	48.638	52.791
2	Jumlah Penduduk	128.615	130.486	133.154	133.622	134.329
3	Persentase	30	32,7	33,8	36,4	39,3

Sumber : Disdukcapil Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.98
Rasio Pasangan Ber akta Nikah Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah pasangan berakta nikah	14.997	15.042	15.267	15.696	15.579
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	29.796	30.007	30.475	30.461	31.203
3	Rasio	0,50	0,50	0,50	0,52	0,50

Sumber : Disdukcapil Kab. Kepulauan Selayar

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa kinerja pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Keluarga Berencana, masih perlu terus ditingkatkan. Khusus dalam hal perlindungan anak, perlu peningkatan pembinaan kelompok anak dan pelibatan kelompok anak dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan. Dalam bidang KB, masalahnya adalah masih tingginya persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Tabel 2.99
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	12,71	12,99	14,66	12,72	12,85
2	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	27,51	36,99	36,83	29,72	31,47
3	Rasio KDRT	0,07	0,03	0,03	0,05	0,24
4	Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur	20,30	19,06	18,60	24,54	24,50
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	48,15	47,49	41,59	43,57	43,48
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	0,45	0,38	0,36	0,01	0,07

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2. 100
 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
 Tahun 2011 s.d 2015
 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	1	1	-	-	-
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	32	29	34	39	40
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	165	189	191	209	195
4	Pekerja perempuan di pemerintah	244	2509	2472	2347	2568
5	Jumlah pekerja perempuan	19207	19305	16.866	18.433	19.970
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	12,71	12,99	14,66	12,72	12,85

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.101
 Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2015
 Menurut Kecamatan

NO	Kecamatan	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah pekerja perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah
1	Kecamatan Benteng	1.299	4.785	27,14
2	Kec. Bontoharu	219	1.972	11,10
3	Kec. Bontomanai	199	2.704	7,359
4	Kec. Bontomatene	245	2265	10,81
5	Kecamatan Buki	86	1025	8,390
6	Kec. Bontosikuyu	174	2068	8,413
7	Kec. Pasimasunggu	97	1218	7,963
8	Kec. Pastim	64	1031	6,207
9	Kec. Pasimarannu	56	1311	4,271
10	Kec. Takabonerate	86	1074	8,007
11	Kec. Pasilambena	43	517	8,317
	Jumlah	2.568	19.970	12,859

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.102
 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
 Tahun 2011 s.d 2015
 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	5284	7142	62,13	54,85	62,85
2	Jumlah pekerja perempuan	19207	19305	16,866	18.453	19.970
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	27,51	36,99	36,83	29,72	31,47

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.103
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2015
Menurut Kecamatan

NO	Kecamatan	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	Jumlah pekerja perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kecamatan Benteng	2495	4785	52,14
2	Kec. Bontoharu	331	1972	16,78
3	Kec. Bontomanai	401	2704	14,83
4	Kec. Bontomatene	589	2265	26,00
5	Kecamatan Buki	234	1025	22,83
6	Kec. Bontosikuyu	285	2068	13,78
7	Kec. Pasimasunggu	346	1218	28,41
8	Kec. Pastim	253	1031	24,54
9	Kec. Pasimarannu	578	1311	44,09
10	Kec. Takabonerate	489	1074	45,53
11	Kec. Pasilambena	284	517	54,93
	Jumlah	6285	19.970	31,47

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.104
Rasio KDRT Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah KDRT	24	12	12	16	54
2	Jumlah Rumah Tangga	31.144	31.183	32.307	30.929	34.771
3	Rasio KDRT	0,07	0,03	0,03	0,05	0,24

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.105
Rasio KDRT Tahun 2015 Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Jumlah KDRT	Jumlah rumah tangga	Rasio KDRT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kecamatan Benteng	36	4.993	0,72
2	Kec. Bontoharu	3	3.397	0,08
3	Kec. Bontomanai	11	3.476	0,31
4	Kec. Bontomatene	0	3.974	0
5	Kecamatan Buki	0	1.824	0
6	Kec. Bontosikuyu	3	4.184	0,07
7	Kec. Pasimasunggu	0	2.344	0
8	Kec. Pastim	0	2.083	0
9	Kec. Pasimarannu	1	2.083	0.032
10	Kec. Takabonerate	0	3.482	0
11	Kec. Pasilambena	0	1.932	0
	Jumlah	54	34.771	0,150

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.106
Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pekerja anak usia 5-14 tahun	1.106	1.091	993	1.292	1.289
2	Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	5.447	5.724	5.337	5.264	5.261
3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	20,30	19,06	18,60	24,54	24,50

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.107
Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun	Jumlah Pekerja Usia 5 Tahun Keatas	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kecamatan Benteng	80	740	10,81
2	Kec. Bontoharu	117	527	22,20
3	Kec. Bontomanai	70	425	16,47
4	Kec. Bontomatene	58	333	17,42
5	Kecamatan Buki	26	167	15,57
6	Kec. Bontosikuyu	202	627	32,22
7	Kec. Pasimasunggu	25	315	7,94
8	Kec. Pastim	110	319	34,48
9	Kec. Pasimarannu	43	344	12,5
10	Kec. Takabonerate	516	967	53,39
11	Kec. Pasilambena	42	497	8,45
	Jumlah	1.289	5.261	24,50

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tabel 2.108
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (standar 2 anak)	1,85	1,82	1,84	1,85	
2	Cakupan peserta KB aktif (Target 60%)	84,06	80,26	83,71	76,12	76,48
3	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	30,99	29,32	28,04	28,70	28,50
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga (standar 2 anak)	2,21	1,84	1,77	1,86	1,86

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.109
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah anak	62521	60987	62572	62087	
2	Jumlah keluarga	33715	33354	33925	33388	
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,85	1,82	1,84	1,85	

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.110
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2014
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Jumlah Anak	Jumlah Keluarga	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kecamatan Benteng	9524	4320	2,20
2	Kec. Bontoharu	6595	3455	1,90
3	Kec. Bontomanai	6427	3546	1,81
4	Kec. Bontomatene	6148	3917	1,56
5	Kecamatan Buki	3224	1816	1,77
6	Kec. Bontosikuyu	7096	4153	1,70
7	Kec. Pasimasunggu	4078	2094	1,94
8	Kec. Pastim	3521	2026	1,73
9	Kec. Pasimarannu	4976	2979	1,66
10	Kec. Takabonerate	6580	3144	2,09
11	Kec. Pasilambena	3918	1938	2,02
	Jumlah	62087	33388	1,85

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.111
Rasio Akseptor KB Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah akseptor KB	17747	16661	16860	14871	15423
2	Jumlah pasangan usia subur	21110	20756	20140	19535	20166
3	Rasio akseptor KB	84,06	80,26	83,71	76,12	76,48

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.112
Rasio Akseptor KB Menurut Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Jumlah akseptor KB	Jumlah pasangan usia subur	Rasio akseptor KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kecamatan Benteng	2329	3040	76,61
2	Kec. Bontoharu	1461	1965	74,35
3	Kec. Bontomanai	1622	1885	86,04
4	Kec. Bontomatene	1176	1739	67,62
5	Kecamatan Buki	781	962	81,18
6	Kec. Bontosikuyu	1975	2328	84,83
7	Kec. Pasimasunggu	1066	1444	73,82
8	Kec. Pastim	846	1172	72,18
9	Kec. Pasimarannu	1415	1753	80,71
10	Kec. Takabonerate	1882	2300	81,82
11	Kec. Pasilambena	870	1578	55,13
	Jumlah	15423	20166	76,48

Sumber : BPPKB Kab. Kepulauan Selayar

12. Sosial

Dalam bidang pelayanan sosial, secara umum kinerja pemerintah dapat dikatakan masih kurang, antara lain ditunjukkan dengan masih rendahnya cakupan penanganan keluarga berumah tidak layak huni, wanita rawan sosial ekonomi serta masih rendahnya penanganan anak-anak terlantar.

Tabel 2.113
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	0	0	0	0	0
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,72	7,80	7,90	12,52	19,4
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0,16	0,21	0,29	0,32	0,55

Sumber : Dissosnakertrans Kab. Kepulauan Selayar

13. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Lokal

Selanjutnya capaian kinerja dalam ketenagakerjaan selama lima tahun terakhir, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tersedianya data base tenaga kerja.
- 2) Tersedianya instruktur dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK).
- 3) Telah dilaksanakan pendidikan dan pelathan bagi pencari kerja sebanyak.
- 4) Tersediannya sarana dan prasarana BLK yang memadai.
- 5) Tersedianya bahan dan materi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, melalui kegiatan fasilitasi, pengadaan bahan materi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja setiap tahun anggaran berjalan
- 6) Terlaksananya pelatihan-pelatihan di BLK.
- 7) Telah dilaksanakan kegiatan padat karya dan perluasan kesempatan kerja
- 8) Telah dilaksanakan pemberian bantuan alat perbengkelan
- 9) Terjaganya keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja, melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum serta keselamatan dan kesehatan kerj pada tahun.

Tabel 2.114
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	6,52	6,94	7,04	7,14	7,22
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0	0	0	0	0
3	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	-	0,45	-	3,18	4,24
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	17,60	0,32	6,61	5,88	4,29
6	Keselamatan dan perlindungan(%)	80	80,5	79	87	87
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0

Sumber : Dissosnakertrans Kab. Kepulauan Selayar

14. Koperasi dan UMKM

Tabel 2.115
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase koperasi aktif	72,47	73,37	69,89	71,96	76,72
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	9869	9961	10801	11879	15015
4	Usaha Mikro dan Kecil	9962	10801	10801	11380	15016

Sumber : Diskoperindag Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.116
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koperasi aktif	129	135	130	136	145
2	Jumlah koperasi	178	184	186	189	189
3	Persentase koperasi aktif	72,47	73,37	69,89	71,96	76,72

Sumber : Diskoperindag Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.117
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kecamatan Benteng					
	Jumlah koperasi aktif	45	48	43	48	57
	Jumlah koperasi	79	82	84	86	86
	Persentase koperasi aktif	56,96	58,54	57,14	55,81	66,28
2	Kecamatan Bontoharu					
	Jumlah koperasi aktif	8	9	9	10	10
	Jumlah koperasi	10	11	11	12	12
	Persentase koperasi aktif	80	81,82	81,82	83,33	83,33
3	Kecamatan Bontomanai					
	Jumlah koperasi aktif	10	11	11	11	11
	Jumlah koperasi	13	14	14	14	14
	Persentase koperasi aktif	76,92	78,57	78,57	78,57	78,57
4	Kecamatan Bontomatene					
	Jumlah koperasi aktif	15	15	15	15	15
	Jumlah koperasi	18	18	18	18	18
	Persentase koperasi aktif	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
5	Kecamatan Buki					
	Jumlah koperasi aktif	12	12	12	12	12
	Jumlah koperasi	15	15	15	15	15
	Persentase koperasi aktif	80	80	80	80	80
6	Kecamatan Bontosikuyu					
	Jumlah koperasi aktif	6	6	6	6	6
	Jumlah koperasi	7	7	7	7	7
	Persentase koperasi aktif	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71
7	Kecamatan Pasimasunggu					
	Jumlah koperasi aktif	7	7	7	7	7
	Jumlah koperasi	8	8	8	8	8
	Persentase koperasi aktif	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
8	Kecamatan Pastim					
	Jumlah koperasi aktif	4	4	4	4	4
	Jumlah koperasi	6	6	6	6	6
	Persentase koperasi aktif	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
9	Kecamatan Pasimarannu					
	Jumlah koperasi aktif	8	8	8	8	8
	Jumlah koperasi	8	8	8	8	8
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100

10	Kecamatan Takabonerate					
	Jumlah koperasi aktif	9	9	9	9	9
	Jumlah koperasi	9	9	9	9	9
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100
11	Kecamatan Pasilambena					
	Jumlah koperasi aktif	5	5	5	5	5
	Jumlah koperasi	6	6	6	6	6
	Persentase koperasi aktif	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
	Total Jumlah koperasi aktif	129	135	130	136	145
	Total Jumlah koperasi	178	184	186	189	189
	Total Persentase koperasi aktif	72,47	73,37	69,89	71,96	76,72

Sumber : Diskoperindag Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.118
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**
1	Jumlah seluruh UKM	9870	9962	10801	11880	15016
2	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	9869	9961	10801	11879	15015

Sumber : Diskoperindag Kab. Kepulauan Selayar

15. Penanaman Modal

Tabel 2.119
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010 – 2014

NO	Bidang dan Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	91	139	110	206	106
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)	21.039.325.000	36.036.590.000	47.114.260.189	53.538.735.600	27.336.147.039
3	Rasio Daya Serap tenaga Kerja	-	0,06	3,82	2,82	1,95
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Naik 3,64 %	Naik 71,28%	Naik 30,74%	Naik 13,63 %	Naik 48,94 %

Sumber : PTPM dan Dissosnakertrans Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.120
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2011	Jumlah Investor	136	4	140
2012	Jumlah Investor	107	4	111
2013	Jumlah Investor	203	4	207
2014	Jumlah Investor	103	4	107
2015	Jumlah Investor	165	4	169

Sumber : PTPM Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.121
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	JumlahProyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
2011	140	122.126.590.000	138	46.896.166.000
2012	111	133.204.260.189	109	57.973.836.189
2013	207	139.628.735.600	205	64.398.311.600
2014	107	113.426.147.039	105	38.195.723.039
2015	169	126.809.238.757	167	46.006.912.660

Sumber : PTPM Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.122
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	816	887	899	951	950
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	-	110	235	337	488
3	Rasio daya serap tenaga kerja	-	0,06	3,82	2,82	1,95

Sumber : PTPM dan Dissosnakertrans Kab. Kepulauan Selayar

16. Kebudayaan

Tabel 2.123
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3	3	6
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	2
3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (standar 20%)	558	558	558	558	1993

Sumber : Disbudpar Kab. Kepulauan Selayar

17. Pemuda dan olah raga

Tabel 2.124
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah organisasi pemuda	35	35	35	35	35
2	Jumlah organisasi olahraga	26	26	26	26	26
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	2	2	2
4	Jumlah kegiatan olahraga	2	6	5	5	6
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	5	5	6	6	6
6	Lapangan olahraga	29	29	29	29	29

Sumber : Bagian Olahraga dan Pemuda SETDA Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.125
Jumlah Organisasi Pemuda
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kecamatan Benteng	35	35	35	35	35
2.	Kec. Bontoharu	-	-	-	-	-
3.	Kec. Bontomanai	-	-	-	-	-
4.	Kec. Bontomatene	-	-	-	-	-
5.	Kecamatan Buki	-	-	-	-	-
6.	Kec. Bontosikuyu	-	-	-	-	-
7.	Kec. Pasimasunggu	-	-	-	-	-
8.	Kec. Pastim	-	-	-	-	-
9.	Kec. Pasimarannu	-	-	-	-	-
10.	Kec. Takabonerate	-	-	-	-	-
11.	Kec. Pasilambena					
	Jumlah	35	35	35	35	35

Sumber : Bagian Olahraga dan Pemuda SETDA Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.126
Jumlah Organisasi Olahraga
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kec. Benteng	26	26	26	26	26
2.	Kec. Bontoharu	-	-	-	-	-
3.	Kec. Bontomanai	-	-	-	-	-
4.	Kec. Bontomatene	-	-	-	-	-
5.	Kecamatan Buki	-	-	-	-	-
6.	Kec. Bontosikuyu	-	-	-	-	-
7.	Kec. Pasimasunggu	-	-	-	-	-
8.	Kec. Pastim	-	-	-	-	-
9.	Kec. Pasimarannu	-	-	-	-	-
10.	Kec. Takabonerate	-	-	-	-	-
11.	Kec. Pasilambena	-	-	-	-	-
	Jumlah	26	26	26	26	26

Sumber : Bagian Olahraga dan Pemuda SETDA Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.127
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kecamatan Benteng	2	2	2	2	2
2.	Kec. Bontoharu	-	-	-	-	-
3.	Kec. Bontomanai	-	-	-	-	-
4.	Kec. Bontomatene	-	-	-	-	-
5.	Kecamatan Buki	-	-	-	-	-
6.	Kec. Bontosikuyu	-	-	-	-	-
7.	Kec. Pasimasunggu	-	-	-	-	-
8.	Kec. Pastim	-	-	-	-	-
9.	Kec. Pasimarannu	-	-	-	-	-
10.	Kec. Takabonerate	-	-	-	-	-
11.	Kec. Pasilambena	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	2	2	2	2

Sumber : Bagian Olahraga dan Pemuda SETDA Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.128
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kecamatan Benteng	2	6	5	5	6
2.	Kec. Bontoharu	-	-	-	-	-
3.	Kec. Bontomanai	-	-	-	-	-
4.	Kec. Bontomatene	-	-	-	-	-
5.	Kecamatan Buki	-	-	-	-	-
6.	Kec. Bontosikuyu	-	-	-	-	-
7.	Kec. Pasimasunggu	-	-	-	-	-
8.	Kec. Pastim	-	-	-	-	-
9.	Kec. Pasimarannu	-	-	-	-	-
10.	Kec. Takabonerate	-	-	-	-	-
11.	Kec. Pasilambena	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	6	5	5	6

Sumber : Bagian Olahraga dan Pemuda SETDA Kab. Kepulauan Selayar

18. Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri

Tabel 2.129
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5	5	5	5	6
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	2	3	3	3	6

Sumber : Badan Kesbangpollinmas Kab. Kepulauan Selayar

19. Otonomi Daerah, Pemerataan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah dan

Tabel 2.130
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio jumlah pamong praja per 10.000 penduduk	3,89	8,67	9,59	12,82	16,35
2	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk	75,84	75,06	73,50	46,83	46,83
3	Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
4	Pertumbuhan ekonomi					
5	Kemiskinan	14,04	12,87	12,56	11,50	
6	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	ada	ada	ada	ada	ada
7	Penegakan PERDA	21,74	54,69	65,50	93,75	100
8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari
9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	47,14	40,94	30,08	82,50	89,29
10	Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,76	0,75	0,73	0,41	0,41
11	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kabupaten	0,0022	0,0022	0,0022	0,0030	0,0037
12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	30	30	30	30	30
13	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100	100	100
14	Sistem informasi Manajemen PEMDA	-	ada	ada	ada	ada
15	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat	-	ada	ada	Tidak ada	ada

Sumber : Kantor SatpolPP Kab. Kepulauan Selayar

20. Ketahanan Pangan

Sementara itu, terkait dengan upaya pembangunan di bidang pangan, Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai bentuk kebijakan ketahanan pangan daerah antara lain:

- 1) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan pangan;

- 2) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- 3) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 4) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45.a Tahun 2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang Pelayanan SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- 5) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Tabel 2.131
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama	105	112	130	129	141

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Kepulauan Selayar

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan

Tabel 2.132
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	7	7	7	7	7
2	Rata-rata jumlah keluarga binaan PKK	5	6	6	7	10
3	Jumlah LSM yang dibina (%)	40	40	68	75	75
4	LPM aktif dan berprestasi (%)	75	75	80	85	90
5	PKK aktif (%)	95	90	95	98	99
6	Posyandu aktif (%)	89	89	93	98	99
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	35	35	50	75	76
8	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat					

Sumber : Bapemdeskel Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.133
Jumlah LSM aktif Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah LSM terdaftar	31	51	73	80	86
2.	Jumlah LSM tidak aktif	10	13	19	24	32
3.	Jumlah LSM aktif (1-2)	21	38	54	56	54

Sumber : Badan Kesbangpollinmas Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.134
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	213	2014	2015
1.	Jumlah Linnmas	935	935	935	616	616
2.	Jumlah penduduk	123.283	124.553	127.220	128.744	134.199
3.	Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk	75,84	75,07	73,48	47,85	45,90

Sumber : Badan Kesbangpollinmas Kab. Kepulauan Selayar

22. Statistik

Tabel 2.135
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010 – 2014

NO	Bidang dan Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1	Buku "Kepulauan Selayar Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kab. Kepulauan Selayar

23. Kearsipan

Tabel 2.136
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	100	100	100	100	100
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	1

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Kepulauan Selayar

24. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.137
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah jaringan komunikasi	5	5	5	5	5
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,057	0,08	0,094	0,14	0,184
3	Jumlah surat kabar lokal/nasional	15	15	15	15	24
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	5	3	3	3	3
5	Website milik pemerintah daerah	1	2	4	5	5
6	Pameran/ Expo	1	1	1	1	1

Sumber : Data Dishubkominfo Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2. 138
Jaringan Komunikasi Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah jaringan telepon genggam	4	4	4	4	4
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	1	1	1	1	1
3	Total jaringan Komunikasi (1+2)	5	5	5	5	5

Sumber : Data Dishubkominfo Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2. 139
Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	2011					2015				
		Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel (6=4/3)	Rasio warnet (7=5/3)	Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel (11=9/8)	Rasio Warnet (12=10/8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/3)	(7=5/3)	(8)	(9)	(10)	(11=9/8)	(12=10/8)
1.	Kecamatan Benteng	20.202	-	20	-	0,00099	24.036	-	15	-	0,00062
2.	Kec. Bontoharu	-	-	-	-	-	14.339	-	-	-	-
3.	Kec. Bontomanai	-	-	-	-	-	14.048	-	-	-	-
4.	Kec. Bontomatene	-	-	-	-	-	13.954	-	-	-	-
5.	Kecamatan Buki	-	-	-	-	-	6.559	-	-	-	-
6.	Kec. Bontosikuyu	-	-	-	-	-	15.449	-	-	-	-
7.	Kec. Pasimasunggu	-	-	-	-	-	8.664	-	-	-	-
8.	Kec. Pastim	-	-	-	-	-	7.421	-	-	-	-
9.	Kec. Pasimarannu	-	-	-	-	-	9.929	-	-	-	-
10.	Kec. Takabonerate	-	-	-	-	-	12.557	-	-	-	-
11.	Kec. Pasilambena	-	-	-	-	-	7.373	-	-	-	-
	Jumlah	20.202	-	20	-	0,00099	134.329	-	15	-	0,00062

Sumber : Data Dishubkominfo Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2. 140
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2015
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	5	7
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	10	17
3	Total jenis surat kabar (1+2)	15	24

Sumber : Data Dishubkominfo Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2. 141
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2015
1	Jumlah penyiaran radio lokal	3	1
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	-	-
4	Jumlah penyiaran TV nasional	1	1
5	Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)	5	3

Sumber : Data Dishubkominfo Kab. Kepulauan Selayar

26. Perpustakaan

Layanan perpustakaan merupakan saah satu jenis layanan publik yang sangat penting mengingat berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat da sumber daya manusia aparatur. Oleh karena itu perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap kinerja layanan ini cukup besar, antara lain dengan penyediaan fasilitas dan sarana perpustakaan penunjang seperti mobil

perpustakaan keliling dan kapal perpustakaan keliling. Adapun kinerja layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun terakhir boleh dikatakan cukup baik, antara lain ditunjukkan dengan tingginya jumlah pengunjung setiap tahunnya serta senantiasa bertambahnya jumlah anggota. Namun demikian dalam rangka lebih meningkatkan kinerja layanan ini maka penambahan koleksi buku perlu terus mendapat perhatian utama, mengingat jumlah buku yang masih kurang.

Tabel 2.142
Analisis Kinerja Atas Fokus Layanan Urusan Wajib
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2011 – 2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Perpustakaan	1	1	1	1	1
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah (Org) per tahun	42.219	37.634	42.439	40.647	45.708
3	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (exp)	43.389	47.341	52.173	56.681	56.765

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.143
Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	0	0	0	0	0
3.	Total Perpustakaan (1+2)	1	1	1	1	1

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.144
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	42.219	37.634	42.439	40.647	45.708
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	0	0	0	0	0
3.	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	42.219	37.634	42.439	40.647	45.708

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Kepulauan Selayar

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Adapun analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Kabupaten, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

Capaian kinerja terhadap urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa kinerja bidang urusan pilihan cukup baik antara lain dibuktikan dengan terjadinya peningkatan produksi yang dominan pada dua bidang urusan yang menjadi urusan pilihan yaitu bidang pertanian, dan perikanan dari tahun ke tahun.

1. Pertanian

Tabel 2.145
Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pilihan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014

NO	Bidang dan Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1	Produktifitas tanaman bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	52,90	57,10	57,13	59,01	59,45
2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	15,52	15,13	13,42	12,17	12,86
3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	0,47	0,47	0,47	0,42	0,40
4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	280.443,20	320.629,40	330.728,70	366.446,00	445.279,10
5	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	-	-	-	-	-
6	Cakupan bina kelompok petani	50	60	240	120	123

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kepulauan Selayar

2. Kehutanan

Tabel 2.146
Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pilihan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi hutan dan Lahan kritis	-	1.072,64	1.293,84	1.267,25	375,45
2	Kerusakan kawasan hutan	47.665,52	46.680,42	46.679,77	43.045,17	42.775,76
3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,14	0,13	0,12	0,10	-

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kepulauan Selayar

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sepanjang lima tahun terakhir ini, kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan bantuan pembangunan di bidang energi listrik selama lima tahun terakhir, telah memberikan dampak yang cukup signifikan.

Pengembangan ketenagalistrikan di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Pulau-pulau Selayar dilakukan dengan meningkatkan prasarana jaringan dan peningkatan kapasitas terpasang energi listrik mengingat masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN dimana tingkat elektrifikasinya sangat

rendah yaitu baru mencapai 45,89 % (Jumlah KK yang dilayani oleh PT. PLN (Persero) Rayon Selayar per Maret 2014 sebanyak 16.301 KK dari 31.154 Jumlah KK Kabupaten Kepulauan Selayar). Selain itu, upaya lain dengan pengembangan listrik masuk desa dengan tenaga energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang selama ini digunakan pada wilayah yang belum terlayani listrik PLN dan pulau-pulau yang merupakan pusat permukiman penduduk.

Perencanaan kebutuhan energi listrik harus disesuaikan dengan estimasi jumlah penduduk dan urgensi pemakaian yang ada, serta jaringan yang ada sekarang, yaitu dengan mensuplai daya listrik tegangan rendah hingga tegangan menengah. Pengembangan jaringan listrik khususnya kawasan perencanaan dapat berfungsi sebagai sarana untuk merangsang peningkatan intensitas kegiatan ekonomi kawasan dan memperkuat kemungkinan terciptanya struktur ruang kawasan yang seimbang. Lebih dari itu, layanan prasarana listrik ini dapat mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat setempat, yaitu dengan adanya pengembangan jaringan listrik hingga kawasan pemukiman nelayan, termasuk usaha pengadaan listrik untuk jalan.

Tabel 2.147
Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pilihan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertambangan tanpa ijin	36,75	34,32	13,57	39,63	62,64
2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0,70	0,77	0,83	0,96	0,62

Sumber : Dinas Energi dan sumber daya mineral Kab. Kepulauan Selayar

4. Pariwisata

Tabel 2.148
Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pilihan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kunjungan Wisata	4519	4743	4129	4553	6199
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwiata Kab. Kepulauan Selayar

5. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.149
Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pilihan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi perikanan (ton)	32.131,86	42.068,55	39.957,89	36.942,68	24.960,73
2	Konsumsi ikan	44,30	44,80	45,67	46,12	49,45
3	Cakupan Bina kelompok nelayan	87	107	138	151	160
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	458	640	2020	2301	26490

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar

6. Perdagangan

Tabel 2.150
Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pilihan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014

NO	Bidang dan Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1,2	1,7	2,5	3,9	4,3
2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	35	40	45	58	68

Sumber : Dinas Koperindag Kab. Kepulauan Selayar

7. Perindustrian

Tabel 2.151
Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Urusan Pilihan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014

NO	Bidang dan Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	4,55	3,30	3,14	3,04	2,80
2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	2,27	2,07	2,06	2,01	1,89
3	Pertumbuhan industri	6821	7137	7163	7163	8074
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	923	947	1084	1084	1085

Sumber : Dinas Koperindag Kab. Kepulauan Selayar

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinfestasi dan sumber daya manusia. Namun karena keterbatasan

data, hanya dapat ditayangkan data aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:

- Fokus kemampuan ekonomi daerah
- Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tabel 2.152
Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Aspek daya Saing Daerah
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014

NO	Bidang dan Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	-	-	-	211.250	-
2	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	-	-	-	138.276	-
3	Produktifitas Total Daerah	-	-	-	-	-

- Pertanian

Tabel 2.153
Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Aspek daya Saing Daerah
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2014

NO	Bidang dan Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1	Nilai Tukar Petani	-	-	-	-	-

- Fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur
- Perhubungan

Tabel 2.154
Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Aspek daya Saing Daerah
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,009	0,006	0,004	0,003	0,002
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	123.125	124.206	124.853	126.085	128.744
3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	350.959	328.429	417.923	401.342	369.175

Sumber : Dishubkominfo Kab. Kepulauan Selayar

- Penataan Ruang
- Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tabel 2.155
Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Sektor	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perusahaan Asuransi Kerugian					
1.1.	Konvensional	1	1	1	1	1
1.2.	Syariah	-	-	-	-	-
2.	Perusahaan Asuransi Jiwa					
2.1.	Konvensional	-				
2.2.	Syariah	-				

Jumlah	1	1	1	1	1
--------	---	---	---	---	---

Sumber : PTPM Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.156
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Sektor	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Bank Umum					
1.1.	Konvensional	1	1	2	2	3
1.2.	Syariah	-	-	-	-	-
2.	BPR					
2.1.	Konvensional	1	1	1	1	1
2.2.	Syariah	-	-	-	-	-
Jumlah		2	2	3	3	4

Sumber : PTPM Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.157
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Kursi	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1.	Restoran Bintang 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Restoran Bintang 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Restoran Bintang 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Restoran Non Bintang	14	364	14	364	14	364	14	348	19	490
5.	Rumah Makan	44	880	44	880	44	880	52	1008	40	694
Jumlah		58	1244	58	1244	58	1244	66	1356	59	1184

Sumber : Disbudpar Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.158
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1.	Hotel Bintang 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hotel Bintang 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hotel Bintang 3	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
4.	Hotel Bintang 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hotel Bintang 1	1	17	1	17	1	17	1	17	1	17
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	9	107	12	122	13	133	15	146	15	146
7.	Pondok Wisata	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
Total Jumlah penginapan/Hotel		12	136	15	151	16	162	18	175	18	175

Sumber : Disbudpar Kab. Kepulauan Selayar

- **Lingkungan Hidup**

Tabel 2.159
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Sumber Air Bersih	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Leding (Perpipaan)	11,65	12,86	14,88	17,52	35,67

No	Sumber Air Bersih	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Sumur Lindung	11,15	12,25	15,29	18,62	21,54
3.	Sumur Tidak Terlindung	25,21	28,24	30,86	33,56	36,56
4.	Mata Air Terlindung	16,52	17,36	18,39	20,43	30,97
5.	Mata Air Tidak Terlindung	0	0	0	0	0
6.	Sungai	0	0	0	0	0
7.	Danau/Waduk	0	0	0	0	0
8.	Air Hujan	0,6	0,61	1,96	1,93	1,93
9.	Air Kemasan	0	0	0	0	0
10.	Lainnya	0	0	0	0	0
11.	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	14.852	15.732	16.843	19.523	23.859
12.	Jumlah Rumah Tangga	41.483	42.476	44.005	44.005	44.126
13.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12)	35,8	37,04	38,28	44,37	54,07

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Selayar

- **Komunikasi dan Informatika**

Tabel 2.160
 Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Aspek daya Saing Daerah
 Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio ketersediaan daya listrik (KW)	7.680	7.680	7.710	10.258	10.578
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listik	47,28	51,51	58,72	62,76	63,34
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	41,66	41,32	40,61	40,25	41,2

Sumber : Dnas ESDM, DishubkominfoKab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.161
 Prakiraan Kebutuhan Beban enaga Listrik
 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kebutuhan						
	- Rumah tangga	VA	6.547.200	8.967.600	10.438.200	11.826.450	12.218.850
	- Komersial	VA	1.233.000	1.920.800	2.238.600	2.304.900	2.454.400
	- Public	VA	1.472.160	1.646.000	1.570.900	695.200	1.803.200
	- Industri	VA	897.600	1.299.100	2.445.600	3.462.633	1.218.400
2.	Susut & Losses (T&D)	%	-	-	-	-	-
3.	Susut Pemakaian Sendiri	%	-	-	-	-	-
4.	Total Susut & Losses	%	-	-	-	-	-
5.	Faktor Beban	%	-	-	-	-	-
6.	Produksi	KWH/BULAN	18.373.850	20.686.888	22.625.736	24.666.473	26.261.350
7.	Beban Puncak	MW	-	-	-	-	-
8.	Kapasitas Terpasang (Existing)	KW	10.104	10.104	10.104	10.104	10.104
9.	Cummulated Committed Projects	KW	-	-	-	-	-
10.	Total Kapasitas Sistem	KW	10.104	10.104	10.104	10.104	10.104
11.	Daya yang Dibutuhkan*	MW	5	5	5	10	10

Sumber : Dinas ESDM Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 2.162
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	RT dengan daya 450 watt	4.551	5.112	5.046	5.761	5.699
2.	RT dengan daya 900 watt	6.432	7.518	9.075	10.260	10.727
3.	RT dengan daya 1.300 watt	1.253	1.478	1.722	1.773	1.888
4.	RT dengan daya 2.200 watt	235	494	601	316	680
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	149	154	194	556	237
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	14.631	16.768	16.638	18.666	19.231
7.	Jumlah Rumah Tangga	29.186	29.186	29.186	29.186	29.186
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)	47,28	51,51	58,72	62,76	63,34

Sumber : Dinas ESDM Kab. Kepulauan Selayar

- **Fokus iklim berinvestasi**
- **Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Tabel 2.163
Hasil Analisis Kinerja Penyelenggaraan Layanan Aspek daya Saing Daerah
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-2015

NO	Bidang dan Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kriminalitas	0,0024	0,0029	0,0037	0,0030	0,0032
2	Jumlah Demo	10	4	11	10	5
3	Lama proses perijinan	7	7	7	10	10
4	Jumlah dan macam pajak retribusi daerah					
5	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	2	-	2	-	1
6	Persentase desa berstatus swasembada pangan					

Tabel 2.164
Angka Kriminalitas
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kasus Narkoba	7	3	10	8	15
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	1	-	3	2	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	2	5	2	3	5
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	61	79	83	94	96
5.	Jumlah kasus Pencurian	35	73	64	74	58
6.	Jumlah kasus Penipuan	29	19	30	27	46
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	302	371	468	392	428
9.	Jumlah Penduduk	123.283	124.553	127.220	128.744	134.329
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,0024	0,0029	0,0037	0,0030	0,0032

Sumber : Polres Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 2.165
Jumlah Demonstrasi
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang Politik	-	1	1	-	5

2	Ekonomi	-	-	1	-	-
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	10	3	9	10	-
	Jumlah	10	4	11	10	5

Sumber : Polres Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 2.166
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
Yang Mendukung Iklim Investasi
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	11.797.000.000	2.101.870.175	1.939.500.000	3.472.000.000	4.790.000.000
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	7	7	8	9	9
3.	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	2.105.000.000	2.437.079.611	2.715.500.000	8.410.725.000	9.467.000.000
4.	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	26	26	29	28	28

Sumber : DPPK ASDA Kepulauan Selayar

Tabel 2.167
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perda terkait perijinan	2	-	1	-	1
2.	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	-	-	1	-	-
	Jumlah	2	-	2	-	1

Sumber : Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar

- Fokus sumber daya manusia
- Ketenagakerjaan
- Ketenagakerjaan

Tabel 2.168
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah lulusan S1	617	649	855	903	925
2.	Jumlah lulusan S2	-	-	-	3	-
3.	Jumlah lulusan S3	-	-	-	-	4
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	617	649	855	906	929
5.	Jumlah penduduk	123.283	124.553	127.220	128.744	134.329
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	50,04	52,10	67,20	70,14	69,16

Sumber : Dissosnakertrans, Kabupaten Kepulauan Selayar

- Rasio Ketergantungan

Tabel 2.169
Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	36.093	38.901	39.309	40.143	38.212
2.	Jumlah Penduduk Usia >64 tahun	8.170	8.372	8.457	8.643	9.179
3.	Jumlah Penduduk usia 15-64 Tahun	77.486	76.010	76.787	78.434	81.353
4.	Rasio Ketergantungan	57,12	62,19	62,21	62,20	58,25

Sumber : BPS, Kabupaten Kepulauan Selayar

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Tabel. 170
Hasil Analisis Gambaran umum Kondisi Daerah
Terhadap capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek/focus/Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Belumtercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
1	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI							
1.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	8,88	7,88	9,18	9,18		7,57	(>) Pertumbuhan ekonomi sebesar 9,18 berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan
1.1.1.2	Laju Inflasi	6,8	6,4	11,12	9,21			
1.1.1.3	PDRB per kapita (Juta Rupiah)	17,19	19,79	22,64	26,9		35,97	(<) PDRB Perkapita cukup signifikan dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih berada jauh dibawah PDRB Perkapita Provinsi Sul-Sel dengan besaran kontribusi hanya sekitar 1,08 % terhadap PDRB Perkapita Sul-Sel
1.1.1.4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	85,96	87,13	87,49	88,50		90,46	(<) Hingga Tahun 2014, jumlah fakir miskin/keluarga miskin sebanyak 5.686 keluarga atau turun sekitar 11,50 % terhadap jumlah penduduk.
1.1.1.5	Angka kriminalitas yang tertangani	24,49	29,79	36,77	30,45	31,86	8,36	(>) Pada tahun 2015, jumlah dan jenis perkara/tindak kriminalitas yang tertangani mengalami peningkatan yaitu dari 30,45% menjadi 31,86%
1.2	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf	90,87	90,88	91,89	92,9	93,98	90	(>)

								Angka melek huruf 5 tahun terakhir cenderung meningkat dan sudah melampaui standar propinsi
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	11	11	12	12	13	8,21	(>)
1.2.1.3	Angka partisipasi kasar							
1.2.1.3.1	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	104,18	102,37	103,98	99,21	95,39	100	(<)
1.2.1.3.3	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	109,07	99,85	95,52	90,48	96,68	99,25	(<)
1.2.1.3.3	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/Paket C	159,87	136,11	93,86	86,6	97,02	78	(>)
1.2.1.4	Angka pendidikan yang ditamatkan	25	27	28	28	20		
1.2.1.4.1	SD/MI	21	22	23	23			
1.2.1.4.2	SMP/MTs	24	26	27	27			
1.2.1.4.3	SMA/MA/SMK	31	32	34	34			
1.2.1.5	Angka Partisipasi Murni	21	22	23	23			
1.2.1.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A	89,65	90,15	96,65	98,94	99,59	100	(=)
1.2.1.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/Paket B	78,79	81,16	86,77	71,63	96,68	68,27	(>)
1.2.1.5.3	Angka Partisipasi Murni (APM)SMA/SMK/Paket C	120,01	123,71	83,7	71,61	97,02	61,4	(>)
1.2.2	Kesehatan							
1.2.2.1	Angka kelangsungan hidup bayi	(1- 21,48)	(1- 20,77)	(1- 15,78)	(1- 25,00)			
1.2.2.2	Angka usia harapan hidup	67,43	67,47	67,49	67,50			
1.2.2.3	Persentase balita gizi buruk	0,22	1,27	0,06	0,08			
1.2.3	Pertanahan							
1.2.3.1	Persentase penduduk yang memiliki lahan							
1.2.4	Ketenagakerjaan							
1.2.4.1	Rasio penduduk yang bekerja	0,91	0,95	0,96	0,95			
1.3.	Fokus Seni Budaya dan olah raga							
1.3.1.1	Jumlah grup kesenian	5	5	5	6		NA	(<)
1.3.1.2	Jumlah gedung	0	0	0	0			
1.3.2.	Pemuda dan Olahraga							
1.3.2.1	a. Jumlah klub olahraga	-	-	-	6	207	1.590	(<)
1.3.2.2	b. Jumlah gedung olahraga	2	2	3	3	3		
2.	ASPEK PELAYANAN UMUM							

2.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar:							
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah							
	SD/MI	890,83	896,50	901,47	966,48	989,45	97,63	
	SMP/MTs	855	788	812	868	716		
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	97,89	91,03	88,54	91,47	92,76	153,08	
	SD/MI	94,37	89,20	89,20	89,20	89,78		
	SMP/MTs	88	78	71	80	83		
2.1.1.1.3	Rasio guru/murid							
	SD/MI	104,62	107,41	106,14	109,18	114,83	13,2	(>)
	SMP/MTs	96,82	123,04	119,18	141,47	134,76		
2.1.1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	57,03	54,97	53,53	58,15	59,91	25,98	
2.1.1.2	Pendidikan menengah:							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah	1200	1237	837	716	970	86,23	(>)
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	65,54	57,22	38,40	31,82	34,23	221,72	
2.1.1.2.3	Rasio guru terhadap murid	62,30	69,68	71,54	52,94	49,21		
2.1.1.2.4	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	10,07	10,25	10,09	10,58	12,22		
2.1.1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	112.015	113.198	114.341	115.495		100	(>)
2.1.2	Fasilitas Pendidikan:							

2.1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	56	61	65	73	78	61,86	(>)
2.1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	64	64	64	68	71	79,94	(<)
2.1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
2.1.3.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34,72	35,5	37,39	53,07	42,15	60	(<)
2.1.4	Angka Putus Sekolah:							
2.1.4.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,72	0,68	0,38	0,86	0,5	1,18	(<)
2.1.4.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,12	0,38	0,76	1,38	0,73	1,07	(<)
2.1.4.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,96	0,86	0,77	0,33	0,32	1,27	(>)
2.1.4	AngkaKelulusan:							
2.1.4.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98	100	99	98	100	100	(=)
2.1.4.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	(=)
2.1.4.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99	100	100	100	99	100	(=)
2.1.4.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	92,61	93,52	94,13	86,85	96	98,5	(<)
2.1.4.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93,3	94,86	94,91	102,79	100	96	(>)
2.1.4.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	37,76	42,74	54,84	73,25	73,51		
2.2.	Kesehatan							
2.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	25,03	25,31	29,69	28,76	29,78	7	(<)
2.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	64,08	63,43	65,25	62,12	66,99	0,16	
2.2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	(>)

2.2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,60	0.59	0,61	0,61	0,65	1	(>)
2.2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4	1	(>)
2.2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100	65	(<)
2.2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85,54	88,89	92,03	86,66	87,28	93	(<)
2.2.8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	71,60	72,72	76,14	78,41	78,41	95	(<)
2.2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	(=)
2.2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	68	58	69	58	53	70	(<)
2.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0	0	100	0	100	100	(=)
2.2.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	92,58	94,10	69,21	73,05	100	100	(=)
2.2.13	Cakupan kunjungan bayi	87,90	83,71	90,86	89,81	95,53	94	(>)
2.2.14	Cakupan puskesmas	118	127	127	127	127	150	(>)
2.2.15	Cakupan pembantu puskesmas	75,30	68,18	72,72	72,72	80,68	100	(>)
2.3	PekerjaanUmum							
2.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	-	0,37	0,40	0,46	605,49	(<)
2.3.2	Rasio Jaringan Irigasi	-	-	-	-	41,35	-	-
2.3.3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	43,80	49,64	54,65	57,20	60,06	70	(<)
2.3.5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	150,16 %	148,46 %	145,27 %	145,39 %	145,39 %	100%	Terdapat 145,39% tempat pemakaman umum dibanding dari target atau standar Tahun 2015 sebesar 100%.

2.3.6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	5,76%	5,62%	5,43%	5,29%	5,29%	100%	Terdapat 5,29% tempat pembuangan sampah dibanding dari target atau standar Tahun .72015 sebesar 100% masih perlunya penambahan tempat pembuangan sampah sebesar 94,71%
2.3.7	Rasio rumah layak huni	60,34 %	62,50 %	65,50 %	70,55 %	74,77 %	95%	Terdapat 74,77% Rumah Layak Huni dibanding dari target atau standar Tahun 2015 sebesar 95 %
2.3.8	Rasio permukiman layak huni	55%	61%	63%	72%	75%	95%	Terdapat 75% Permukiman Layak Huni dibanding dari target atau standar Tahun 2015 sebesar 95% masih terdapat 20% yang belum tertangani.
2.3.9	Panjang jalan dilalui Roda 4	532,69	540,49	550,01	553,49	548,81	659,49	(<)
2.3.10	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	-	-	-	-	402,69		
2.3.11	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	369,57	381,77	400,81	276,64	317,44	605,49	(<)
2.3.12	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	14.417 ,74	14.417 ,74	14.417 ,74	14.417 ,74	14.417 ,74		
2.3.13	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	-	-	-	-	-	-	
2.3.15	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	59,80	61,43	65,40	68,60	72,03	70,612	(<)
2.3.16	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	1.460	1.957	4.833	11.964	16.364		
2.3.17	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	47,20	47,57	47,87	51,91	54,73	89,56	(<)
2.3.18	Lingkungan Pemukiman	-	-	-	-	-	-	-

2.4.	Perumahan							
2.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	35,8	37,04	38,28	44,37	54,07	100	(<)
2.4.2	Rumah tangga pengguna listrik	47,28	51,51	58,72	62,76	63,34		(<)
2.4.3	Rumah tangga ber-Sanitasi	43,80	49,64	54,65	57,20	60,06	75	(<)
2.4.4	Lingkungan pemukiman kumuh	1:65	1:60	1:59	1:59		0	NA
2.4.5	Rumah layak huni	60,34 %	62,50 %	65,50 %	70,55 %	74,77 %	95%	Terdapat 74,77% Rumah Layak Huni dibanding dari target atau standar Tahun 2015 sebesar 95 %
2.5.	Penataan Ruang							
2.5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	12,97 %	12,97 %	12,97 %	12,97 %	12,97 %	20%	
2.5.2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	99,45 %	100%	100%	72%	60,87 %	100%	
2.5.3	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Perencanaan Pembangunan							
2.6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	(=) Dokumen RPJPD sesuai Perda No. 10 tahun 2009 Tentang RPJPD kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005-2025
2.6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	(=) Dokumen RPJMD sesuai Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang RPJPD kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010-2015
2.6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	(=) Dokumen RKPD sesuai Perbup No. 16 Tahun 2015
2.6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	75%	75%	80%	80%		100%	(<)
2.7.	Perhubungan							
2.7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	29.648	22.597	6.084	26.968	76.266		

2.7.2.	Rasio ijin trayek	0,083	0,093	0,093	0,095	0,096		
2.7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	109	121	130	142	150		
2.7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1/2/1 /1	7/2/1 /1	7/2/1 /1	7/2/1 /1	7/2/1 /1	6	(<)
2.7.5.	Angkutan darat	8.297	10.037	11.432	13.374	15.070		
2.7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	270	181	210	222	152		Konsistensi Kepemilikan KIR angkutan umum cenderung berfluktuasi dari tahun ke Tahun
2.7.8.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 5 Jam	± 20	(<)
2.7.9.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		Tidak adanya standar keseragaman biaya uji kelayakan angkutan umum
2.7.10.	Pemasangan Rambu-rambu	117	147	212	336	551	75	(>)
2.8.	Lingkungan Hidup							
2.8.1.	Persentase penanganan sampah	98,40	99,61	98,77	99,95	97,50	82,40	(<)
2.8.2.	Persentase Penduduk berakses airminum	22,88	11,73	13,32	16,37	60,09	100	(<)
2.8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata							86,20
2.8.4.	Pencemaran status mutu air	70,00	72,85	73,53	75,50	78,00	100	(<)
2.8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	0,84	196	2,94	2,36	25,43		
2.8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	80	43	3,4	3,7	3,9	100	(<)
2.8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,29	0,89	0,87	0,85	1,03	0,00138	(>)
2.8.9.	Penegakan hukum lingkungan	100	33	100	100	100	100	(=)
2.9	Pertanahan							

2.9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	47,759 ,127	48,218 ,818	49,680 ,965,0 0	51,488 ,262	54,474 ,115		
2.9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	0	0	0	0	0		
2.9.3	Penyelesaian izin lokasi	0	0	0	0	0		
2.10	Kependudukan dan Catatan Sipil							
2.10.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,98	0,80	0,83	0,84	0,87	1	(<)
2.10.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,36	0,76	0,89	0,69	0,83	90	(<)
2.10.3	Rasio pasangan berakte nikah	0,50	0,50	0,50	0,52	0,50		
2.10.4.	Kepemilikan KTP	98	80	83	84	87	100	(<)
2.10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	30	32,7	33,8	36,4	39,3		
2.10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	0,50	0,50	0,50	0,52	0,50	Ada	(=)
2.10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sudah	(=)
2.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	12,71	12,99	14,66	12,72	12,85	45	(<)
2.11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	27,51	36,99	36,83	29,72	31,47	24	(<)
2.11.3.	Rasio KDRT	0,07	0,03	0,03	0,05	0,24	3,2	(<)
2.11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	20,30	19,06	18,60	24,54	24,50	0,74	-
2.11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	48,15	47,49	41,59	43,57	43,48	30,0	(>)
2.11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	0,45	0,38	0,36	0,01	0,07	95	(<)
2.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							

2.12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,85	1,82	1,84	1,85	-	2	(>)
2.12.2.	Rasio akseptor KBBaru	84,06	80,26	83,71	76,12	76,48		
2.12.3.	Cakupan peserta KB aktif	30,99	29,32	28,04	28,70	28,50	73,38	(>)
2.12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	2,21	1,84	1,77	1,86	1,86	38,22	(>)
2.13.	Sosial							
2.13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	0	0	0	0	0		
2.13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	4,72	7,80	7,90	12,52	19,4	10	(>)
2.13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0,16	0,21	0,29	0,33	0,55	100	(<)
2.14.	Ketenagakerjaan							
2.14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	6,52	6,94	7,04	7,14	7,22	63,37	(<)
2.14.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0	0	0	0	0		
2.14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	0	0	0	0	0		
2.14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	-	0,45	-	3,18	4,24	15,50	(<)
2.14.5.	Tingkat pengangguran terbuka	17,60	0,32	6,61	5,88	4,29	5,1	(<)
2.14.6.	Keselamatan dan perlindungan	80	80,5	79	87	87	75	(>)
2.14.7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	
2.15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
2.15.1.	Persentase koperasi aktif	72,47	73,37	69,89	71,96	76,72	90	(<)
2.15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	9869	9961	10801	11879	15015	1.105	(>)
2.15.3.	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-	120	

2.15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	9962	10801	10801	11380	15016	90	(>)
2.16	Penanaman Modal							
2.16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	139	110	206	106		4	(<)
2.16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	36.036 .590.0 00	47.114 .260.1 89	53.538 .735. 600	27.336 .147. 039	46.719 .238.7 57	\$890	(>)
2.16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	0,06	3,82	2,82	1,95	-	-	
2.16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Naik 71,28 %	Naik 30,74 %	Naik 13,63 %	Naik 48,94 %	Naik 71,17 %		
2.17.	Kebudayaan							
2.17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	3	3	3	6	8	(<)
2.17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	2	8	(<)
2.17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	558	558	558	558	1993		(>)
2.18.	Kepemudaan dan Olahraga							
2.18.1.	Jumlah organisasi pemuda	35	35	35	35	35	35	
2.18.2.	Jumlah organisasi olahraga	26	26	26	26	26	26	(=)
2.18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	2	2	2	2	2	6	(<)
2.18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	2	6	5	5	6	10	(<)
2.18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	5	5	6	6	6	2	(>)
2.18.6.	Lapangan olahraga	29	29	29	29	29		
2.19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
2.19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5	5	5	5	6	7	(<)

2.19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	2	3	3	3	6		
2.20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
2.20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3,89	8,67	9,59	12,82	16,35	2,08	(> melampaui
2.20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	75,84	75,06	73,50	46,83	46,83	35,72	(>)
2.20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	2,97	(<)
2.20.4.	Pertumbuhan ekonomi							
2.20.5.	Kemiskinan	14,04	12,87	12,56	11,50			
2.20.6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	(=)
2.20.7.	Penegakan PERDA	21,74	54,69	65,50	93,75	100	100	(=)
2.20.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari	1x dalam sehari	3 x dalam sehari	(<)
2.20.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	47,14	40,94	30,08	82,50	89,29	0,90	(>)
2.20.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,76	0,75	0,73	0,41	0,41	32,29	(<)
2.20.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,0022	0,0022	0,0022	0,0030	0,0037	55	(<)
2.20.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	30	30	30	30	30	30	(=)

2.20.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100	100	100		
2.20.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	-	ada	ada	ada	ada		
2.20.15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	ada	ada	Tidak ada	ada		
2.21.	Ketahanan Pangan							
2.21.1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		(=)
2.21.2.	Ketersediaan pangan utama	105	112	130	129	141	124	(>)
2.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	7	7	7	7	7	12	(<)
2.22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	5	6	6	7	10	3	(>)
2.22.3.	Jumlah LSM	40	40	68	75	75	75	(=)
2.22.4.	LPM Berprestasi	75	75	80	85	90	90	(=)
2.22.5.	PKK aktif	95	90	95	98	99	100	(<)
2.22.6.	Posyandu aktif	89	89	93	98	99	100	(<)
2.22.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	35	35	50	75	76	25	(>)
2.22.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat							
2.23.	Statistik							
2.23.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	
2.23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	

2.24.	Kearsipan							
2.24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	100	100	100	100	100	100	=
2.24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	1	5	<
2.25.	Komunikasi dan Informatika							
2.25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	5	5	5	5	5		
2.25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,057	0,08	0,094	0,14	0,184		
2.25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	15	15	15	15	24		
2.25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	5	3	3	3	3		
2.25.5.	Web site milik pemerintah daerah	1	2	4	5	5		
2.25.6.	Pameran/expo	1	1	1	1	1		
2.26.	Perpustakaan							
2.26.1.	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1	1	=
2.26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	42.219	37.634	42.439	40.647	45.708	136.641	<
2.26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	43.389	47.341	52.173	56.681	56.765	344.681	<
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
2.1.	Pertanian							
2.1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	57,10	57,13	59,01	59,45		52,25	(>)
2.1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	15,13	13,42	12,17	12,86			
2.1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	0,47	0,47	0,42	0,40			

2.1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	320.62 9,40	330.72 8,70	366.44 6,00	445.27 9,10		7.586,93	(>)
2.1.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	-	-	-	-			
2.1.5.	Cakupan bina kelompok petani	60	240	120	123			
2.2.	Kahutanan							
2.2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	-	1.072, 64	1.293, 84	1.267, 25	375,45		
2.2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	47.665 ,52	46.680 ,42	46.679 ,77	43.045 ,17	42.775 ,76		
2.2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,14	0,13	0,12	0,10	-	150,38	(>)
2.3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
2.3.1.	Pertambangan tanpa ijin	36,75	34,32	13,57	39,63	62,64		
2.3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0,70	0,77	0,83	0,96	0,62		
2.4.	Pariwisata							
2.4.1.	Kunjungan wisata	4519	4743	4129	4553	6199		
2.4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	32.131 ,86	42.068 ,55	39.957 ,89	36.942 ,68	24.960 ,73		
2.5.	Kelautan dan Perikanan							
2.5.1.	Produksi perikanan	32.131 ,86	42.068 ,55	39.957 ,89	36.942 ,68	24.960 ,73		
2.5.2.	Konsumsi ikan	44,30	44,80	45,67	46,12	49,45	40	(>)
2.5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	87	107	138	151	160		
2.5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	458	640	2020	2301	26490		
2.6.	Perdagangan							
2.6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	1,7	2,5	3,9	4,3	4,8	18	(<)

2.6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	-	-	-	-	-	-	
2.6.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	40	45	58	68	75		(<)
2.7.	Perindustrian							
2.7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	3,30	3,14	3,04	2,80	2,78	12,48	(<)
2.7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	2,07	2,06	2,01	1,89			(<)
2.7.3.	Pertumbuhan Industri.	7137	7163	7163	8074	8074		(<)
2.7.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	947	1084	1084	1085	1085		(<)
2.5.	Ketransmigrasian							
2.5.1.	Transmigran swakarsa	0	0	0	0	0	NA	
2.5.2.	Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB							
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	-	-	211.25 0	-			
1.1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	-	-	138.27 6	-			
1.1.3.	Produktivitas total daerah							
2.1.	Pertanian							
2.1.1.	Nilai tukar petani							
2.1.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							

3.1.	Perhubungan							
3.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,009	0,006	0,004	0,003	0,002		
3.1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	123.12 5	124.20 6	124.85 3	126.08 5	128.74 4		
3.1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	350.95 9	328.42 9	417.92 3	401.34 2	369.17 5		
4.1.	Penataan Ruang							
4.1.1.	Ketaatan terhadap RTRW							
4.1.2.	Luas wilayah produktif							
4.1.3.	Luas wilayah industri							
4.1.5.	Luas wilayah banjir							
4.1.6.	Luas wilayah kekeringan							
4.1.7.	Luas wilayah perkotaan							
5.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
5.1.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	2	2	3	3	4		
5.1.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	1	1	1	1	1		
5.1.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	58	58	58	66	59		
5.1.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	12	15	16	18	18		
6.1.	Lingkungan Hidup							
6.1.1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	35,8	37,04	38,28	44,37	54,07	100	(<)
6.1.2.	Komunikas dan Informatika							

6.1.3.	Rasio ketersediaan daya listrik	7.680	7.680	7.710	10.258	10.578		
6.1.4.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	47,28	51,51	58,72	62,76	63,34		
6.1.5.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	41,66	41,32	40,61	40,25	41,2		
III	Fokus Iklim Berinvestasi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Angka kriminalitas	0,0024	0,0029	0,0037	0,0030	0,0032		
1.2.	Jumlah demo	10	4	11	10	5		
1.3.	Lama proses perijinan	7	7	7	10	10		
1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	33	33	37	37	37		
1.5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	-	2	-	1		
1.6.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa							
IV	Fokus Sumber Daya Manusia							
1	Ketenagakerjaan							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	50,04	52,10	67,20	70,14	69,16		
1.2.	Rasio ketergantungan	62,19	62,21	62,20	58,25	-		

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam Bab ini diuraikan dua hal yang mencakup permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis. Permasalahan pembangunan daerah adalah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan isu strategis adalah pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dengan memperhatikan berbagai regulasi atau perangkat aturan serta adanya perkembangan dan terjadinya perubahan lingkungan strategis selama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir, maka di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020, ada beberapa permasalahan dan isu-isu yang sangat mendasar untuk dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk mendukung agenda utama pembangunan kurun waktu lima tahun yang akan datang yaitu:

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk narasi secara sistematis sesuai bidang urusan yang terpilih atau sesuai dengan jenis permasalahan yang dianggap krusial.

Tabel

(Identifikasi Permasalahan dan Penentuan Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar)

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
I. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi				
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian				
1.1.	Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan ekonomi sebesar 9,18 berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan	Pertumbuhan ekonomi masih didominasi faktor konsumsi sementara faktor investasi sangat minim	Peningkatan kegiatan ekonomi untuk menopang peningkatan dan kemampuan daya beli masyarakat
1.2.	PDRB per Kapita	PDRB Perkapita cukup signifikan dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih berada jauh dibawah PDRB Perkapita Provinsi Sul-Sel dengan besaran kontribusi hanya sekitar 1,08 % terhadap PDRB Perkapita Sul-Sel	Belum optimalnya peningkatan nilai produksi masing-masing sektor/kelompok usaha	Optimalisasi peningkatan nilai produksi serta penyediaan lapangan kerja baru
1.3.	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan	Hingga Tahun 2014, jumlah fakir miskin/keluarga miskin sebanyak 5.686 keluarga atau turun sekitar 11,50 % terhadap jumlah penduduk.	Masih terbatasnya lapangan kerja untuk diakses oleh masyarakat	Menyediakan lapangan kerja baru serta mengembangkan kewirausahaan melalui optimalisasi pengembangan komoditas unggulan daerah kabupaten
1.4.	Angka kriminalitas yang tertangani	Pada tahun 2014, jumlah dan jenis perkara/tindak kriminalitas yang tertangani mengalami penurunan yaitu sebanyak 593 kasus dari 1.055 kasus pada tahun 2010	Belum optimalnya penanganan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat	1. Optimalisasi penanganan aparat terhadap setiap pengaduan masyarakat, dan 2. Peningkatan partisipasi dan peran masyarakat terhadap segala tindak kejahatan
II. Fokus Kesejahteraan Masyarakat				
1. Pendidikan				
1.1.	Angka Melek Huruf	Angka melek huruf 91,76 % cenderung mengalami peningkatan dan melampaui target Provinsi Sul-Sel 90 %	1. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis hanya penduduk yang berusia 45 tahun ke atas yang tidak mampu lagi untuk dibelajarkan	1. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf dapat dibelajarkan karena adanya minat untuk belajar serta sarana

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			2. Persebaran Penduduk dan kondisi wilayah yang terdiri dari kepulauan, sehingga membuat akses masyarakat terbatas dan bahkan sulit 3. Belum optimalnya kegiatan kelompok belajar masyarakat (KBM) dan kelompok belajar usaha (KBU)	yang disediakan di setiap warga belajar 2. Penambahan sarana dan prasarana pendidikan 3. Pembangunan sekolah jarak jauh satu atap 4. Optimalisasi penyelenggaraan kelompok belajar masyarakat (KBM) dan kelompok belajar usaha (KBU)
1.2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	(>)		Pemerataan akses layanan, sarana dan prasarana pendidikan di setiap kecamatan
1.3.	Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi kasar Tahun 2014 106,14, dan cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya		Peningkatan Kesadaran akan kebutuhan pendidikan oleh masyarakat, dan keterjangkauan lokasi sekolah yang semakin dekat
1.3.1	Angka partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	(<)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga sebahagian anak usia sekolah dasar lebih memilih untuk berkecimpung membantu orang tua mencari nafkah	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya pembangunan SD-SMP Satu Atap, Pembentukan lembaga Paket A, serta pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan
1.3.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	(<)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga sebahagian anak usia sekolah dasar lebih memilih untuk berkecimpun membantu orang tua mencari nafkah	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya pembangunan SD-SMP Satu Atap, Pembentukan lembaga Paket B, serta pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan
1.3.3	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/Paket C	(>)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga sebahagian anak usia sekolah dasar lebih memilih untuk	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya pembangunan USB SMA dan SMK, Pembentukan lembaga

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			berkecimpun membantu orang tua mencari nafkah di laut	Paket C, serta pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan
1.4.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	Angka Pendidikan yang Ditamatkan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2012 sebesar 27 %, meningkat menjadi 28 % di tahun 2013 dan 2014, dan kembali menurun pada tahun 2015 sebesar 20%.	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi geografis yang terdiri dari kepulauan sehingga sebahagian tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Pembangunan sarana dan prasarana serta akses dan layanan pendidikan yang sudah ada di setiap kecamatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa memperoleh ijazah yang lebih tinggi sebelumnya.
1.5.	Angka Partisipasi Murni			
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	(=)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga sebahagian anak usia 7-12 tahun di sekolah dasar lebih memilih untuk berkecimpun membantu orang tua mencari nafkah	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya pembangunan SD-SMP Satu Atap, Pembentukan lembaga Paket A
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	(>)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga sebahagian anak usia 13-15 tahun lebih memilih untuk berkecimpun membantu orang tua mencari nafkah	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya pembangunan SD-SMP Satu Atap, Pembentukan lembaga Paket B
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C	(>)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga sebahagian anak usia 16-18 tahun lebih memilih untuk berkecimpun membantu orang tua mencari nafkah	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya pembangunan USB SMA dan SMK, Pembentukan lembaga Paket C
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi			
2.2.	Angka Usia Harapan Hidup			
2.3.	Persentase Balita Gizi buruk	Persentase Balita Gizi buruk mengalami penurunan, pada tahun 2012 sebesar 1,27, dan menurun masing-masing menjadi 0,06 dan 0,08 pada tahun 2014		Peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
3.	Pertanahan			
III.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga			
1.	Kebudayaan			
1.1.	Jumlah grup kesenian dan kebudayaan	Jumlah Grup yang ada dari tahun ke tahun semakin bertambah, dan di Tahun 2014 sbanyak 6 Grup	1. Kurangnya sosialisasi tentang pembentukan secara resmi grup kesenian 2. Grup kesenian yang ada berlangsung kontemporer	1. Keterlibatan masyarakat 2. Sosialisasi tentang pengelolaan sanggar seni 3. Meningkatnya event festival seni dan budaya 4. Pembinaan dari pemerintah daerah
1.2.	Jumlah Gedung	Belum ada	Keterbatasan dana dan lokasi strategis	Koordinasi antara stakeholder
2.	Pemuda dan Olahraga			
1.1.	Jumlah Klub Olah raga	Jumlah klub olah raga di Tahun 2015 sebanyak 207 klub	Kurangnya minat masyarakat terhadap olah raga	Meumbuhkembangkan minat masyarakat terhadap olah raga
1.2.	Jumlah Gedung Olahraga	Belum ada?	Tidak ada sarana dan prasarana yang memadai	Memberikan sarana dan prasarana yang memadai
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
I.	Fokus Layanan Urusan Wajib			
1.	Pendidikan			
1.1.	Pendidikan dasar			
1.1.1.	Angka Partisipasi Sekolah	(>) Angka partisipasi Sekolah Dasar terus mengalami peningkatan dari 882 pada tahun 2011 menjadi 988 pada tahun 2015 (target 97,63)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga sebahagian anak usia sekolah lebih memilih untuk berkecimpun membantu orang tua mencari nafkah ?	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya pembangunan Satu Atap, unit sekolah baru (USB), pembentukan lembaga Paket A dan Paket B.
1.1.2.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	(<) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah tahun 2015 sebesar 92,76 (target 153, 08)	Faktor kondisi alam dan penduduk yang terdiri dari kepulauan sehingga pembangunan akses dan layanan pendidikan untuk setiap desa belum bisa terjangkau semua	Pembangunan akses dan layanan pendidikan di setiap kecamatan sehingga setiap kecamatan ada jenjang pendidikan SD dan SMP
1.1.3.	Rasio Guru/Murid	Rasio Guru/Murid meningkat dari tahun 2014 sebesar 1041,25 menjadi 1064,89 pada tahun 2015		Tersedianya pendidik di sekolah yang sesuai dengan standar pelayanan minimal

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	Rasio guru/murid per kelas rata-rata meningkat dari tahun 2014 sebesar 850 menjadi 875,1 pada tahun 2015		Tersedianya guru kelas dan guru mata pelajaran yang sesuai dengan standar pelayanan minimal
1.2.	Pendidikan Menengah			
1.2.1.	Angka PARTisipasi Sekolah	(>)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga sebahagian anak usia sekolah lebih memilih untuk berkecimpun membantu orang tua mencari nafkah di laut	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya pembangunan Satu Atap, unit sekolah baru (USB), pembentukan lembaga Paket C
1.2..2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	(<)	Faktor kondisi alam dan penduduk yang terdiri dari kepulauan sehingga pembangunan akses dan layanan pendidikan untuk setiap desa belum bisa terjangkau semua	Pembangunan akses dan layanan pendidikan di setiap kecamatan sehingga setiap kecamatan ada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	Rasio guru terhadap murid menurun dari tahun 2014 sebesar 608 menjadi 554 pada tahun 2015		Tersedianya pendidik disekolah yang sesuai dengan standar pelayanan minimal
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata menurun dari tahun 2014 sebesar 367 menjadi 353 pada tahun 2015	Masih adanya unit sekolah baru yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal	Tersedianya guru kelas dan guru mata pelajaran yang sesuai dengan standar pelayanan minimal
1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) meningkat dari tahun 2013 sebesar 114.341 menjadi 115,495 pada tahun 2014		Tersedianya lembaga pendidikan non formal bagi penduduk usia 15 tahun ke atas untuk dapat dibelajarkan sehingga bisa bebas dari buta aksara
1.3.	Fasilitas Pendidikan			
1.3.1.	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	(>) Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik pada tahun 2015 sebesar 78 telah melampaui standar (61,86)		Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.3.2.	Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	(<) Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik pada tahun 2015 sebesar 71 (masih dibawa standar 79,94)	Masih adanya unit sekolah baru yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia %Dini (PAUD)	(<)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga masih banyak orang tua yang kurang faham tentang pendidikan anak usia dini serta motivasi untuk memberikan pendidikan kepada anaknya.	Tersedianya sarana dan prasarana serta akses dan layanan pendidikan sudah ada di setiap desa dan kecamatan untuk menempuh pendidikan.
1.5.	Angka Putus Sekolah			
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	(<)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga masih banyak orang tua yang kurang faham tentang pendidikan anak usia dini serta motivasi untuk memberikan pendidikan kepada anaknya.	tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya jenjang pendidikan SD-SMP Satu Atap, unit sekolah baru (USB), pembentukan lembaga Paket A
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	(<)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga masih banyak orang tua yang kurang faham tentang pendidikan anak usia dini serta motivasi untuk memberikan pendidikan kepada anaknya.	tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya jenjang pendidikan SD-SMP Satu Atap, unit sekolah baru (USB), pembentukan lembaga Paket B
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	(>)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga masih banyak orang tua yang kurang faham tentang pendidikan anak usia dini serta motivasi untuk memberikan pendidikan kepada anaknya.	tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya jenjang pendidikan SD-SMP Satu Atap, unit sekolah baru (USB), pembentukan lembaga Paket C

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.6.	Angka Kelulusan			
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(=) Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 100 %	Meningkatnya mutu tenaga pendidik /guru	Meningkatnya kompetensi dan mutu pendidikan serta kemampuan guru menyampaikan pembelajaran kepada siswa di sekolah
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(=) Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 100 %	Meningkatnya mutu tenaga pendidik /guru	Meningkatnya kompetensi dan mutu pendidikan serta kemampuan guru menyampaikan pembelajaran kepada siswa di sekolah
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	(=) Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 100 %	Meningkatnya mutu tenaga pendidik /guru	Meningkatnya kompetensi dan mutu pendidikan serta kemampuan guru menyampaikan pembelajaran kepada siswa di sekolah
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(<)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga masih banyak siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya pembangunan Satu Atap, unit sekolah baru (USB), pembentukan lembaga Paket A, paket B
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	(>)	Faktor kondisi sosial ekonomi dan kondisi alam yang terdiri dari kepulauan sehingga masih banyak siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih representatif misalnya pembangunan Satu Atap, unit sekolah baru (USB), pembentukan lembaga Paket C
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV meningkat dari tahun 2014 sebesar 73,25 menjadi 73,51 pada tahun 2015	Masih adanya guru yang tidak melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan karena mengingat faktor usia yang sudah tua sehingga tidak mampu mengikuti pendidikan yang lebih tinggi	Minat dan kemampuan guru yang masih mampu untuk melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2.	Kesehatan			
2.1.	Rasio Posyandu per satuan Balita	Rasio Posyandu per satuan Balita belum mencapai target yang diharapkan yaitu baru mencapai 2,88% ?	Pembangunan Posyandu tidak merata di setiap Desa	Kader Aktif Aktif Desa (Desa Siaga) Adanya Kader Aktif di setiap Desa

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
2.2.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu persatuan penduduk mencapai 66,99	SDM yang masih kurang terutama dokter dan tenaga teknis Kesehatan lainnya	semua Kecamatan sudah ada Puskesmas dan semua desa sdh ada Pustu/Poskesdes
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio rumah sakit persatuan penduduk mencapai 0,74	Kurangnya Tenaga Dokter Ahli	Tersedianya Fasilitas Pendukung
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio dokter persatuan penduduk meningkat mencapai 22,33	Dokter terfokus di Kota	Tersedia Dokter di setiap Puskesmas
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio tenaga medis per satuan penduduk mencapai 189,8	Tenaga medis terfokus di Puskesmas Kota dan RSU Masih minimnya minat tenaga medis khususnya di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar	1. Penempatan tenaga medis dengan status PTT/magang 2. Meningkatkan insentif tenaga medis khususnya yang ditempatkan di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2015 sebesar 99,52 dan telah melampaui target	Transportasi yang belum memadai, kendaraan darat maupun Laut Kurangnya proporsi tenaga kebidanan yang tersebar dan memiliki keahlian dalam mengidentifikasi komplikasi khususnya di pulau	1. Penyediaan alat yang memadai 2. Peningkatan kapasitas bidan yang akan ditempatkan pada setiap puskesmas dan pustu
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Data capaian tentang cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 87,28	Kemitraan Bidan dan Dukun Belum Optimal serta Masih Terbatasnya Bidan terlatih	1. Pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun 2. Peningkatan Kompetensi Bidan melalui Pendidikan dan Pelatihan 3. Peningkatan status puskesmas sebagai puskesmas pondok
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Capaian tahun 2014 terkait Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 78,41	Belum Meratanya petugas terlatih di setiap desa/kelurahan	Pemerataan/pendistribusian petugas terlatih di setiap desa/kelurahan
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase capaian cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan pada tahun 2015 mencapai 100% atau sama dengan target yang diinginkan	Belum optimalnya pembinaan gizi anak dan gizi masyarakat	1. Optimalisasi pembinaan gizi anak dan gizi masyarakat 2. Pemerataan pendistribusian petugas terlatih di setiap desa dan kelurahan

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persentase capaian Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 53,8 atau masih dibawah target (70)	masih rendahnya pencarian aktif kasus TB di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM : Sumber daya manusia yang terlatih tentang TB di setiap PKM tersedia 2. Dana untuk pencarian kasus TB di PKM dianggarkan 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memerikasakan diri ke sarana kesehatan 4. Pemeriksaan diri dan penanggulangan oleh petugas kesehatan
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase capaian Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sama dengan target RPJMD (100%)	Mobilitas penduduk dari dan ke Daerah Endemis tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memerikasakan diri ke sarana kesehatan 2. Pemeriksaan diri dan penanggulangan oleh petugas kesehatan 3. Pengadaan alat laboratorium dan mesin fogging
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persentase capaian cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100 atau telah menyamai target RPJMD	Belum optimalnya penyediaan operasi, persalinan, dan pengangkutan pasien ke Rumah Sakit rujukan	Tersedianya sarana dan prasarana serta pengangkutan ke rumah sakit untuk diakses oleh masyarakat Bebas Biaya Rujukan
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	Cakupan kunjungan bayi hingga tahun 2015 mencapai angka 99,95% dan masih kurang dari target RPJMD	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDITK) dan terbatasnya jumlah kebutuhan sarana kesehatan	Optimalisasi pelayanan kesehatan melalui stimulasi deteksi intervensi tumbuh kembang dan manajemen terpadu balita sakit oleh tenaga kesehatan
2.14.	Cakupan Puskesmas	Cakupan puskesmas hingga tahun 2015 mencapai angka 287,52	Faktor geografis sangat dominan menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan puskesmas terbatas	Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya serta peningkatan

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
				pelayanan kesehatan melalui puskesmas keliling
2.15.	Cakupan Puskesmas Pembantu	Persentase cakupan puskesmas pembantu hingga tahun 2015 mencapai angka 219,9% dari target 100% didalam RPJMD	Faktor geografis sangat dominan menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan puskesmas pembantu terbatas SDM tidak merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya serta peningkatan pelayanan kesehatan melalui puskesmas keliling 2. Penempatan perawat dan bidan masing-masing satu di tiap puskesmas pembantu
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi Panjang (m) jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	(<) Proporsi Panjang (m) jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik 398,76 (target 605,49)	Pesatnya pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan daya dukung dan kapasitas jalan yang signifikan	Peningkatan dan penambahan kapasitas jalan untuk mengimbangi pertumbuhan kendaraan
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	(<) Rasio Jaringan Irigasi 1:15 pada tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya penyediaan biaya OP jaringan irigasi - Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber air baku untuk pembangunan irigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya penyediaan biaya OP yang memadai setiap tahunnya 2. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air baku
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 60,06 % atau kurang dari target RPJMD (75)	<ol style="list-style-type: none"> 1. masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi rumah yang baik bagi kesehatan 2. Masyarakat terkedala soal biaya pembuatan sarana sanitasi karena penghasilan yang minim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan sanitasi terhadap rumah tangga dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS 2. Memperbanyak sosialisasi di lingkungan permukiman akan pentingnya sanitasi rumah dan lingkungan 3. Meningkatkan anggaran pembuatan sanitasi untuk masyarakat miskin
3.5.	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	Terdapat 145,39% tempat pemakaman umum dibanding dari target atau standar Tahun 2015 sebesar 100%.	Perlunya penataan kawasan pemakaman.	Kawasan pemakaman berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Terdapat 5,29% tempat pembuangan sampah dibanding dari target atau standar Tahun 2015 sebesar 100% masih perlunya penambahan tempat pembuangan sampah sebesar 94,71%	Perlunya penambahan TPS sehingga sampah tidak berserakan.	Penambahan container sebanyak 3.016 buah atau Tong Sampah sebanyak 3016 x 14 buah.
3.7.	Rasio rumah layak huni	Terdapat 74,77% Rumah Layak Huni dibanding dari target atau standar Tahun 2015 sebesar 95 %	Masih terdapat rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni sebesar 20,23 % akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan.	Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitas peningkatan kualitas perumahan dan fasilitas MBR melalui penyediaan Rusunawa
3.8.	Rasio Pemukiman layak Huni	Terdapat 75% Permukiman Layak Huni dibanding dari target atau standar Tahun 2015 sebesar 95% masih terdapat 20% yang belum tertangani.	Masih terdapat permukiman yang tidak layak huni sebesar 20 % akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan.	1. Penataan permukiman 2. Perbaikan akses sanitasi lingkungan
3.9	Panjang jalan dilalui Roda 4 (M)	Panjang jalan dilalui Roda 4 (M) mencapai angka 548,81 atau belum mencapai target RPJMD	Program prioritas SKPD jarang terakomodir di APBD	Program prioritas SKPD Harus terakomodir di APBD
3.10	Jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimaldilalui roda 4)	Jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimaldilalui roda 4) pada tahun 2015 yaitu 402,69	Program prioritas SKPD jarang terakomodir di APBD	Program prioritas SKPD Harus terakomodir di APBD
3.11	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM /Jam)	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM /Jam) 407,18 atau belum mencapai target RPJMD	Program prioritas SKPD jarang terakomodir di APBD	Program prioritas SKPD Harus terakomodir di APBD
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (minimal1,5 m)		Lahan bermasalah	Kesadaran masarakat tentang trotoar dan drainase sangat rendah
3.15	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Cakupan Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat sebesar 72,03%	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya genangan dan fungsi drainase yang tidak maksimal	Perlunya pembinaan tentang kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada drainase agar aliran air tidak tersumbat

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
3.16.	Pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	Pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota pada tahun 2015 sebesar 16.364	Pembebasan lahan Program prioritas pembangunan penahan longsor SKPD jarang terakomodir di APBD	1. Partisipasi masyarakat 2. Program prioritas pembangunan penahan longsor SKPD harus terakomodir di APBD
3.17.	Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 54,73%	Belum terpenuhinya seluruh lahan persawahan masuk dalam status kewenangan pemerintah kabupaten	Perlunya revisi kembali mengenai status kewenangan luas areal persawahan kabupaten
4.	Perumahan			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	(<)	Kurang Sumber Mata Air	1. Pemberdayaan Masyarakat u/ perlindungan dan pengelolaan sumber-sumber mata air 2. Advokasi & Sosialisasi 3. Peningkatan kualitas dan layanan PDAM & Pengembangan Teknologi tepat guna & penyediaan infrastruktur air bersih
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	(<)	Keterbatasan daya dan kemampuan masyarakat	Peningkatan daya dan perlunya pemerintah memfasilitasi rumah tangga miskin untuk membiayai pemasangan listrik terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
4.3.	Rumah Tangga bersanitasi	(<)	Kurang Kesadaran masyarakat Faktor Ekonomi/Kemiskinan, Kurang Regulasi terkait Sanitasi Lingkungan	1. Melaksanakan Advokasi & sosialisasi bidang penyehatan lingkungan 2. Pengadaan Sarana Sanitasi 3. Peningkatan & Pengembangan Teknologi Tepat Guna terkait Sanitasi 4. Penyusunan Regulasi tentang baku mutu Kesehatan Lingkungan 5. Pemberdayaan Masyarakat u/ pengembangan Sanitasi Lokal

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	Rasio Lingkungan pemukiman kumuh pada tahun 2014 1:59		
4.5.	Rumah layak huni	Terdapat 74,77% Rumah Layak Huni dibanding dari target atau standar Tahun 2015 sebesar 95 %	Masih terdapat rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni sebesar 20,23 % akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan.	Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitas peningkatan kualitas perumahan dan fasilitas MBR melalui penyediaan Rusunawa
5.	Penataan Ruang			
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Terdapat 12,97% ruang terbuka hijau dibanding dari target atau standar Tahun 2015 sebesar 20% dan masih membutuhkan 7,03% untuk ruang terbuka hijau.	Perlunya penambahan luas terbuka hijau.	Penambahan luas terbuka hijau seluas 3.456,16 M ² (7,03%).
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Terdapat 60,87% bangunan yang ber IMB dibanding dari target atau standar Tahun 2015 sebesar 100%, masih kurangnya bangunan yang memiliki IMB.	Kurangnya minat dalam hal pengurusan IMB karena mahal,	Evaluasi tarif IMB
6.	Perencanaan Pembangunan			
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	(=) Dokumen RPJPD sesuai Perda No. 10 tahun 2009 Tentang RPJPD kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2005-2025	Optimalisasi penerapan kebijakan pembangunan antar tingkat pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan	1. Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan 2. Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkat pemerintah
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	(=)		1. Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengacu pada

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		Dokumen RPJMD sesuai Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang RPJPD kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010-2015	Optimalisasi penerapan kebijakan pembangunan antar tingkat pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan	aturan dalam menyusun dokumen perencanaan 2. Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkat pemerintah 3.
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	(=) Dokumen RKPD sesuai Perbup No. 16 Tahun 2015	Optimalisasi penerapan kebijakan pembangunan antar tingkat pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan	1. Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan 2. Optimalisasi dan peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkat pemerintah
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	(<)	Konsistensi RPJMD ke dalam RKPD belum maksimal	Bappeda telah mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, tetapi dalam penjabaran RKPD masih banyak intervensi yang mempengaruhi
7.	Perhubungan			
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2014 sebesar 126.085 dan meningkat menjadi 128.744 pada tahun 2015	Masih banyak ruas jalan di wilayah pedesaan yang belum layak dilalui oleh angkutan umum	Perlunya peningkatan kapasitas jalan
7.2.	Rasio ijin trayek	Rasio ijin trayek pada tahun 2015 sebesar 0,096	Tingkat Pertumbuhan Armada yang tidak Seimbang dengan Jumlah Pemakai Jasa	Penertiban Kembali Ijin Trayek
7.3.	Jumlah uji Kir angkutan umum	Jumlah uji Kir angkutan umum pada tahun 2014 sebesar 142 dan meningkat menjadi 150 pada tahun 2015	Fasilitas pengujian Kendaraan yang belum memadai sehingga Pemilik Kendaraan Cenderung melakukan Uji Kendaraan di Luar Daerah	Perlunya Pengadaan Alat Uji Kendaraan yang memadai
7.4.	Jumlah pelabuhan laut/udara/Terminal Bus	Jumlah pelabuhan laut/udara/Terminal Bus pada tahun 2015 sebanyak 7/2/1/1	Sarana Pendukung Fasilitas Pelabuhan Laut/Ferry/Udara/ Terminal Bus Belum Lengkap	Perlunya Pengadaan Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut/Ferry/Udara/ Terminal Bus

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
7.5.	Angkutan Darat	Angkutan Darat pada tahun 2015 sebanyak 15.070	Tingkat Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pendidikan yang cukup tinggi menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap angkutan darat	Peningkatan fasilitas jalan dari desa ke Ibukota Kabupaten serta peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas.
7.6.	Jumlah Kepemilikan Kir Angkutan Umum	Konsistensi Kepemilikan KIR angkutan umum cenderung berfluktuasi dari tahun ke Tahun dan pada tahun 2015 sebesar 152	1. Pemilik Kendaraan Cenderung melakukan Uji Kendaraan di Luar Daerah 2. Belum adanya PERDA yang mengatur tentang Uji KIR Kendaraan Roda 3 (Tiga)	Perlunya Revisi PERDA tentang Retribusi Jasa Umum terkait Uji Kelayakan Kendaraan
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) \pm 5 Jam dan masih di bawah target (\pm 20 menit)	Fasilitas pengujian Kendaraan yang belum Memadai	Perlunya Pengadaan Alat Uji Kendaraan
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Tidak adanya standar keseragaman biaya uji kelayakan angkutan umum	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan umum lebih tinggi dari daerah lain	Perubahan Tarif Uji Kelayakan Kendaraan
7.9.	Jumlah Rambu-Rambu lalu Lintas yang Terpasang (pemasangan Rambu)	(>) Jumlah Rambu-Rambu lalu Lintas yang Terpasang (pemasangan Rambu) telah melampaui target yaitu sebesar 551	Masih banyak ruas jalan yang belum memiliki rambu -rambu	Perlunya Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu
8.	Lingkungan Hidup			
8.1.	Persentase penanganan sampah	(<) Persentase penanganan sampah pada tahun 2014 sebesar 49,7% dan masih dibawah standar (82,40)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah armada pengangkut yang terbatas - Pemahaman masyarakat masih rendah tentang masalah pemilihan sampah - Bank sampah yang ada belum optimal penataannya sehingga masyarakat masih kurang yang menabung di bank sampah - Sampah yang dihasilkan hanya sebagian kecil yang ditangani, karena masyarakat belum paham akan pentingnya bank sampah dan pengelolaan sampah (daur ulang) 	Optimalisasi bank sampah melalui kegiatan sosialisasi dan bimtek pengelolaan sampah

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
8.2.	Persentase penduduk berakses air minum	(Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2015 sebesar 81,50 dan masih dibawah target (100%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang sumber mata air yang akan dikelola 2. Kurangnya Dukungan Pendanaan dari PEMDA 3. Akses ke sumber air sulit 4. Debit air pada sumber mata air tertentu kurang 5. Pengelolaan pada sumber air belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Mata Air (RTA) 2. Peningkatan anggaran terkait Monev serta pendampingan teknis Penyehatan Lingkungan 3. Advokasi & Sosialisasi 4. Peningkatan & Pengembangan Teknologi tepat guna & Modifikasi sarana Kesehatan Lingkungan 5. Penguatan Kelembagaan Instansi Teknis terkait 6. Melakukan penanaman pada Daerah-daerah sumber air 7. Prose destilasi secara alami dengan melakukan penanaman sukun 8. Tata kelola air
8.3.	Persentase luas permukiman yang tertata			<ol style="list-style-type: none"> 1. MCK terpadu (IPAL komunal) 2. Program kali bersih, pengelolaan sampah terpadu (4R)
8.4.	Pencemaran status mutu air	(Pencemaran status mutu air pada tahun 2015 sebesar 78 %	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai - Belum optimalnya penggunaan IPAL pada industri-industri rumah tangga seperti pabrik industri - Kontruksi septic tank yang tidak layak - Kondisi tanah yang berpasir - Topografi yang miring 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan persampahan pada permukiman sekitar bantaran sungai 2. Optimalisasi penggunaan IPAL
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air pada tahun 2015 sebesar 25,43%	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terasering - Alih fungsi lahan pada daerah-daerah rawan longsor 	Pelarangan pembangunan bangunan di daerah rawan longsor

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	(<) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun 2015 masih sangat minim yaitu hanya sebesar 3,9% jauh dibawah standar propinsi sebesar 100%	Belum ada pegawai pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan Pegawai penyidik Pegawai negeri sipil (PPLH)	Sosialisasi tentang AMDAL
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	(>) Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk pada tahun 2015 sebesar 1,03 (target: 0,00138)	- Belum ada tempat pembuangan sampah skala kota dan kecamatan - tenaga pengangkut sampah kurang	1. penanganan sampah pada sumbernya 2. - sarana dan prasaana pngelolaan sampah
8.8.	Penegakan hukum lingkungan	(=)		
10.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
10.1.	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	(<)	1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepemilikan KTP 2. Kondisi geografis Wilayah kepulauan 3. Sarana pelayanan keliling belum memadai 4. Anggaran yang kurang untuk jebol (jemput bola)	1. Partisipasi aktif masyarakat 2. Sarana pelayanan keliling yang memadai 3. Anggaran yang mendukung
10.2	Rasio Bayi ber akte kelahiran	(<)	- Kurangnya kepedulian /kesadaran masyarakat khususnya Kepemilikan akte kelahiran belum dianggap penting oleh sebagian orang tua - Kondisi geografis wilayah kepulauan - Fasilitasi Pemdes yang kurang - Anggaran yang kurang untuk jebol (jemput bola)	1. Menggratiskan Kepengurusan Akte Kelahiran sehingga dapat meningkatkan Partisipasi aktif masyarakat 2. Pembentukan UPTD di Kecamatan 3. Fasilitasi Pemdes melalui RT/RW, Kadus, Petugas Registrasi
10.3.	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2015 sebesar 0,50	- Minimnya masyarakat yang melaporkan pernikahannya dikarenakan Kurangnya kepedulian /kesadaran masyarakat	Menggratiskan Kepengurusan Akte Nikah sehingga dapat meningkatkan Partisipasi aktif masyarakat

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
10.4	Kepemilikan KTP	(<) Kepemilikan KTP pada tahun 2015 sebesar 87% (target 100%)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepedulian /kesadaran masyarakat - Kondisi geografis wilayah kepulauan - Sarana pelayanan keliling belum memadai - Anggaran yang kurang untuk jebol (jemput bola) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi aktif masyarakat 2. Sarana pelayanan keliling yang memadai 3. Anggaran yang mendukung
10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2015 sebesar 393	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kepedulian/kesadaran masyarakat - (Kepemilikan akte kelahiran belum dianggap penting oleh sebagian orang tua) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kepemilikan akta kelahiran 2. Partisipasi Aktif Masyarakat 3. Menggratiskan Kepengurusan Akte Kelahiran
10.6	Ketersediaan data base kependudukann skala kabupaten	(=)	Tersedianya database kependudukann skala kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi SIAK 2. Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan Aparat Pemerintah dalam penyusunan Data Base kependudukan yang berkualitas dan akurat
10.7	Penerbitan KTP nasional berbasis NIK	(=)	KTP Nasional berbasis NIK telah diaplikasikan	Adanya SDM yang dapat mengaplikasikan KTP Nasional berbasis NIK
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak			
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami trend peningkatan dan pada tahun 2015 sebesar 12,85% dan masih dibawah target (45%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan yang antara lain disebabkan oleh terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya terutama di bidang politik, dan publik serta penguasaan di bidang ekonomi 2. Masih rendahnya pemahaman tentang konsep gender oleh pemerintah daerah sebagai mitra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawal kesepakatan pemerintah daerah dalam hal urgensi dan pentingnya melaksanakan strategi pengarusutamaan gender (PUG) untuk meningkatkan kualitas manusia terutama sumber daya manusia perempuan 2. Fasilitasi penyusunan Grand Design pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			kerja atau stakeholders untuk prmbangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
11.2	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	Partisipasi perempuan di lembaga swasta hampir seimbang dengan laki-laki yakni pada tahun 2015 mencapai 31,47% dan telah melampaui target (24%)	Belum dipahaminya strategi pengarusutamaan gender oleh lembaga swasta dan para pengambil kebijakan di daerah yang mengakibatkan terbatasnya kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan di segala bidang pembangunan 2. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan perempuan 3. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.
11.3	Rasio KDRT	(<) Rasio KDRT pada tahun 2015 sebesar 0,98% atau dibawah standar propinsi (3,2%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya fungsi P2TP2A dan forum koordinasi lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak 2. Belum ada tempat/ kantor P2TP2Adi kabupaten kepulauan selayar 	Pengembangan fungsi P2TP2A dan forum koordinasi lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak
11.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Target 0,74%)	Kurangnya sosialisasi tenaga kerja dibawah umur yang belum terlaksana oleh instansi teknis	Pelaksanaan sosialisasi tenaga kerja di bawah umur dan melaksanakan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat oleh lembaga yang menanganinya.
11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	(>) Partisipasi angkatan kerja perempuan di tahun 2015 sebesar 43,48% atau dengan kata lain telah melampaui target (30%)	1. Diperlukan adanya Peraturan Daerah dan beberapa regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai dasar pemecahan masalah untuk menjawab isu-isu gender yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan	1. Di Undangkannya PERDA PUG dan beberapa regulasi sebagai acuan bagi aparat pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			<p>kesejahteraan masyarakat khususnya kaum perempuan</p> <p>2. Kompetensi para perencana dalam pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di daerah belum mampu melihat isu-isu gender dalam kehidupan bermasyarakat dan belum sepenuhnya menggunakan data terpilah sebagai pembuka wawasan</p>	<p>kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah</p> <p>2. Mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan</p> <p>3. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender (ARG), pendampingan ARG dan TOT SDM Penggerak PPRG</p>
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	<p>(<)</p> <p>Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 0,07 dan sudah dibawah standar/target</p>	<p>1. Kurangnya kepedulian pemerintah terhadap perlindungan perempuan dan anak</p> <p>2. Belum maksimalnya tenaga layanan yang mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak pada setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar</p>	<p>1. Adanya kepedulian pemerintah terhadap perlindungan perempuan dan anak</p> <p>2. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>3. Adanya tempat atau sekretariat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang sesuai dengan SPM</p> <p>4. Tersedianya tenaga layanan yang mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/KtA)</p>

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
				5. Adanya koordinasi yang terintegrasi antar instansi yang terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dissosnakertrans, RSUD, Pengadilan, BAPAS, Kemenag, LSM, dll
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (standar 2 anak)	($<$) Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2015 sebesar 1,86 (standar 2 anak)	Kesadaran masyarakat dalam ber-KB kurang	Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan yang diharapkan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat
12.2	Cakupan peserta KB baru (target 100%)	($>$) Cakupan peserta KB baru pada tahun 2015 sebesar 78,22 (target 73,38%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran peserta KB yang ada masih kurang 2. Semakin minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KB. 3. Jumlah tenaga penyuluh KB masih kurang 4. Keterbatasan alat kontrasepsi tersedia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi 2. Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB 3. Revitalisasi program KB 4. Pemenuhan jumlah ideal rasio penyuluh KB 5. Penyediaan dan peningkatan akses alat kontrasepsi
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	($<$) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I pada tahun 2015 sebesar 28,50 (target 38,22%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemberdayaan keluarga 2. Penyaluran bantuan ke desa-desa masih belum merata dan mekanisme penyalurannya perlu di kaji kembali 	Mengoptimalkan pemberdayaan keluarga melalui potensi wilayah, potensi alam dan keahlian secara berkesinambungan
13	Sosial			
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Tidak ada	Belum adanya sarana sosial sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kepulauan Selayar	

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
13.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	(>) PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2015 sebesar 19,4% (target 10)		PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk tahun 2014 dan 2015 sangat meningkat di karenakan adanya program nasional yakni PKH (Program Keluarga Harapan) untuk tahun 2014 sebanyak 1.911 KK dan tahun 2015 sebanyak 2055 KK yang memperoleh bantuan sosial
13.3	Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan sosial	(<) Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan social pada tahun 2015 sebesar 0,55 (target 100)	Belum tercapainya target penanganan PMKS, dikarenakan untuk sementara hanya 2 (dua) jenis PMKS yang tertangani yakni Anak Terlantar dan Anak yang bermasalah dengan Hukum (ABH) karena belum adanya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	
14.	Ketenagakerjaan			
14.1	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	(<) Angka partisipasi angkatan kerja tahun 2015 sebesar 7,22 atau masih dibawah target (63,37)	1. Kurangnya angkatan kerja/pencari kerja yang mendaftar khususnya usia produktif (penduduk usia 15-64 Tahun) sebagai pencari kerja 2. Kurangnya pemahaman/pengetahuan pencari kerja mengenai aturan sebagai ketentuan dalam mendapatkan pekerjaan	1. pelayanan informasi pasar kerja yang optimal, pemberian penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat pencari kerja 2. Penguatan SDM melalui sosialisasi tentang regulasi ketenagakerjaan
14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	(<) Pencari kerja yang ditempatkan sebesar 4,24 masih sangat jauh dibawah standar (15,50%)	1. Kurangnya lapangan kerja yang tersedia 2. Kurangnya pencari kerja yang melapor kembali setelah mendapatkan pekerjaan 3. Kurangnya kemampuan, kecakapan dan keahlian yang dimiliki bagi pencari kerja	1. Penyediaan lapangan kerja di sektor swasta sehingga pencari kerja tidak lagi berorientasi menjadi PNS 2. Adanya pegawai antar kerja lokal (KCL) untuk Kab/Kota yang tugasnya mengawasi, mengatur dan memfasilitasi penempatan

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
				antara pencari kerja dan pemberi kerja 3. Optimalisasi penyelenggaraan pemberian bimbingan dan pelatihan serta pengembangan latihan kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja
14.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	(<) Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2015 sebesar 4,29 % (target 5,1)	1. Lapangan kerja masih sangat kurang 2. Kesempatan kerja masih terbatas 3. kualitas tenaga kerja relatif rendah	1. Pelatihan kerja di perbanyak untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 2. Peran lembaga pelatihan swasta lebih ditingkatkan sebagai pelaksana penyelenggara pelatihan
14.6.	Keselamatan dan perlindungan (%)	(>) Persentase Keselamatan dan perlindungan sebesar 87% dan telah melebihi standar (75)	Belum adanya pegawai PNS yang berfungsi/ bertugas sebagai pengawas ketenagakerjaan	1. Adanya pemantauan yang berkala dari dinas / Bidang terkait tentang perlindungan dan keselamatan kerja 2. Seringnya diadakan sosialisasi tentang perlindungan dan keselamatan kerja kepada para tenaga kerja dan perusahaan baik di sektor formal dan in formal 3. Memfasilitasi para tenaga kerja untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
15.1	Persentase koperasi aktif	(<) Persentase koperasi aktif sebesar 76, dan masih dibawah standar (90)	1. Rendahnya pelaksanaan ART 2. Adanya tunggakan penerima bantuan 3. Kegiatan usaha tidak berjalan	- Kelembagaan yang sehat melalui restrukturisasi - Ada cara bisnis/usaha inti yang dilaksanakan

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	(>) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM sebanyak 2.186, dan telah melampaui standar (1.105)	Pembentukan LKM belum berbadan hukum	- Sosialisasi LKM - Meningkatnya keterampilan warga dalam mengelola UKM secara swadaya
15.3	Jumlah BPR/LKM Gapoktan	Target 120	LPM kapoktan belum berbadan hukum	
15.4	Usaha Mikro dan Kecil	(>) Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 15.016 dan telah melampaui standar (90)	- SDM UMKM rendah	- Pendataan UMKM - Peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan - Adanya peluang masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja (membuka usaha sendiri)
16.	Penanaman Modal			
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	(>) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebesar 106, dan telah melampaui standar (4)	Ketersediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga calon investor membatalkan investasinya	1. Promosi potensi investasi terus ditingkatkan baik dalam maupun luar negeri 2. Membangun jaringan listrik yang memadai 3. Ketersediaan sarana air bersih untuk industri 4. Peningkatan sarana transportasi antar pulau yang memadai
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)	(>) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp) 27.336.147.039,-	Meningkatnya promosi kepariwisataan regional, nasional maupun internasional	5. Kebijakan yang mendukung iklim Usaha yang kondusif 6. Program nasional dan daerah tentang kemudahan perizinan dalam berinvestasi
16.3.	Rasio Daya serap tenaga kerja			
16.4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)			
17.	Kebudayaan			
17.1.	Penyelenggaraan festival / pertunjukan seni dan budaya	(<) Penyelenggaraan festival / pertunjukan seni dan budaya masih dibawah standar (8) yaitu sebanyak 3 kali	1. Keterbatasan dana untuk pelaksanaan festival seni dan budaya	1. Koordinasi antara stakeholderAlokasi anggaran untuk pelaksanaan event seni dan budaya

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			2. Tidak adanya data yang lengkap tentang seni dan budaya daerah yang perlu dikembangkan 3. Minat berkesenian masyarakat yang kurang 4. Kerjasama yang masih kurang dengan pihak luar/sponsor	2. Pembinaan dan penumbuhan minat berkesenian 3. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan festival/pagelaran seni dan budaya sebagai penyandang dana
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	(<) Sarana Penyelenggaraan festival / pertunjukan seni dan budaya masih dibawah standar (8) yaitu sebanyak 2 kali	1. Kurangnya dana untuk pembangunan sarana penyelenggaraan seni dan budaya 2. Kurangnya keterlibatan lembaga seni dan budaya dalam penyediaan sarana dan prasarana	1. Peningkatan alokasi dana penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya 2. Peningkatan peran aktif lembaga seni dan budaya
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (standar 20%)	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 558	Teridentifikasi nya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya baru	1. Pengelolaan rutin terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya oleh pemerintah. 2. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga benda, situs dan kawasan cagar budaya
18.	Kepemudaan dan Olahraga			
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah organisasi pemuda yang ada sebanyak 35	Kurangnya minat pemuda untuk mengikuti OKP yang ada di daerah	Mengadakan sosialisasi tentang minat pemuda terhadap OKP
18.1.	Jumlah organisasi olah raga	(=)		Munculnya kesadaran untuk membentuk olah raga
18.2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 26	Tidak terealisasinya kegiatan kepemudaan karena kurangnya dana pendukung	Memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan kepemudaan berupa dana dari pemerintah dan pihak lain
18.3.	Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga 5 dan masih dibawah standar (10)	Tidak terealisasinya kegiatan olahraga secara keseluruhan karena kurangnya dana pendukung	Memberikan perhatian prioritas terhadap kegiatan olah raga berupa dana dari pemerintah dan pihak lain

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
18.4	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah Gelanggang / balai remaja sebanyak 6 dan telah melampaui target.	Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
18.5	Lapangan olahraga	Jumlah lapangan olah raga tahun 2014 sebanyak 29	Kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada Tahun 2014 sebanyak 5 Kali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimanya pembinaan terhadap ormas, LSM, dan OKP guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah 2. Kurangnya kesadaran pengurus organisasi masyarakat untuk mendaftarkan keberadaannya 3. Masih kurangnya kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam membantu pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara (parpol, Ormas/LSM dan Independent) 2. Koordinasi dengan Kecamatan/kelurahan untuk terus memantau dan mendata rmas/LSM dalam melakukan kegiatannya di wilayahnya 3. Pemerintah terus mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis dan demokrasi dan pemerintah daerah senantiasa bekerja sama dengan pihak LSM/Ormas untuk melaksanakan kegiatan pembangunan
19.2.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah sebanyak 3 kali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku demokrasi 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 3. Masih rendahnya kader partai politik dari kalangan perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Political Wil/kebijaksanaan bupati dan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan 2. Stabilitas politik dan keamanan di kabupaten kepulauan selayar yang kondusif 3. Pemerintah daerah terus mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis dan demokrasi
20.	Otonomi Daerah, Pemerataan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
20.1.	Rasio jumlah pamong praja per 10.000 penduduk	(>) melampaui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada formasi untuk pengangkatan secara khusus dari pemerintah pusat untuk satuan polisi pamong praja 2. Untuk merekrut anggota satuan polisi pamong praja tidaklah muda, karena anggaran terbatas, sedangkan selama ini sebagian besar anggota satuan polisi pamong praja hanya berstatus tenaga kontrak/PTT/Sukarela 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan personil satuan polisi pamong praja sehingga total mencapai 350 oran sesuai permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi Pamong Praja 2. Pengalokasian dana untuk membayar jasa personil satuan polisi pamong praja
20.2.	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk	(>)	Kewenangan Satuan Perlindungan Masyarakat masih berada pada Instansi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mana Kewenangan Perlindungan Masyarakat berada di Satuan Polisi Pamong Praja.	Pelimpahan Kewenangan Satuan Perlindungan masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ke struktur kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja.
20.3.	Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	(<)	Data Pos Siskamling tidak akurat dikarenakan kewenangan Perlindungan Masyarakat masih berada di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Pelimpahan Kewenangan Satuan Perlindungan masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ke struktur kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja.
20.4.	Pertumbuhan ekonomi			
20.5.	Kemiskinan			
20.6.	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	(=)		
20.7.	Penegakan PERDA	(=)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan PPNS Penegak Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja 2. Tidak adanya Biaya Penyidikan 3. Tidak adanya Standar Biaya Penyidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalokasian dana Diklat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja 2. Pengalokasian Anggaran Penyidikan

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
				3. Penetapan Peraturan Bupati menyangkut Standar Biaya Penyidikan
20.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	(<)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja sehingga Jumlah Kelompok Patroli untuk semua kecamatan tidak terpenuhi 2. Terbatasnya Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja 3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung Patroli seperti kendaraan Roda Dua dan Kendaraan Patroli Laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja 2. Penambahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja 3. Penambahan Sarana dan Prasarana Patroli Satuan Polisi Pamong Praja
20.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	(>)	Tingkat Kesadaran masyarakat dalam menjaga Trantibum Tranmas masih sangat Kurang, jika dilihat dari tingginya angka pelanggaran Trantibum Tranmas	Diperlukan sosialisasi secara menyeluruh di Kalangan Masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan selayar.
20.10.	Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	(<)	Data Petugas Perlindungan Masyarakat tidak akurat dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota, dikarenakan kewenangan Perlindungan Masyarakat masih berada di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Pelimpahan Kewenangan Satuan Perlindungan masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ke struktur kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja.
20.11.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kabupaten	(<)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Armada Pemadam Kebakaran Jika Dibandingkan Dengan Cakupan Area yang Ada 2. Tidak adanya cadangan air di Lokasi (Kecamatan) Sehingga Penanganan Kebakaran yang Cukup Lama Akibat Akses yang Jauh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Armada Damkar sesuai standar Wilayah Manajemen Kebakaran 2. Tersedianya Hidrant 3. Tersedianya Pos Wilayah Manajemen Kebakaran

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			3. Kurangnya Tenaga Pemadam Kebakaran Yang Terlatih 4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Faktor-Faktor Pemicu Kebakaran	4. Tersedianya Bak Air dimasing-masing Kecamatan
20.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	(=)	1. SDM Belum Memadai 2. Minimnya Sarana dan Prasarana	1. Peningkatan SDM Aparatur Melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bagi Personil Damkar 2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai
20.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik			
20.14.	Sistem informasi Manajemen PEMDA			
20.15.	Indeks Kepuasan Layanan masyarakat			
21.	Ketahanan Pangan			
21.1.	Regulasi Ketahanan Pangan		1. Regulasi ketahanan pangan masih kurang 2. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan belum optimal 3. Pola konsumsi pangan yang belum beragam bergizi dan seimbang. Konsumsi pangan kita masih dominan unsur Karbohidrat. 4. Belum terpenuhinya cadangan pangan Pemda dan lumbung pangan masy (sesuai SPM), Serta distribusi pangan yang belum merata. 5. Koordinasi data dengan SKPD terkait belum optimal (data kurang akurat dan sering terlambat). 6. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Ketahanan Pangan	1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan regulasi ketahanan pangan secara optimal 2. Perlu langkah terobosan berupa gerakan swasembada sayur mayur untuk memperbaiki kualitas konsumsi pangan penduduk. 3. Perlu diakomodasi dalam RPJMD 2016-2021, 7 Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten (sesuai SPM Bid. Ketahanan Pangan). 4. Terciptanya sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal data dan perencanaan program/ kegiatan secara terpadu.

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
				5. Perlu Pelatihan Aparat tentang Tatakelola Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten.
21.2.	Ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan utama sebesar 40,57% di Tahun 2014	1. Produktifitas masih rendah 2. Kualitas beras masih rendah 3. Distribusi belum merata	1. Intensifikasi 2. Peralatan pengering gabah 3. Gudang produksi 4. Rice milling Unit (RMU) 5. Kemasan 6. Sarana Transportasi 7. Lumbung Pangan Masy. (LPM) 8. Kelompok Pengelola LPM
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat sebanyak 7 LPM	Masih adanya beberapa kelompok binaan LPM yang belum terdata	Pendataan kembali secara tertib seluruh kelompok binaanmLPM
22.2.	Rata-rata jumlah keluarga binaan PKK			
22.3.	Jumlah LSM yang dibina (%)	Jumlah LSM yang dibina sebanyak 75		Pembinaan yang terus menerus dan terarah sesuai fungsi dan peran LSM
22.4.	LPM aktif dan berprestasi (%)	LPM aktif dan berprestasi sebanyak 85	Masih adanya LPM yang belum mengetahui konsep kegiatan pemberdayaan	Perlunya peningkatan pengetahuan konsep kegiatan pemberdayaan
22.5.	PKK aktif (%)	(<) Persentase PKK aktif sebesar 98% dan belum mencapai target (100)	Masih kurangnya kinerja kader PKK	Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kader PKK
22.6.	Posyandu aktif (%)	(<) Persentase posyandu aktif sebesar 85% dan belum mencapai target (100%)	1. Kader yang kurang maksimal melaksanakan tugasnya 2. Masih kurangnya kunjungan masyarakat ke posyandu	Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat nyata dan bermanfaat secara langsung
22.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	(>) Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat sebesar 75%, dan telah melampaui target (25%)		Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat nyata dan bermanfaat secara langsung
22.8.	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat			

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
23.	Statistik			
23.1.	Buku "Kepulauan Selayar Dalam Angka"	Ada		Kesadaran atas pentingnya data dasar sebagai bahan perencanaan
23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada		Kesadaran atas pentingnya data PDRB
24.	Kearsipan			
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku (%)	=	Belum ada sarana dan prasarana berupa Depo Arsip	Diperlukan Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kearsipan
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	<	Masih kurangnya pelatihan / Bimtek mengenai Kearsipan yang diselenggarakan	Pelatihan dan Rekrutmen Tenaga Arsiparis
25.	Komunikasi dan Informatika			
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	Jumlah jaringan komunikasi yang ada sebanyak 4	Masih banyak daerah yang Blank Area sehingga menghambat komunikasi masyarakat	Pembangunan Tower BTS di setiap daerah yang masih Blank Area
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk sebesar 0,140	Perkembangan teknologi informasi terutama jaringan seluler dan meyebabkan berkurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan Wartel	Pengadaan Media Center di setiap kecamatan dan ketersediaan jaringan wifi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi
25.3.	Jumlah surat kabar	Jumlah surat kabar sebanyak 10	Masih kurangnya penyampaian kebijakan pemerintah daerah melalui Surat Kabar Lokal maupun Surat Kabar Nasional	Penambahan anggaran terkait desiminasi informasi melalui Surat Kabar
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Jumlah penyiaran radio/TV lokal sebanyak 3	Radio dan TV Lokal terkendala pada Izin Siar, kurangnya SDM, serta terbatasnya dana.	Sosialisasi kepada Pemilik Radio dan TV Lokal terkait izin siar, Diklat SDM bidang penyiaran serta penambahan anggaran untuk penyebarluasan informasi melalui radio dan TV Lokal
25.5.	Website milik pemerintah daerah	Terdapat 5 Website milik pemerintah daerah	Kurangnya SDM Teknologi Informasi di setiap SKPD	Pengadaan SDM Teknologi Informasi pada setiap SKPD
25.6.	Pameran/ Expo	Setiap tahunnya diselenggarakan Pameran/ Expo (1)	Pameran expo tidak terlaksana secara rutin setiap tahun	Pelaksanaan Pameran Expo untuk mendukung Desiminasi Potensi Daerah
26.	Perpustakaan			

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
26.1.	Jumlah Perpustakaan	=	Tidak ada UPT Perpustakaan	Diperlukan kebijakan pembentukan UPT Perpustakaan
26.2.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah (Org) per tahun	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah (Org) per tahunnya berfluktuasi dan pada tahun 2014 sebanyak 45.708 pengunjung	Sarana Pendukung Belum memadai (AC, Meja Kursi Baca)	Peningkatan sosialisasi Gemar Membaca
26.3.	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (exp)	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (exp) sebanyak 59,45 (tahun 2014)	Pengadaan Buku Tidak Rutin Setiap Tahun	Diperlukan Pengadaan Koleksi Buku Yg Rutin Setiap Tahun
II.	Fokus Layanan Urusan Pilihan			
1.	Pertanian			
1.1.	Produktifitas tanaman bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	(>)	1. Kurangnya infrastruktur pengairan, khusus pengairan dari luas sawah 3.572 Ha, dan baru 1.459 Ha (40,85 %) saja yang dapat diairi. Hal ini berakibat pada upaya penerapan teknologi budidaya pertanian, di mana sering terjadi pada waktu pemupukan akan dilakukan, petakan sawah tidak berair sehingga pemupukan ditunda dan ini sangat berpengaruh terhadap produktifitas. 2. Kurangnya kemampuan finansial para petani untuk membiayai usaha taninya	1. Pengairan (Ketersedian air) 2. Penggunaan benih unggul 3. Pemupukan berimbang (khusus ketersediaan pupuk) 4. Pengendalian OPT 5. Penanganan Pasca panen
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB			
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB			
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	(>)	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal penggunaan pupuk dan pestisida	1. Penggunaan Pestisida dan pupuk berimbang 2. Pemeliharaan secara berkala
1.5.	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB			

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.6.	Cakupan bina kelompok petani			
2.	Kehutanan			
2.1.	Rehabilitasi hutan dan Lahan kritis		1. Sistem pengelolaan kegiatan ini masih kurang terpadu 2. Sosialisai program kegiatan belum merata 3. Penyediaan bibit tanaman belum merata 4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pelestarian alam dan lingkungan	1. Luas Lahan kritis berkurang 2. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3. Ketersediaan bibit tanaman yang mandiri 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
2.2.	Kerusakan kawasan hutan		Kurangnya pengetahuan dan Kesadaran masyarakat akan dampak dari kerusakan hutan	Dukungan sarana dan prasarana yang memadai oleh Pemda dalam menjaga kawasan hutan
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	(<)		
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
3.1.	Pertambangan tanpa ijin		1. Kurang terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan dengan rencana tata ruang. 2. Lokasi penambangan yang tidak menetap 3. Luas lokasi / areal penambangan kecil 4. Meningkatnya kegiatan penambangan tanpa Ijin (PETI) karena pelimpahan kewenangan Ijin pertambangan Daerah ke Tingkat Provinsi belum Optimal	1. Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tata ruang dan penegakan hukum. 2. Pembinaan dan pengawasan Usaha Pertambangan. 3. Sosialisasi peraturan kegiatan usaha pertambangan. 4. Pembentukan lembaga Perwakilan di Kabupaten/Kota. 5. Adanya Badan Usaha khusus yang menangani Bahan tambang batuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB		Belum terpenuhinya perhitungan PDRB semua sektor	Keterkaitan semua sektor dalam Perhitungan PDRB
4.	Pariwisata			
4.1.	Kunjungan Wisata	Kunjungan Wisata tahun 2015 adalah 6199	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya destinasi wisata 2. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam promosi 3. Belum ada strategi promosi yang jelas 4. Usaha pariwisata yang belum sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antara stakeholder 2. Penggunaan teknologi internet 3. Membuat strategi pasar yang jelas 4. Pembinaan usaha pariwisata 5. Dukungan pemda dalam pengembangan lokasi wisata dan pemeliharaan lokasi wisata yang ada sangat baik 6. Pemasaran dan promosi pariwisata 7. Bina Partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan mitra usaha
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB			
5.	Kelautan Perikanan			
5.1.	Produksi perikanan	Produksi perikanan tahun 2015 sebesar 24.960	<ul style="list-style-type: none"> - Aktifitas penangkapan yang berlebihan - Illegal fishing (Bom/Bius) - Kapal-kapal besar (pursein) cenderung lebih banyak mendaratkan hasil tangkapan di uar kab. Kepulauan selayar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan terhadap berbagai tindakan ilegal fishing dan penegakan hukum 2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya ilegal fishing terhadap lingkungan perairan 3. Membuat aturan/ PERDA tentang larangan melakukan pendaratan ikan di luar kabupaten jika lokasi penangkapan di daerah tersebut, disertai dengan pengawasan.
5.2.	Konsumsi ikan	Konsumsi ikan tahun 2015 sebesar 49,45%	Konsumsi ikan sudah melampaui standar nasional yaitu 40 kg/ /orang/tahun untuk tahun 2015. Akan tetapi jika	Pemerintah dalam hal ini KKP bekerjasama dengan DKP menggalang semua kalangan

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			dibandingkan dengan negara berkembang yang memiliki konsumsi ikan tinggi dengan luas perairan yang lebih kecil misalnya malaysia yang tahun 2014 konsumsi ikannya mencapai 70 kg/orang/tahun dibandingkan dengan indonesia yang memiliki perairan lebih luas dengan konsumsi ikan yang lebih rendah yaitu 38 kg/orang/tahun.	masyarakat agar ikan dapat menjadi produk utama dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mendukung gerakan ayo makan ikan dan memperingati hari perikanan nasional (harkannas) setiap tanggal 21 November
5.3.	Cakupan Bina kelompok nelayan	Cakupan Bina kelompok nelayan 160		
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Produksi perikanan kelompok nelayan 26490		
6.	Perdagangan			
6.1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	(<)	Potensi perdagangan atau komoditas unggulan di daerah belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal	Kebijakan pembangunan ekonomi dikondisikan dengan letak geografis dan potensi unggulan daerah
6.2.	Ekspor bersih perdagangan		Hasil yang diperoleh masih relatif kecil dan belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat secara optimal	Pemberdayaan sumber daya alam diseimbangkan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang serta peningkatan sumber daya manusia
6.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	(<)	Wilayah pesisir menghadapi pertumbuhan yang lamban dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti pasar, sarana transportasi, dan lain-lain	Kab. Kepulauan Selayar yang dilalui kapal - kapal dagang besar dapat dijadikan poros maritim nusantara khusus Kab. Kepulauan Selayar sebagai daerah kepulauan mempunyai potensi perikanan dan wilayah bahari yang besar
7.	Perindustrian			
7.1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	(<)	Kurangnya SDM	Pelatihan Pembinaan Fasilitasi peralatan Sosialisasi

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri			
7.3.	Pertumbuhan industri			
7.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin			
8.	Ketransmigrasian			
8.1.	Transmigrasi swakarsa (%)		Belum adanya lokasi transmigrasi di Kab. Kepulauan Selayar	
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
I.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			
II.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur			
1.	Perhubungan			
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,002	Tingkat Pertumbuhan ekonomi dan yang cukup tinggi menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap masyarakat akan transportasi	Peningkatan fasilitas jalan dari desa ke Ibukota Kabupaten.
1.2.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	128.744	Tidak adanya fasilitas jembatan timbang milik Pemerintah Daerah	Perlunya fasilitas jembatan timbang untuk mengukur jumlah angkutan barang.
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	369.175	1. Fasilitas Dermaga yang belum memadai 2. Terminal yang tidak berfungsi dengan baik karena Kurangnya kesadaran pengemudi angkutan umum	1. Pengembangan Kapasitas Dermaga Penyeberangan 2. Peningkatan kesadaran pengemudi angkutan umum melalui operasi penertiban bersama dengan pihak terkait
3.	Otonomi daerah,Pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat daerah,Kepegawaian dan Persandian			
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Sampai pada tahun 2014 jumlah bank dan cabang ada 5 bank cabang		
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Jumah perusahaan asuransi pada tahun 2014 ada 3		
3.2.	Jenis,kelas,dan jumlah restoran	Jenis,kelas,dan jumlah restoran 59		
3.4.	Jenis,kelas,dan jumlah penginapan/hotel	Sesuai dengan kelas hotel yang ada di Selayar terdapat 4 hotel melati dan 4 wisma		
III.	Fokus Iklim Berinvestasi			

NO	URUSAN/IKK	INTERPRETASI/TAFSIRAN CAPAIAN TARGET	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.	Otonomi Daerah,pemerintahUmum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat daerah,Kepegawaian dan Persandian			
1.1.	Angka kriminalitas	Angka kriminalitas tahun 2015 sebanyak 428		
1.2.	Jumlah demo	Jumlah demo 5		
1.3.	Lama proses perijinan	10		
1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	9 jenis pajak, 28 jenis retribusi		
1.5.	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha 1		
1.6.	Persentase desa berstatus Swasembada terhadap total desa			
IV.	Fokus Sumber Daya Manusia			
1.	Ketenagakerjaan			
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	Jumlah lulusan S1/S2/S3 Tahun 2014 sebesar 903		

Tabel
Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>A. Sembilan (9) Agenda Prioritas dalam Nawacita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghadirkan kembali untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara 2) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 	<p>Sebelas (11) Program Prioritas Gubernur yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS 2. Bantuan 5 juta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan 100 juta bibit tanaman hutan 3. Gratis modal pengembangan Usaha Mikro Kecil 4. Gratis paket modal usaha pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa 5. Dukungan untuk fasilitasi dan regulasi pembangunan industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian Millenium Development Goals 2. Post 2015 Development Agenda 3. Sustainable Development Goals 4. Pemanasan Global 5. Globalisasi Informasi 6. Perdagangan Bebas 7. Masyarakat Ekonomi ASEAN

	<p>6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.</p> <p>7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.</p> <p>8) Melakukan revolusi karakter bangsa.</p> <p>9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.</p> <p>B. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</p> <p>C. Pengembangan Ekonomi melalui Kawasan Ekonomi Khusus</p> <p>D. Penguatan Konektivitas Nasional</p>	<p>minimal 24 unit sesuai potensi kabupaten/kota di Sulawesi Selatan</p> <p>6. Membuka 500 ribu lapangan kerja baru</p> <p>7. Gratis paket peningkatan kualitas rumah rakyat miskin</p> <p>8. Melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA</p> <p>9. Melanjutkan kesehatan gratis</p> <p>10. Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus seperti pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan, dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas</p> <p>11. Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui <i>boarding school</i> untuk guru SD, SMP, SMA, guru mengaji, mubalig, khatib dan alim ulama.</p>	
--	--	---	--

